Pemerintah
Kota Pekalongan

Pekalongan
World's City of Batik

RANCANGAN TEKNOKRATIK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2025 dapat kami selesaikan.

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ini disusun dengan pendekatan teknokratik sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan berdasarkan pada analisis data-data statistik serta infomasi terkait lainnya. Kemudian data dan informasi tersebut dikonstruksikan menjadi isu strategis yang diasumsikan akan dihadapi selama periode pembangunan tahun 2021-2025. Proses konstruksinya dilaksanakan dengan menerapkan cara-cara berpikir ilmiah, yaitu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga secara praktik penyusunannya. Dilihat secara waktu, penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2025 ini dilaksanakan sebelum penetapan Kepala Daerah terpilih, sehingga belum mengkolaborasikan pendekatan politis yang berupa visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ini dilandasi pemikiran bahwa RPJMD yang akan disusun ini merupakan periode terakhir dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini berpedoman pada dokumen RPJPD tersebut.

Secara umum, Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ini disusun dalam 5 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dan Bab V Penutup.

Harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah Kota Pekalongan. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun dan senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan .

Pekalongan, 30 Desember 2020

Kepala Bappeda Kota Pekalongan,

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ **II**

DAFTAR ISI ____ **III**

DAFTAR TABEL ____ **V**

DAFTAR GAMBAR ____ **XV**

BAB I PENDAHULUAN ____ **1**

1.1. Latar Belakang ____ 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ____ 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ____ 5

1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024 ____ 6

1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ____ 7

1.3.3. Amanat RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025 ____ 12

1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 ____ 15

1.3.5. Hubungan Antar Dokumen ____ 17

1.4. Maksud Dan Tujuan ____ 22

1.5. Sistematika Penulisan ____ 22

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ____ **25**

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ____ 25

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ____ 26

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ____ 43

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ____ 73

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ____ 149

2.2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2019 ____ 161

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2019 ____ 161

2.2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program Tahun 2019 ____ 178

2.2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 ____ 235

2.2.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019 ____ 240

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ____ **253**

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ____ 253

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ____ 254

3.1.2. Neraca Daerah ____ 257

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ____ 259

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ____ 259

3.2.3. Analisis Pembiayaan ____ 259

3.3. Kerangka Pendanaan ____ 260

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu ____ 260

3.3.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ____ 266

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan ____ 267

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH _____ **269**
4.1. Permasalahan Pembangunan _____ 269
4.1.1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 _____ 271
4.1.2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi _____ 272
4.1.3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam_____ 275
4.1.4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia _____ 278
4.1.5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas_____ 282
4.2. Isu Strategis _____ 285
4.2.1. Isu Internasional _____ 285
4.2.1. Isu atau Kebijakan Nasional _____ 287
4.2.2. Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah _____ 288
4.2.3. Hasil Telaahan RPJP Kota Pekalongan _____ 289
4.2.4. Hasil Telaahan KLHS Kota Pekalongan _____ 290
4.2.5. Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan _____ 302
4.2.6. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS _____ 312
BAB V PENUTUP _____ **317**
DAFTAR PUSTAKA _____ **319**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ---------- 20
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan ---------- 28
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2019 ---------- 33
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019---------- 34
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019---------- 41
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019---------- 41
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 42
Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2015-2019 ---------- 42
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) ---------- 43
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (persen)---------- 45
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 49
Tabel 2.11 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (%) ---------- 51
Tabel 2.12 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2015 – 2019 ---------- 52
Tabel 2.13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 ---------- 53
Tabel 2.14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 60
Tabel 2.15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 61
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ---------- 65
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan Tahun 2019 ---------- 65
Tabel 2.18 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 66
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019---------- 66
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2019 ---------- 67
Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019---------- 67
Tabel 2.22 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 69
Tabel 2.23 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 69
Tabel 2.24 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 70

Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 72
Tabel 2.26 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 72
Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 73
Tabel 2.28 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 73
Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 74
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 74
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 75
Tabel 2.32 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 75
Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 75
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 76
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 76
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 77
Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 77
Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 – 2019 ---------- 78
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2015 – 2019 ---------- 78
Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 79
Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 79
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2015 – 2019 ---------- 79
Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 80
Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2019 ---------- 80
Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 80
Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 81
Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 82
Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 82
Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 83

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 83
Tabel 2.51 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---- 84
Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---- 84
Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---- 84
Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2015–2019 ---- 85
Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 86
Tabel 2.56 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 ---- 86
Tabel 2.57 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 ---- 86
Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 ---- 87
Tabel 2.59 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan ---- 87
Tabel 2.60 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan ---- 89
Tabel 2.61 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 90
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 91
Tabel 2.63 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 92
Tabel 2.64 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 92
Tabel 2.65 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 93
Tabel 2.66 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 93
Tabel 2.67 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2019 ---- 94
Tabel 2.68 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2015 – 2019 ---- 94
Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 95
Tabel 2.70 Penyelesaian Pelanggar Perda di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 95
Tabel 2.71 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 95
Tabel 2.72 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 96
Tabel 2.73 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 96
Tabel 2.74 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 97

Tabel 2.75 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 97
Tabel 2.76 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 98
Tabel 2.77 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 ---------- 98
Tabel 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019---------- 99
Tabel 2.79 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------100
Tabel 2.80 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2015 – 2019----------101
Tabel 2.81 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------102
Tabel 2.82 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------102
Tabel 2.83 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------104
Tabel 2.84 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------105
Tabel 2.85 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------105
Tabel 2.86 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------106
Tabel 2.87 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------107
Tabel 2.88 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------108
Tabel 2.89 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 --------109
Tabel 2.90 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ----------111
Tabel 2.91 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------112
Tabel 2.92 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------112
Tabel 2.93 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------113
Tabel 2.94 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------113
Tabel 2.95 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------114
Tabel 2.96 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------114
Tabel 2.97 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------115
Tabel 2.98 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------115
Tabel 2.99 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------116
Tabel 2.100 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------116
Tabel 2.101 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------117

Tabel 2.102 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------117
Tabel 2.103 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2015 – 2019 ----------117
Tabel 2.104 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------118
Tabel 2.105 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------118
Tabel 2.106 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2019----------118
Tabel 2.107 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2015 - 2019 ----------119
Tabel 2.108 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------120
Tabel 2.109 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2015-2019 ----------120
Tabel 2.110 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------121
Tabel 2.111 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2019----------121
Tabel 2.112 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------123
Tabel 2.113 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------123
Tabel 2.114 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------123
Tabel 2.115 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------124
Tabel 2.116 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------124
Tabel 2.117 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------125
Tabel 2.118 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------126
Tabel 2.119 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2019 ----------126
Tabel 2.120 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2017-2019----------128
Tabel 2.121 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------128
Tabel 2.122 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - Tahun 2019 ----------129
Tabel 2.123 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------129
Tabel 2.124 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2019----------130
Tabel 2.125 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2019----------130
Tabel 2.126 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2015- 2019 (kg) ----------131
Tabel 2.127 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (kg/kapita/tahun) ----------132
Tabel 2.128 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------132

Tabel 2.129 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (ton) ---------- 133
Tabel 2.130 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 133
Tabel 2.131 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 134
Tabel 2.132 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 134
Tabel 2.133 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 135
Tabel 2.134 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2014-2018 ---------- 135
Tabel 2.135 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 136
Tabel 2.136 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 136
Tabel 2.137 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 137
Tabel 2.138 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 -------- 137
Tabel 2.139 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 138
Tabel 2.140 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 138
Tabel 2.141 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ---------- 138
Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 139
Tabel 2.143 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 139
Tabel 2.144 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 141
Tabel 2.145 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---------- 141
Tabel 2.146 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 ---------- 142
Tabel 2.147 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019 ---------- 145
Tabel 2.148 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019 ---------- 145
Tabel 2.149 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---------- 147
Tabel 2.150 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 148
Tabel 2.151 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 ---------- 148
Tabel 2.152 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 149
Tabel 2.153 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---------- 149
Tabel 2.154 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2015 – 2019 ---------- 149

Tabel 2.155 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------150
Tabel 2.156 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019 ----------153
Tabel 2.157 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------154
Tabel 2.158 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------154
Tabel 2.159 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha ----------155
Tabel 2.160 Inovasi Daerah Lainnya ----------159
Tabel 2.161 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan----------160
Tabel 2.162 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan----------161
Tabel 2.163 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 ----------161
Tabel 2.164 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I ----------162
Tabel 2.165 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan----------162
Tabel 2.166 Akreditasi Sekolah----------162
Tabel 2.167 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II ----------163
Tabel 2.168 Hasil Penilaian SAKIP Kota Pekalongan----------165
Tabel 2.169 Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018-2019----------168
Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III ----------168
Tabel 2.171 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019----------169
Tabel 2.172 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV ----------170
Tabel 2.173 Persandingan Cakupan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan Tahun 2018 dan 2019. ----------171
Tabel 2.174 Penanganan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2019 ----------171
Tabel 2.175 Data Hasil Survei VC Ratio Jalan Nasional Kota Pekalongan Tahun 2019 ----------172
Tabel 2.176 Capaian IKLH Kota Pekalongan Tahun 2017-2019 ----------173
Tabel 2.177 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V ----------173
Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi VI ----------174
Tabel 2. 179 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2019----------175
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan Tahun 2019 ----------176
Tabel 2.181 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2019----------178
Tabel 2.182 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2019----------183
Tabel 2.183 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2019----------184
Tabel 2.184 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2019 ----------188
Tabel 2.185 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019----------190

Tabel 2.186 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019----------192
Tabel 2.187 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019----------193
Tabel 2.188 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas Tahun 2019----------194
Tabel 2.189 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas Tahun 2019----------195
Tabel 2.190 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2019--------196
Tabel 2.191 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 ----------197
Tabel 2.192 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019 ----------198
Tabel 2.193 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pangan Tahun 2019----------198
Tabel 2.194 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pertanahan Tahun 2019----------199
Tabel 2.195 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 ----------200
Tabel 2.196 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 ----------202
Tabel 2.197 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ----------203
Tabel 2.198 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019----------204
Tabel 2.199 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019----------205
Tabel 2.200 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perhubungan Tahun 2019 ----------206
Tabel 2.201 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019----------207
Tabel 2.202 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019----------209
Tabel 2.203 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019 ----------210
Tabel 2.204 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2019 ----------211
Tabel 2.205 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kebudayaan Tahun 2019 ----------212
Tabel 2.206 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan Tahun 2019 ----------213
Tabel 2.207 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kearsipan Tahun 2019----------214
Tabel 2.208 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 ----------215
Tabel 2.209 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Statistik Tahun 2019----------216
Tabel 2.210 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Persandian Tahun 2019----------216

Tabel 2.211 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2019 ---- 217
Tabel 2.212 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pariwisata Tahun 2019 ---- 218
Tabel 2.213 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pertanian Tahun 2019 ---- 219
Tabel 2.214 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perindustrian Tahun 2019 ---- 220
Tabel 2.215 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perdagangan Tahun 2019 ---- 221
Tabel 2.216 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Perencanaan Tahun 2019 ---- 223
Tabel 2.217 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah Tahun 2019 ---- 224
Tabel 2.218 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Kepegawaian dan Diklat Tahun 2019 ---- 226
Tabel 2.219 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 ---- 227
Tabel 2.220 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Lainnya Tahun 2019 ---- 228
Tabel 2.221 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Fungsi Lainnya Tahun 2019 ---- 232
Tabel 2.222 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun 2019 ---- 233
Tabel 2.223 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 235
Tabel 2.224 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 236
Tabel 2.225 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 237
Tabel 2.226 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 238
Tabel 2.227 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 239
Tabel 2.228 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 240
Tabel 2.229 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 241
Tabel 2.230 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 247
Tabel 2.231 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 249
Tabel 2.232 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2019 ---- 251
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ---- 256
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ---- 256
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ---- 257

Tabel 3.4 Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2018 ----------257
Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2016-2019----------259
Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2016-2019 ----------260
Tabel 3.7 Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2016-2019 ----------260
Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025----------261
Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025----------265
Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025----------265
Tabel 3.11 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020----------266
Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2021-2025----------267
Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ----------267
Tabel 4.1 Keterkaitan Kondusivitas Wilayah, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------272
Tabel 4.2 Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------273
Tabel 4.3 Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------276
Tabel 4.4 Keterkaitan Banjir dan Rob, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------277
Tabel 4.5 Keterkaitan Sarana Prasaran Perkotaan, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------278
Tabel 4.6 Keterkaitan Kualitas SDM, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------279
Tabel 4.7 Keterkaitan Derajat Kesehatan Masyarakat, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------280
Tabel 4.8 Keterkaitan Kesejahteraan Masyarakat, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------282
Tabel 4.9 Keterkaitan Daya Saing Ekonomi, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------283
Tabel 4.10 Keterkaitan Pelestarian Budaya, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra ----------284
Tabel 4.11 Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Keterkaitan dengan Target TPB ----------291
Tabel 4.12 Permasalahan dan Isu Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS ----------296
Tabel 4.13 Sasaran Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS ----------300
Tabel 4.14 Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS ----------313

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang ---------- 17
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan---------- 27
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan ---------- 28
Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan---------- 29
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan---------- 31
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal---------- 31
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan ---------- 35
Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang ---------- 37
Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang---------- 38
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ---------- 43
Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ---------- 44
Gambar 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2015 – 2019---------- 45
Gambar 2.12 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%) ---------- 51
Gambar 2.13 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ---------- 53
Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 (000 jiwa) ---------- 54
Gambar 2.15 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ---------- 55
Gambar 2.16 Perbandiangan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019---------- 55
Gambar 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 56
Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ---------- 57
Gambar 2.19 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 57
Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ---------- 58
Gambar 2.21 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 59
Gambar 2.22 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019---------- 59

Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019 (%) ---------- 61
Gambar 2.24 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 ---------- 62
Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ---------- 62
Gambar 2.26 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ---------- 63
Gambar 2.27 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019---------- 64
Gambar 2.28 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2015-2019 ---------- 68
Gambar 2.29 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ---------- 70
Gambar 2.30 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 ---------- 71
Gambar 2.31 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------100
Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 ----------101
Gambar 2.33 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------103
Gambar 2.34 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019----------103
Gambar 2.35 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------104
Gambar 2.36 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ----------107
Gambar 2.37 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2015 – 2019----------108
Gambar 2.38 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019----------109
Gambar 2.39 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------110
Gambar 2.40 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------110
Gambar 2.41 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------111
Gambar 2.42 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------114
Gambar 2.43 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019 ----------122
Gambar 2.44 Jumlah Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019----------130
Gambar 2.45 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ----------137

Gambar 2.46 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019 ---- 150
Gambar 2.47 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 151
Gambar 2.48 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 152
Gambar 2.49 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 153
Gambar 2.50 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 ---- 154
Gambar 2.51 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 ---- 156
Gambar 2.52 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ---- 156
Gambar 2.53 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 ---- 157
Gambar 2.54 Perbandingan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ---- 164
Gambar 2.55 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018 ---- 167
Gambar 2.56 Peta Genangan di Kota PekalonganTahun 2019 ---- 170
Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (dalam jutaan) ---- 254
Gambar 4.1 Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ---- 270
Gambar 4.2 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dengan Masalahan Utama ---- 270
Gambar 4.3 Pemetaan Masalah Utama Kondusivitas Wilayah dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 271
Gambar 4.4 Pemetaan Masalah Utama Tata Kelola Pemerintahan dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 273
Gambar 4.5 Pemetaan Masalah Utama Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 276
Gambar 4.6 Pemetaan Masalah Utama Banjir dan Rob dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 277
Gambar 4.7 Pemetaan Masalah Utama Kualitas Lingkungan Hidup dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 278
Gambar 4.8 Pemetaan Masalah Utama kualitas SDM dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 279
Gambar 4.9 Pemetaan Masalah Utama Derajat Kesehatan Masyarakat dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 280
Gambar 4.10 Pemetaan Masalah Utama Kesejahteraan Masyarakat dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 281
Gambar 4.11 Pemetaan Masalah Utama Daya Saing Ekonomi dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 283
Gambar 4.12 Pemetaan Masalah Utama Pelestarian Seni Budaya dan Masalah Daerah Kota Pekalongan ---- 284

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 yang akan disusun ini memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam RKPD, ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD.

Upaya untuk mengawal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD ini dilakukan selain secara substansi untuk menjaga konsistensi perencanaan, juga secara legal formal telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 memiliki masa transisi pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan periodisasi lima tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, yang secara periodik memiliki pengaturan sebagai berikut :

a. RPJMD I tahun 2005-2009
b. RPJMD II Tahun 2010-2014
c. RPJMD III Tahun 2015-2019
d. RPJMD IV Tahun 2020-2024.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021-2025 yang akan disusun ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2025 ini akan mulai berlaku pada bulan Agustus 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2021 akan tetap mengacu pada RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021. Atau dengan kata lain, RPJMD Tahun 2021-2025 baru akan efektif diterapkan pada tahun 2022.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 juga akan mempengaruhi penilaian substansi evaluasi RKPD Tahun 2021 yang akan dilakukan pada awal tahun 2022. Dengan adanya batasan waktu penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 pada maksimal minggu ketiga bulan Juli tahun 2021, maka proses lebih lanjut dalam penganggaran, baik KUPA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2021, secara tidak langsung juga akan mempedomani RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini karena Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Juli 2021 akan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Pencermatan atas mulai berlakunya RPJMD Tahun 2021-2025 ini sangat penting, karena sudah menjadi kebiasaan, bahwa kepala Daerah terpilih akan segera ditagih oleh masyarakat untuk segera mengimplementasikan visi, misi dan program pembangunan yang disampaikan pada saat kampanye. Di sisi lain, apabila akan mengimplementasikan visi, misi, dan program pada Perubahan APBD Tahun 2021, maka memiliki konsekuensi untuk memundurkan pentahapan penetapan Perubahan RKPD yang akan berdampak pada mundurnya pentahapan Perubahan APBD. Berbagai konsekuensi di atas, perlu dicermati dan disikapi dalam tahapan lebih lanjut dari proses penyusunan RPJMD ini.

Berkaitan dengan dasar dan waktu penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan RPJMD, batas waktu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
32. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

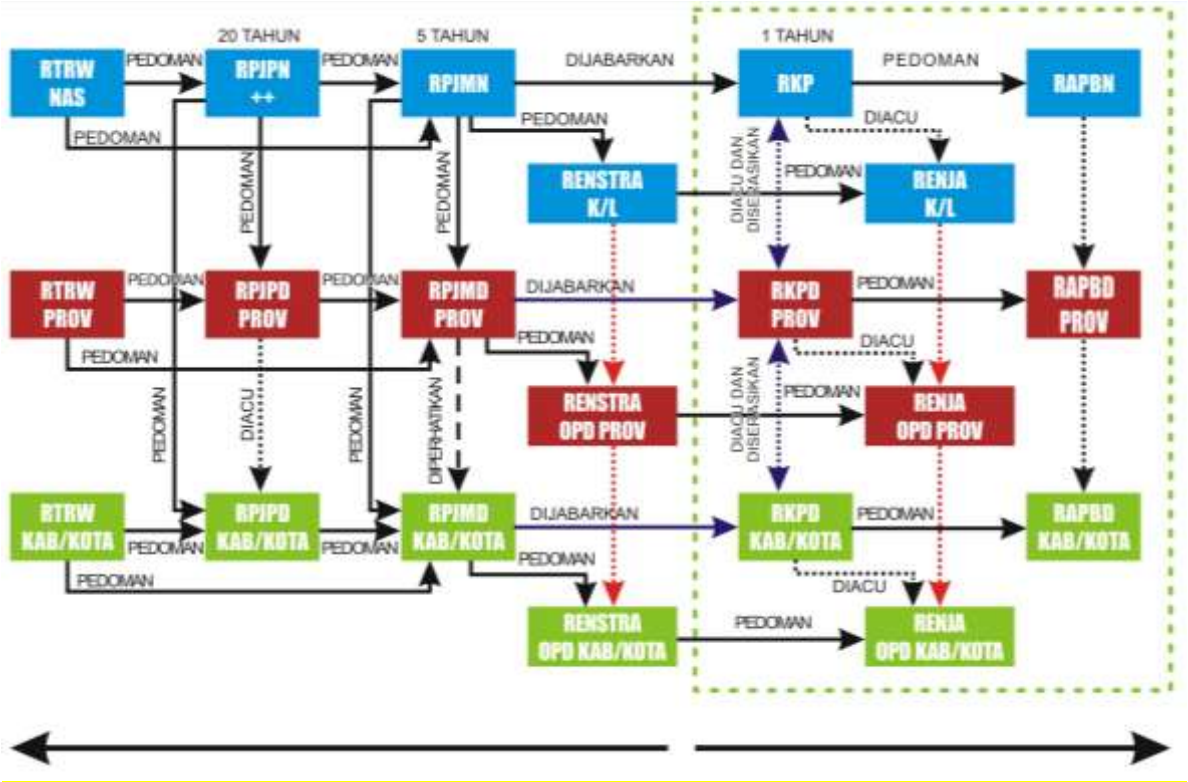

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**" yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0%;
b. Tingkat inflasi sebesar 2,7%;
c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

1.3.2.1. Visi Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 4 (empat) misi pembangunan, sebagai berikut :

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI**

   Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

   Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. **Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota**

   Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsive diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era

globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuatmenjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

1.3.2.2. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu :

1. **Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK**

   Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

2. **Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama**

   Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3. **Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi**

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4. **Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni**

   Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

   Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

   Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa

Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5. **Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda**

   Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah.

   Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan

   untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa.

   Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan startup wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6. **Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan**

   Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya.

   Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7. **Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi**

   Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

   Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistic perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (food, feed, fuel, fertilizer, fiber). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigm kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

1.3.3. Amanat RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025, dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, melalui :**
   a) Pemantapan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama yang makin memantapkan penerapan moral keagamaan di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merugikan masyarakat luas dan pemerintah.
   b) Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
   c) Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kota Pekalongan dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
   d) Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
   e) Pemantapan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum didukung pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar HAM.
   f) Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban memalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait.
   g) Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
   h) Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.
2. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi, melalui :**
   a) Pemantapan sistem penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terarah secara optimal, efektif serta efisien dalam hal penganggaran dan

kegiatan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b) Pemantapan mekanisme, proses, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen utama penentuan kebijakan didukung dengan pemeliharaan dan updating data statistik daerah yang valid, akurat, dan mutakhir.

c) Pemantapan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, netral, bebas KKN dan sejahtera.

d) Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pemerintahan yang baik.

e) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f) Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada seluruh bidang pelayanan.

g) Pemantapan kinerja pengawasan pembangunan daerah sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran sumber-sumber daya pembangunan daerah untuk mendukung upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

h) Pemantapan dan evaluasi peleksanaan pengawasan pembangunan sehingga didapatkan umpan balik guna penyusunan program dimasa datang.

3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, melalui :

a) Pemantapan sistem transportasi termasuk pembangunan akses jalan tol yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang handal.

b) Penguatan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana prasarana perumahan dan permukiman, dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga Miskin.

c) Pemantapan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional melalui peningkatan dan pemantapan system manajemen penyelenggaraan telekomunikasi, serta pemantapan sistem penyelenggaraan telematika melalui peningkatan sistem manajemen pengelolaan telematika baik dari aspek kelembagaan, organisasi maupun regulasinya.

d) Pemantapan penataan ruang wilayah didukung oleh penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dan kawasan perkotaan, serta pengembangan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

e) Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan daerah.

f) Pemantapan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan serta pengembangan manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

g) Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.

h) Pemantapan pengkayaan sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i) Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan didukung pemantapan sistem pengurangan risiko bencana alam.

j) Pemantapan antisipasi sistem dan prosedur penanganan dan penanggulangan bencana alam.

k) Pemantapan ketercukupan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.

l) Pemantapan penggunaan biofuel (bahan bakar nabati) dalam konservasi lahan kritis.

m) Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, lalulintas air) dan pengendalian daya rusak air (banjir dan kekeringan).

4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :

a) Pemantapan mutu pendidikan menengah dan tinggi yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional, serta peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pasar kerja.

b) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana/prasarana pusat pembelajaran masyarakat serta rekreasi/wisata pendidikan masyarakat.

c) Pemantapan kinerja pelayanan kesehatan dengan tenaga dan sarana, koordinasi lintas sektor, akses kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan yang baik, guna mewujudkan Kota Pekalongan yang sehat dan sejahtera.

d) Pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan profesionalisme serta didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang handal.

e) Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan PMKS dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

f) Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

g) Pemantapan peningkatan kesempatan kerja, motivasi berwirausaha serta bertransmigrasi melalui pemberian ketrampilan dibidang usaha kecil maupun pertanian.

h) Pemantapan program pengendalian dan penyebaran jumlah penduduk melalui pemantapan program KB.

i) Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.

j) Pemantapan pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan kepada pemuda berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI).

k) Pemantapan pembentukan kader pemuda inovatif, kreatif, terampil, mandiri dan tanggungjawab dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan masyrakat.

l) Pemantapan partisipasi dan prestasi keolahragaan Kota Pekalongan.

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, melalui :

a) Pemantapan struktur perekonomian daerah makin kokoh dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.

b) Pemantapan langkah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aktivitas ekonomi dan menuju pasar global.

c) Pemantapan pembangunan agroindustri yang handal dan pemasaran yang efisien pada komoditas agrobisnis sektor pertanian.

d) Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian yang mampu bersaing di pasar global.

e) Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk perikanan daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional.

f) Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk idustri daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional.

g) Pemantapan promosi Produk unggulan dan Investasi.

h) Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian yang mampu bersaing di pasar global.

i) Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam menyokong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia yang profesional.

j) Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk pariwisata daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional.

k) Pemantapan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui upaya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang berwawasan global.

l) Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan yang mampu bersaing di pasar global.

m) Pemantapan fungsi lembaga pemberdayaan ekonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

n) Pemantapan peningkatan investasi yang masuk dan ditanam di Kota Pekalongan.

o) Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendukung kemandirian daerah.

1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** Kawasan Perkotaan Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pusat Kegiatan wilayah ini adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, sehingga sarana prasarana dan fasilitas kota yang ada harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011), yang saat ini masih dalam proses revisi.

Selain Pusat Kegiatan Wilayah, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Sistem Perwilayahan dilakukan dengan pembagian Wilayah Pengembangan dan penentuan arah pengembangan. Kota Pekalongan masuk dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang berpusat di Kawasan Perkotaan Pekalongan, dengan arah pengembangan meliputi : memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan Wilayah sekitarnya, dan pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan (industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan).

Pusat Pelayanan Kota / PPK yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional berada di kelurahan Kauman dan Bendan Kergon. Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota / SPPK tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di : 1) SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto; 2) SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; 3) SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaros; dan 4) SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip. Pelayanan Lingkungan / PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di : 1) PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo; 2) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang; 3) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; 4) PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; 5) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan 6) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana.

Selanjutnya untuk pedoman penataan ruang yang mendukung pelaksanaan RTRW telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab serta KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Kawasan Tirto, Koridor Batas Barat s.d. Jl Gajah Mada, 2) Kawasan Koridor Jl. Hayam Wuruk-Jl. Dr. Cipto dan Alun-alun, 3) Kawasan Koridor Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Gatot Subroto dan Jl. Pelita II, 4) Kawasan Koridor Jl. W.R. Supratman-Jl. Pantai Sari-Jl. Samudra, Kawasan Teknopark Perikanan, 5) Kawasan Terpadu Kuripan dan Koridor Jl. H.O.S. Cokroaminoto, dan 6) Kawasan Batas Kota sebelah Timur dan Koridor Jl. Dr. Sutomo.

Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

1.3.5. Hubungan Antar Dokumen

Dari gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kota Pekalongan, Provinsi, maupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap IV berupa *"Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan*

UUD 1945", akan sejalan dengan program unggulan Provinsi Jawa Tengah yaitu : Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK, serta peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama.

Upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan agamis ini diharapkan akan ikut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang secara nasional ditargetkan mencapai 75,54 pada tahun 2024.

2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap IV berupa *"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi"*, akan sejalan dengan Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga diharapkan akan ikut memberikan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan investasi yang pada akhirnya, upaya ini akan mendorong mewujudkan Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6-7,0% pada akhir tahun 2024.

3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap IV berupa *"Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam"*, akan sejalan dengan upaya : Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi; Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi; dan Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

   Upaya pembangunan infrastruktur diharapkan akan ikut memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6-7,0% pada akhir tahun 2024.

4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap IV berupa *"Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia"*, akan sejalan dengan upaya : Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni; rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.

   Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin dengan jumlah yang sangat terbatas diharapkan akan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas SDM yang ditopang oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada. Sehingga akan berdampak pada penurunan kesenjangan dalam hal penerimaan pendapatan atau dengan kata lain ikut mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam menurunkan Indeks Gini hingga mencapai 0,360-0,374 pada akhir tahun 2024. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan akan ikut menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6-7% serta meningkatkan IPM menjadi 75,54 pada tahun 2024.

5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap IV berupa *"Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan*

Kreativitas", akan sejalan dengan upaya : Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda; dan menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik beserta turunannya dan industri perikanan. Dalam catatan statistik, yaitu berdasarkan perkembangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi Kota Pekalongan juga terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan.

Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator pembangunan nasional pada tahun 2024, berupa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6-7,0%, penurunan Laju inflasi sebesar 2,7%, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6-4,3%.

Secara jelas, hubungan antara dokumen sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

NO	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa TengahTahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Prov	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
VISI	*Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera*	*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*		*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*	
1	Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.	1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK 2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama	5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi	2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam	4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan	3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

NO	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa TengahTahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Prov	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
4	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni 9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda 6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan	2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025, adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Disusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 adalah:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan;
2) Sebagai rancangan awal penyusunan Rancangan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2025;
3) Memberikan masukan kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam menyusun Visi dan Misi, sehingga tetap terjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Nasional;
4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat; dan
5) Memberikan informasi berkaitan dengan isu strategis bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan dalam menyusun Visi dan Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 sebagai dokumen pendahuluan Rancangan Teknokratik RPJMD disusun berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang

meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

BAB V : Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesbilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Program Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut khususnya dalam hal penanganan masalah banjir rob.

Perkembangan terakhir, pandemi ***COVID-19*** (*corona virus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial-budaya dan politik sebagian besar dunia, termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Pekalongan. Dampak pandemi pun telah berimplikasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2020 ini dan tentunya masih akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km^2. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.641 Ha atau 46,41 km^2. Perubahan ini dikarenakan adanya :

a. pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
b. pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi
c. perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,50%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,69%. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,79%, penyumbang terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,88% dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,63%. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa,

maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

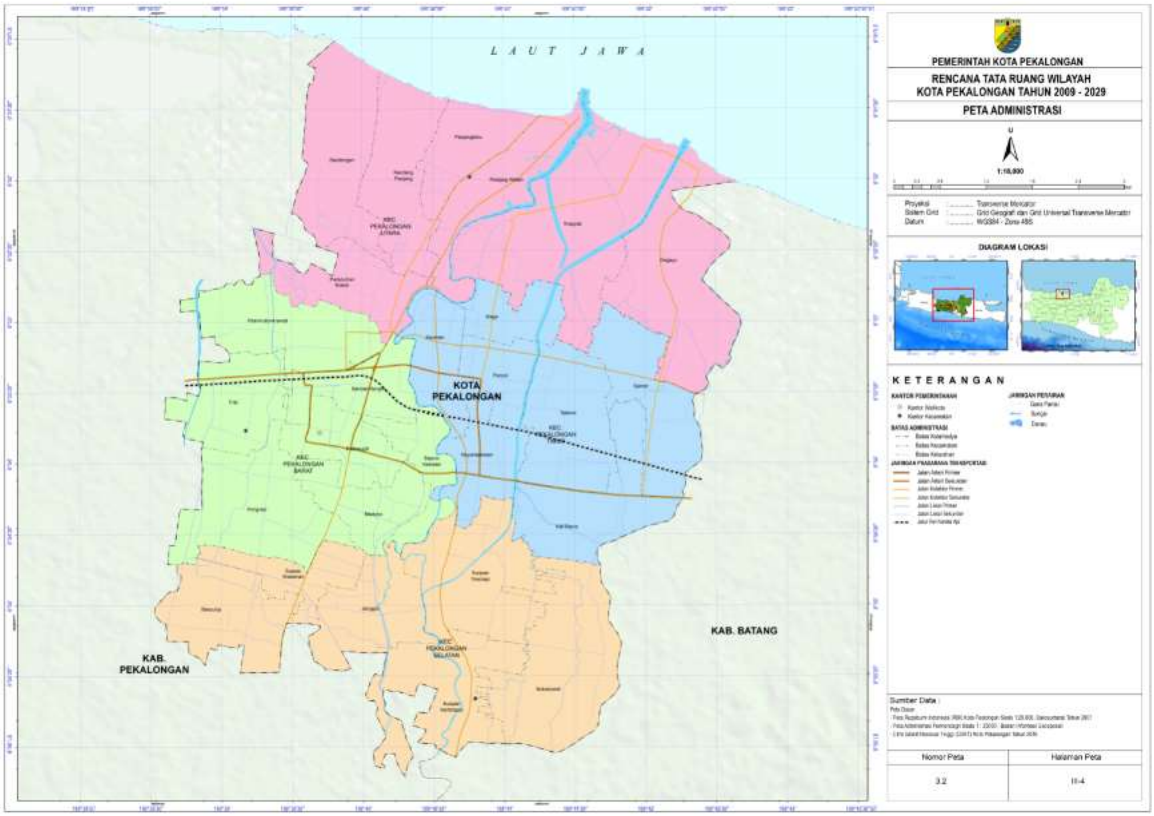

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km^2 atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulanginya.

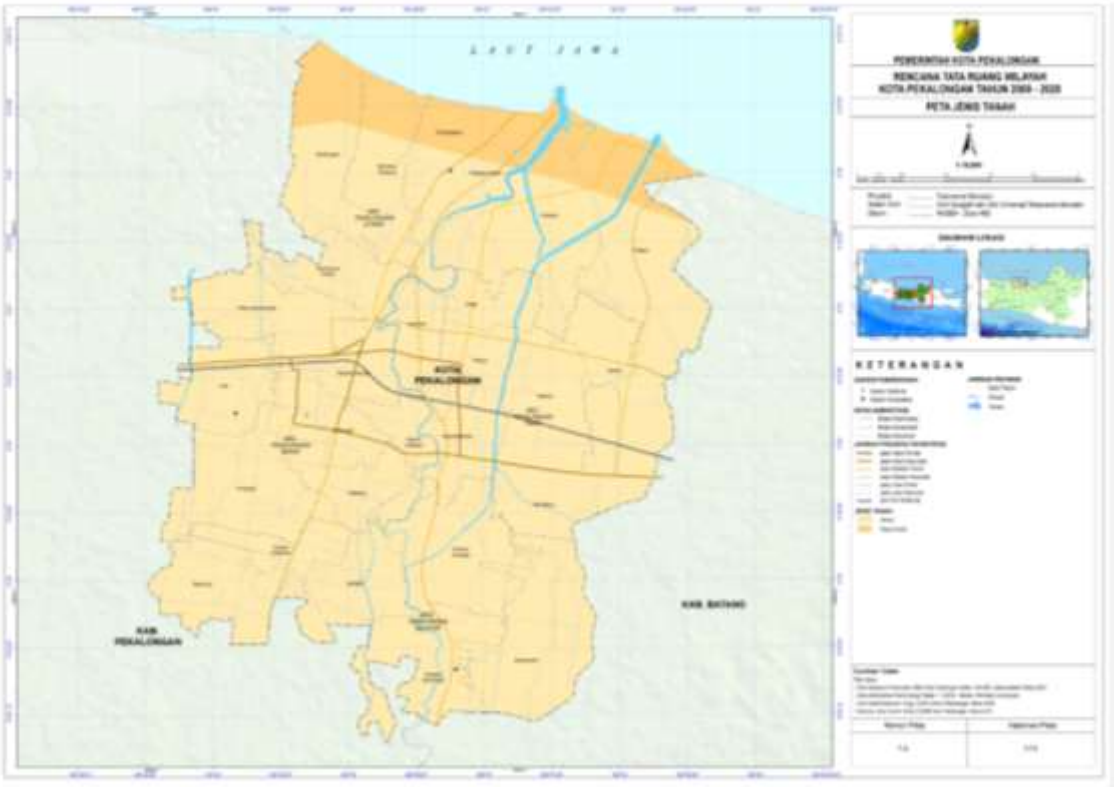

Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak

digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

2.1.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.

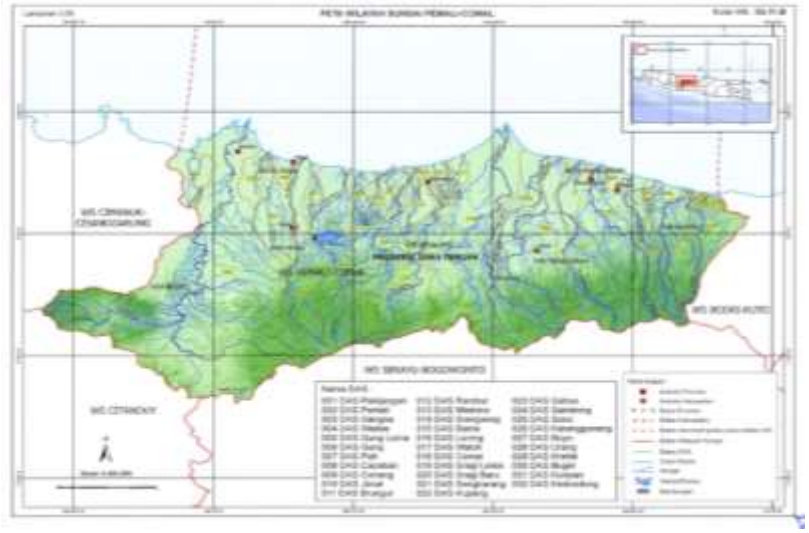

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI

kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak

mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 11 centimeter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 sedang melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2016, dengan hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan sebanyak 2.477 mm. Sementara itu selama lima tahun terakhir jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari dan curah hujan sebanyak 1.647 mm^3.

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%. Sementara itu suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018 berkisar antara 26,60^oC – 29,1^oC, dengan kelembaban udara berkisar antara 76,1%-89,3%.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	18	749
2	Februari	17	313
3	Maret	11	251
4	April	10	163
5	Mei	9	97
6	Juni	2	16
7	Juli	4	82

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	3	69
11	Nopember	2	36
12	Desember	4	55
TOTAL		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710
Tahun 2017		104	1.647
Tahun 2016		140	2.477
Tahun 2015		100	2.139

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2020, 2020

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. 2019, luas tanah sawah adalah 925 Ha, hal ini berkurang sekitar 4,54% dari luas 969 Ha pada tahun 2018. Sedangkan untuk tanah kering meningkat menjadi 3.600 Ha, ada penambahan sekitar 1,24% dari luas 3.556 Ha pada tahun 2018.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81	924	1.005
2	Pekalongan Timur	310	642	952
3	Pekalongan Selatan	419	661	1.080
4	Pekalongan Utara	115	1.373	1.488
TOTAL		925	3.600	4.525
Tahun 2018		969	3.556	4.525
Tahun 2017		980	3.545	4.525
Tahun 2016		1.152	3.373	4.525
Tahun 2015		1.162	3.363	4.525

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2020, 2020

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2019 adalah seluas 925 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 310 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2015 seluas 1.162 Ha, tahun 2016 seluas 1.152 Ha dan tahun 2017 seluas 980 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2018 dan 2019 seluas 969 Ha dan 925 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk

kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.

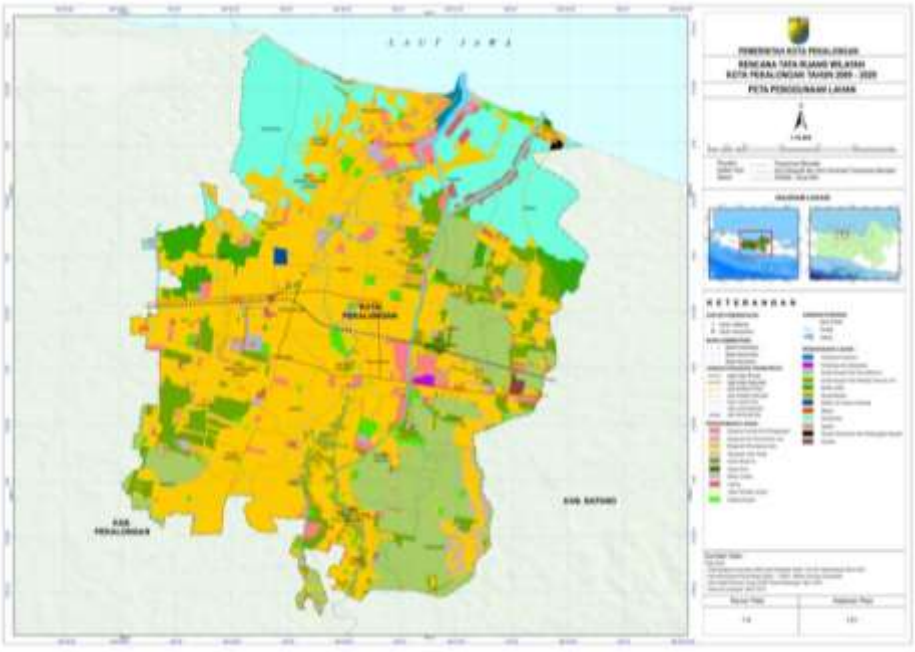

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Palayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan

terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41%% yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.

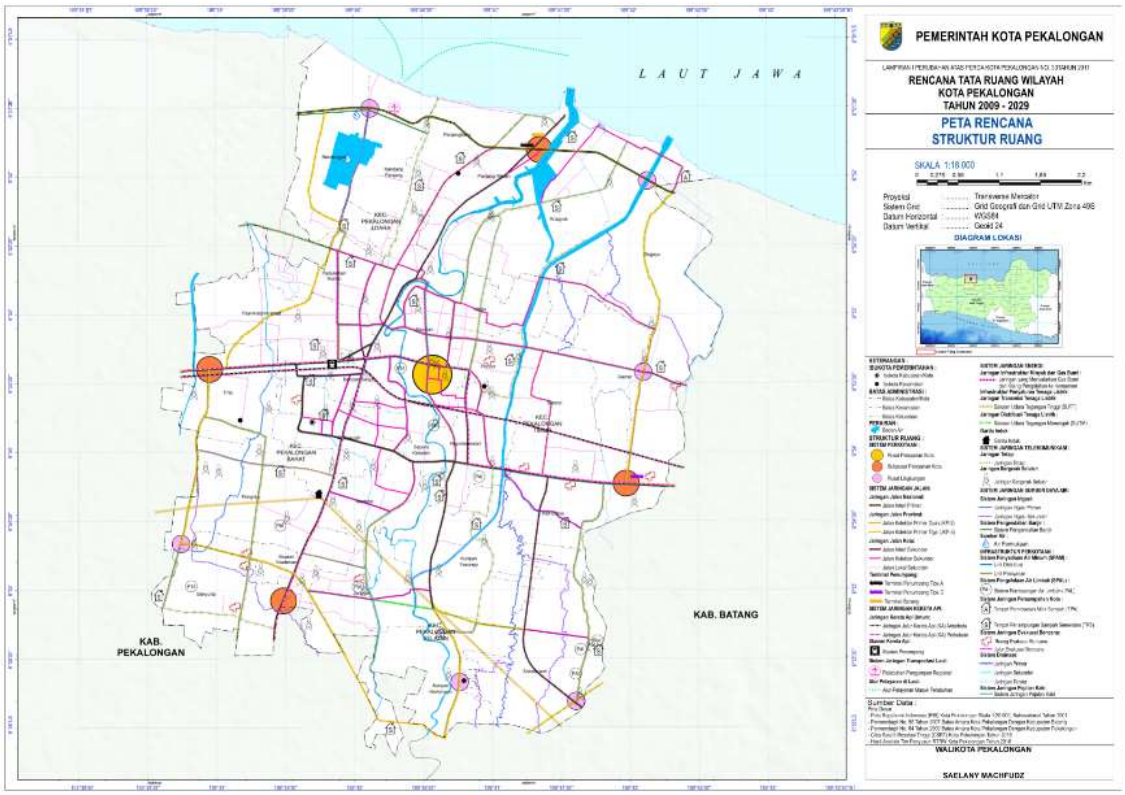

Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2020

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.

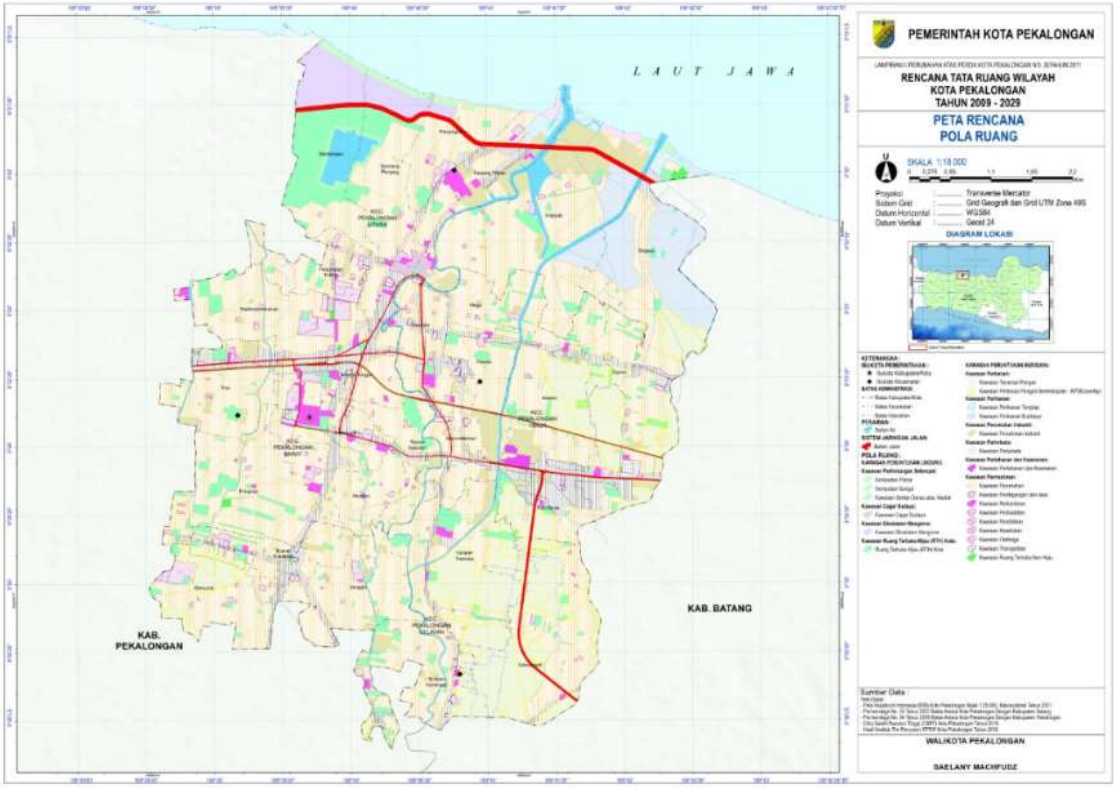

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 23 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 % dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

a. pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
b. kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan seluas kurang lebih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebh 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar.
c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.
d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) hektar.
f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.

g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
i. Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
~~j.~~ Kawasan sektor informal.

4) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar berada di

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
   1. Kelurahan Banyurip;
   2. Kelurahan Buaran Kradenan;
   3. Kelurahan Jenggot;
   4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
   5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
   1. Kelurahan Bandengan;
   2. Kelurahan Krapyak;
   3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
   4. Kelurahan Panjang Wetan;
   5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
   6. Kelurahan Panjangbaru.
c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
   1. Kelurahan Gamer;
   2. Kelurahan Kali Baros;
   3. Kelurahan Klego;
   4. Kelurahan Noyontaansari;
   5. Kelurahan Poncol; dan
   6. Kelurahan Setono.
d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
   1. Kelurahan Bendan Kergon;
   2. Kelurahan Medono;
   3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
   4. Kelurahan Pringrejo;
   5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
   6. Kelurahan Tirto.

5) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat

6) Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

2.1.1.8. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.097 jiwa, terdiri dari 153.778 jiwa laki-laki dan 153.319 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 99,94 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,95 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2015	148.295	148.238	296.533
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sekitar 2.641 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,86%.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2015	0,96
2016	0,95
2017	0,94
2018	0,96
2019	0,86

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Tabel 2.5 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2015-2019. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,86%. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,86%.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk
Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
2015	6.553,22
2016	6.612,64
2017	6.671,16
2018	6.729,00
2019	6.786,67

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2019, pendidikan SD ke bawah sebanyak 56.934 jiwa (35,89%), diikuti SMP sebanyak 35.203 jiwa (22,19%) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 66.498 jiwa (41,92%) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2019 berjumlah 158.635 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2015, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 56.934 jiwa (35,89%) dan tingkat SLTP 35.203 jiwa (22,19) serta tingkat pendidikan SM (sekolah menengah) ke atas yaitu 66.498 jiwa (41,92%). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	≤SD		SLTP		≥SM		Jumlah
	orang	%	orang	%	orang	%	
2015	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	143.376
2016	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	143.376
2017	61.346	41,03%	30.055	20,11%	58.086	38,86%	149.487
2018	61.358	40,47%	31.072	20,50%	59.167	39,03%	151.597
2019	56.934	35,89%	35.203	22,19%	66.498	41,92%	158.635

Sumber : diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat *trend*nya selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61% dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 66.498 jiwa atau setara 41,92%. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2019 paling banyak berada pada rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 30.157 jiwa, diikuti rentang usia 15-19 tahun sebanyak 27.822 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 27.336 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.616	11.755	24.371
5-9	13.005	12.322	25.327
10-14	12.842	12.240	25.082
15-19	14.098	13.724	27.822
20-24	16.113	14.044	30.157
25-29	13.849	12.418	26.267
30-34	11.613	11.484	23.097
35-39	10.439	11.095	21.534
40-44	10.238	10.968	21.206
45-49	9.776	10.346	20.122
50-54	9.075	9.740	18.815
55-59	7.767	8.194	15.961
60-64	5.220	5.509	10.729
65+	6.867	9.740	16.607
Jumlah	153.518	153.579	307.097

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Dan disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.

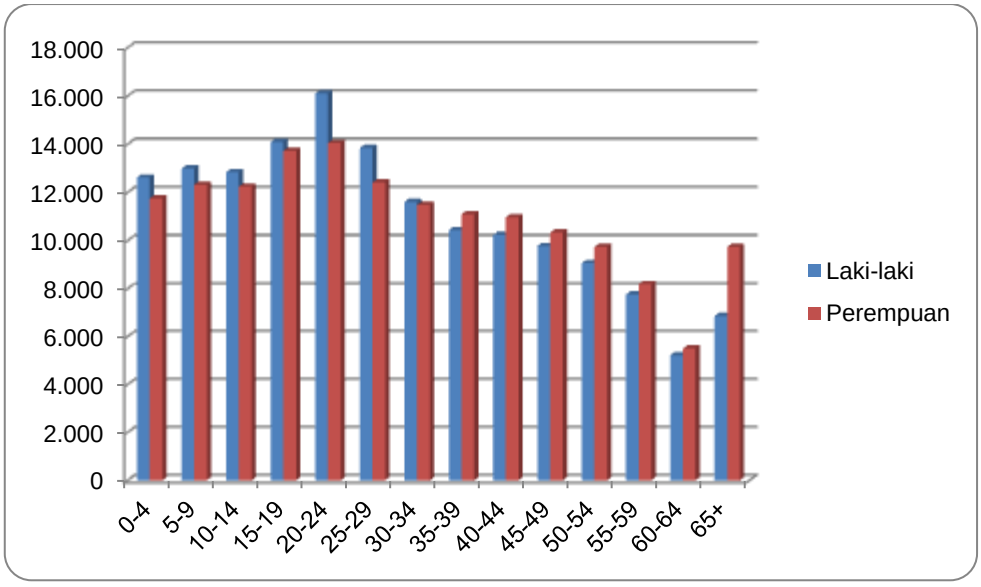

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2015-2019.

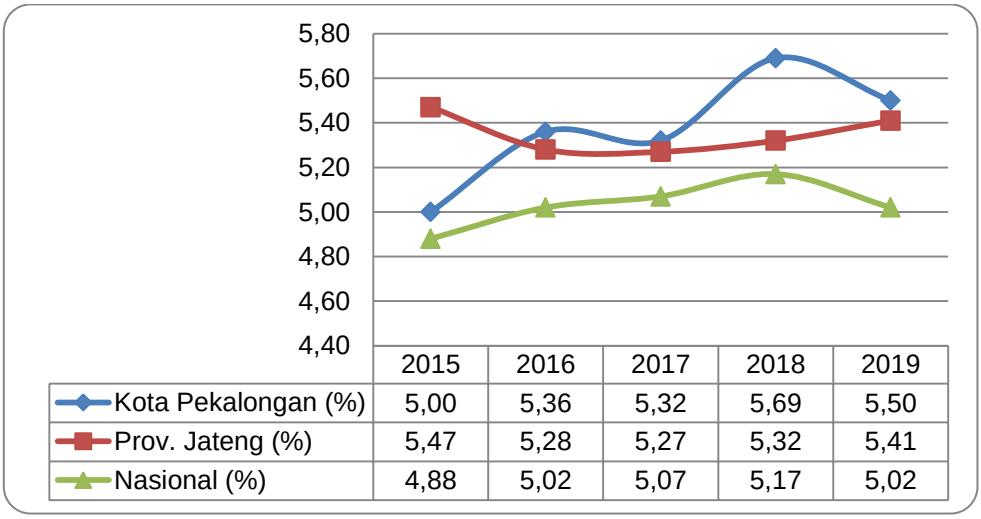

	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pekalongan (%)	5,00	5,36	5,32	5,69	5,50
Prov. Jateng (%)	5,47	5,28	5,27	5,32	5,41
Nasional (%)	4,88	5,02	5,07	5,17	5,02

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00% hingga 5,69%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, hanya pada tahun 2015 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota Pekalongan selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan eknomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,69%, dan posisi terendah pada tahun 2015 sebesar 5,00%.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih dibawah Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Namun tahun 2017 berada dibawah ketiga Daerah setara tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang namun masih dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

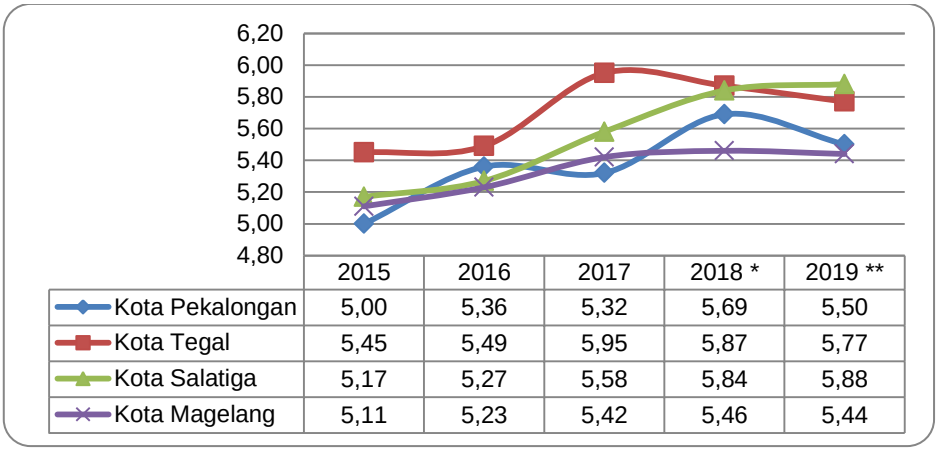

	2015	2016	2017	2018 *	2019 **
Kota Pekalongan	5,00	5,36	5,32	5,69	5,50
Kota Tegal	5,45	5,49	5,95	5,87	5,77
Kota Salatiga	5,17	5,27	5,58	5,84	5,88
Kota Magelang	5,11	5,23	5,42	5,46	5,44

Gambar 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2015 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

2.2.1.1. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2019 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 21,79% dan ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni 21,76%, kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,88% dan ini turun dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 20,94% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,63% dan ini naik dibandingkan tahun 2018 yakni 14,60%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,32	5,26	4,72	4,67	4,66
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,56	21,43	21,13	20,94	20,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	14,33	14,36	14,39	14,60	14,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,87	21,72	21,78	21,76	21,79
H	Transportasi dan Pergudangan	6,23	6,05	6,32	6,28	6,40
I	Penyediaan Akomodasi	5,28	5,42	5,39	5,42	5,44

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	3,88	4,15	4,21	4,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	6,14	6,26	6,27	6,13
L	Real Estat	2,66	2,68	2,68	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,75	4,72	2,58	4,47
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,58	4,67	4,75	4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,25	1,25	1,26	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,82	1,84	1,87	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*Angka sementara
**Angka sangat sementara
***Angka sangat sangat sementara

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2019, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,66%. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi meskipun cenderung semakin lemah. Tahun 2015, peranan kategori ini sebesar 5,32%, kemudian menguat tahun 2016 sebesar 5,26%, dan semakin menurun tahun 2017 sebesar 4,74%, tahun 2018 sebesar 4,67% dan 4,66% di tahun 2019.

INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,88% pada tahun 2019.

Peran kategori ini mengalami pelemahan dibandingkan perannya selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 sebesar 21,56% persen hingga pada tahun 2019 makin kuat menjadi 20,88 persen.

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16% terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2019, sama seperti tahun 2018 yaitu 0,16%. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2016 hingga tahun 2019 peran kategori ini sebesar 0,16%. Hanya pada tahun 2015, perannya menurun sebesar 0,15%.

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2015-2018 yaitu sebesar 0,11% dan menurun 0,10% pada tahun 2019.

KONSTRUKSI

Pada tahun 2019 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,63% terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2015 sebesar 14,33%, tahun 2016 sebesar 14,36%, tahun 2017 sebesar 14,39%, tahun 2018 sebesar 14,60% dan tahun 2019 sebesar 14,63%. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarannya adalah 5,89% pada tahun 2015 pertumbuhannnya 5,64%. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2016 besarnya 4,52%, 5,51% pada tahun 2017, 5,59% pada tahun 2018 dan 4,71% pada tahun 2019.

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20%. Pada tahun 2019, peranan kategori ini sebesar 21,79% lebih kecil dibandingkan peranan di tahun 2015 yang sudah mencapai 21,87% terhadap PDRB Kota Pekalongan.

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 6,40% di tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari 2015 – 2019 peran kategori ini berfluktuatif. Tahun 2015 sebesar 6,23%, tahun 2016 turun menjadi 6,05%, tahun 2017 naik menjadi 6,32%. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 6,28%, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,40%.

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Pada tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,44%. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan tahun 2019 merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sebesar 5,28%, tahun 2016 sebesar 5,42%, tahun 2017 sebesar 5,39% dan tahun 2018 sebesar 5,42%.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 3,88%, tahun 2017 sebesar 4,15%, tahun 2018 sebesar 4,21%, dan tahun 2019 sebesar 4,36%. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2015 sebesar 8,58%, tahun 2016 sebesar 8,47%, tahun 2017 sebesar 11,94%, tahun 2018 sebesar 10,43%, dan tahun 2019 sebesar 10,57%.

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2019, perannya sebesar 6,13% terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, selama empat tahun terakhir peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2015 sebesar 5,95%, tahun 2016 sebesar 6,14%, tahun 2017 sebesar 6,26%, dan tahun 2018 sebesar 6,27%.

REAL ESTATE

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,6%. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2015-2019 sebesar 2,66%, 2,68%, 2,68%, 2,71% dan 2,71%. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 5%. Laju pertumbuhan dari tahun 2015-2019 adalah tahun 2015 sebesar 7,47%, pada tahun 2016 sebesar 6,54%, pada tahun 2017 5,84%, dan 5,97% di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,62%.

JASA PERUSAHAAN

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,39% pada tahun 2015, tahun 2016 menjadi sebesar 0,40%, tahun 2017 sebesar 0,41%, tahun 2018 sebesar 0,42% dan tahun 2019 naik menjadi 0,44%. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Laju pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 8,94%, tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,28%, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,85%, ditahun 2018 tumbuh sebesar 7,95 dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 8,31%.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-2019 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2015 sebesar 4,75%, tahun 2016 sebesar 4,75%, tahun 2017 sebesar 4,72%, tahun 2018 sebesar 2,58% dan tahun 2019 sebesar 4,47%. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari sebesar 5,08% di tahun 2015 menjadi 2,58% di tahun 2016. Pertumbuhan pada 2017 sebesar 4,11%, 3,99% di tahun 2018 dan 3,82% di tahun 2019.

JASA PENDIDIKAN

Pada tahun 2019, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,65% dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2018 yang peranannya sebesar 4,75%. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2015-2018 yaitu tahun 2015 sebesar 4,52%, tahun 2016 sebesar 4,58%, tahun 2017 sebesar 4,67%, dan di tahun 2018 sebesar 4,75%. Berdasarkan

penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada periode tahun 2015 – 2018, masing-masing yaitu 4,78% di tahun 2015, tahun 2016 tumbuh sebesar 7,49%, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,43%, tahun 2018 tumbuh sebesar 7,59% dan pertumbuhannya melambat di tahun 2019 sebesar 2,63%.

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun tahun 2015 sebesar 1,22%, tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 1,25%, tahun 2018 sebesar 1,26%, dan tahun 2019 sebesar 1,29%. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65% melambat di tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar masing-masing 7,74%, 7,93% dan 7,84%.

JASA LAINNYA

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2015 sebesar 1,77%, tahun 2016 sebesar 1,82%, tahun 2017 sebesar 1,84%, tahun 2018 sebesar 1,87%, dan tahun 2019 sebesar 1,90%. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama tahun 2015-2019, yaitu tahun 2015 sebesar 3,20%, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 7,23%, tahun 2017 naik menjadi 8,09%, tahun 2018 pertumbuhannya kembali naik menjadi 9,02% dan tahun 2019 turun menjadi 8,47%.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5% pada tahun 2015 dan 5,50% pada tahun 2019. Pada tahun 2015, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 8,94%, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,58%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,78%. Pada tahun 2019, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 10,57%, Jasa Lainnya 8,47% dan Jasa Perusahaan sebesar 8,31%. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *Smart City*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,98	-4,80	3,03	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,99	4,16	4,35	4,46	4,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,71	5,69	4,93	5,29	3,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	2,16	5,86	5,16	4,21
F	Konstruksi	5,64	4,52	5,51	5,59	4,71

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	4,86	5,71	5,53	5,47
H	Transportasi dan Pergudangan	5,45	5,16	5,84	7,07	7,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	7,94	5,92	5,88	6,76
J	Informasi dan Komunikasi	8,58	8,47	11,94	10,43	10,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	9,03	7,35	5,12	3,76
L	Real Estat	7,47	6,54	5,84	5,97	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	8,94	10,28	7,85	7,95	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	2,58	3,75	3,99	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,78	7,49	6,82	7,59	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	9,65	7,74	7,93	7,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	7,23	8,09	9,02	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	5,36	5,32	5,69	5,50

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*Angka sementara
**Angka sangat sementara
***Angka sangat sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2015-2019 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

2.1.2.2. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2015 – November 2019, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36% sampai 3,71%. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2015 dan 2016 sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah tetapi masih dibawah Nasional.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut.

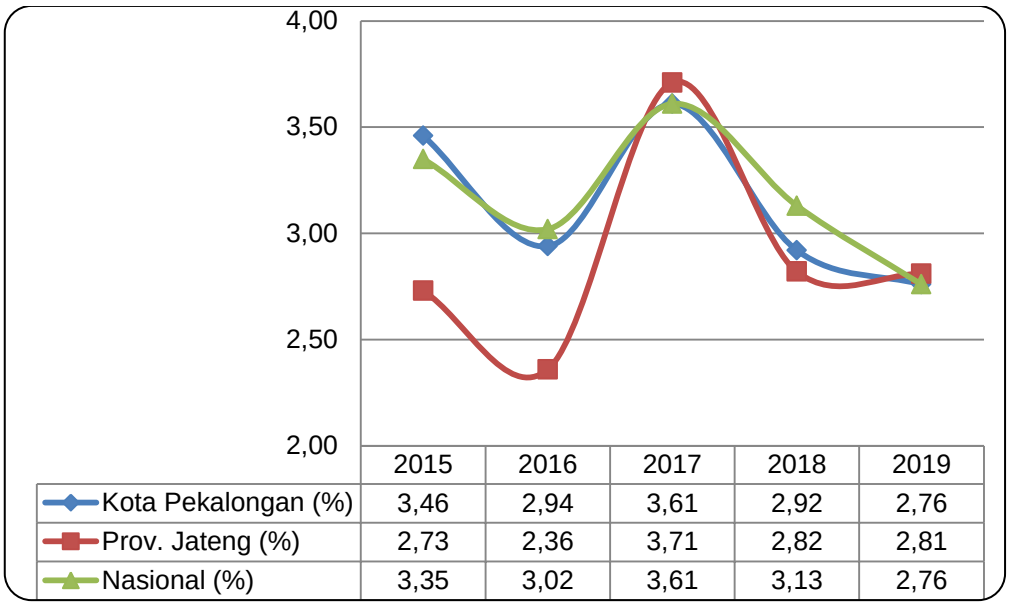

Gambar 2.12 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%)

Sumber : www.bps.go.id, 2020

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Umum	3,46	2,94	3,61	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,62	6,03	4,63	3,66	8,00
Makanan Jadi	5,73	5,85	2,46	3,05	1,60
Perumahan	2,79	0,88	4,02	3,47	0,40
Sandang	5,39	5,01	5,40	2,51	3,31
Kesehatan	3,70	1,99	1,15	0,54	4,75
Pendidikan	6,16	2,84	3,26	1,33	3,74
Transport	-1,66	-3,07	3,96	2,43	0,31

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

2.1.2.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,23 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019

mencapai 35,41 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 35,41 juta meningkat sebesar 6,86% dibanding PDRB per kapita tahun 2018 sebesar Rp. 33,14 juta.

Tabel 2.12 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	7.778,27	8.507,54	9.287,96	10.114,28	10.873,98
- ADHK (Miliar Rp)	6.043,10	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	26,23	28,43	30,72	33,14	35,41
- ADHK (Juta Rp)	20,38	21,28	22,22	23,28	24,35
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (%)	8,62	8,39	8,06	7,86	6,86
- ADHK (%)	4,03	4,42	4,40	4,79	4,60

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Keterangan :
Angka sementara
**Angka sangat sementara
***Angka sangat sangat sementara

2.1.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2013 sebesar 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,91% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,48% sehingga menaikkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Mulai tahun 2015 BPS melakukan penghitungan indeks gini sampai tingkat Provinsi, namun untuk Kabupaten/Kota tidak dilakukan penghitungan.

2.1.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.5.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan pada Maret 2019, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.425.026/kapita/bulan. Angka ini sedikit di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.425.250.Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.369.385,00.

Tabel 2.13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GKProvinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2015	352.717	224.437	317.796	371.528	337.511	297.851	330.776
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2019 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.369.385 dan garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar Rp.425.026.

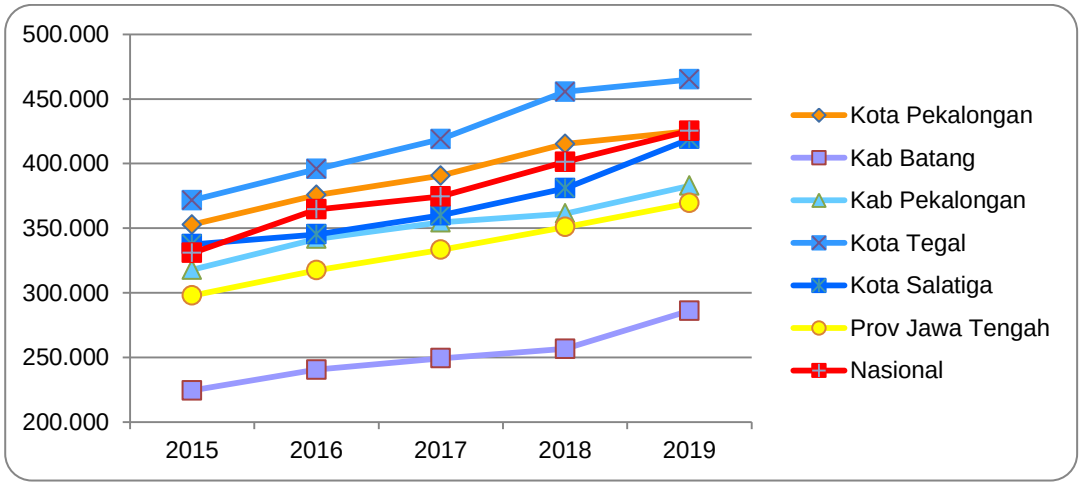

Gambar 2.13 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

2.1.2.5.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai,

beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

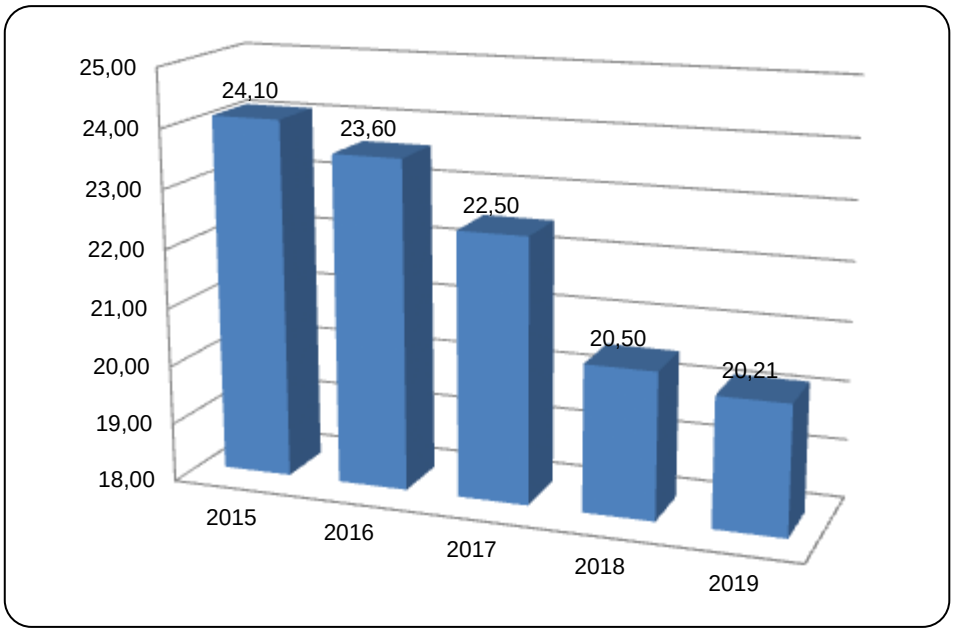

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 (000 jiwa)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, hanya pada tahun 2015 sempat mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 24,1 ribu jiwa. Namun jika dibandingkan dengan Daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2019 lebih tinggi dari Kota Salatiga dan lebih rendah dari Kota Tegal dan Kota Magelang, serta lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menekan angka kemiskinan.

Selama kurun waktu 2015 hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 angka ini terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan 8,09 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 13,27 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,17 persen sehingga menjadi 7,92 persen.

Tahun 2017 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 13,01 persen, sedangkan Kota Pekalongan mencapai 7,47 persen. Kemudian pada tahun 2018 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan Kota Pekalongan menduduki angka 6,75 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa

Tengah turun lagi menjadi 10,80 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,15 persen sehingga menjadi 6,60 persen.

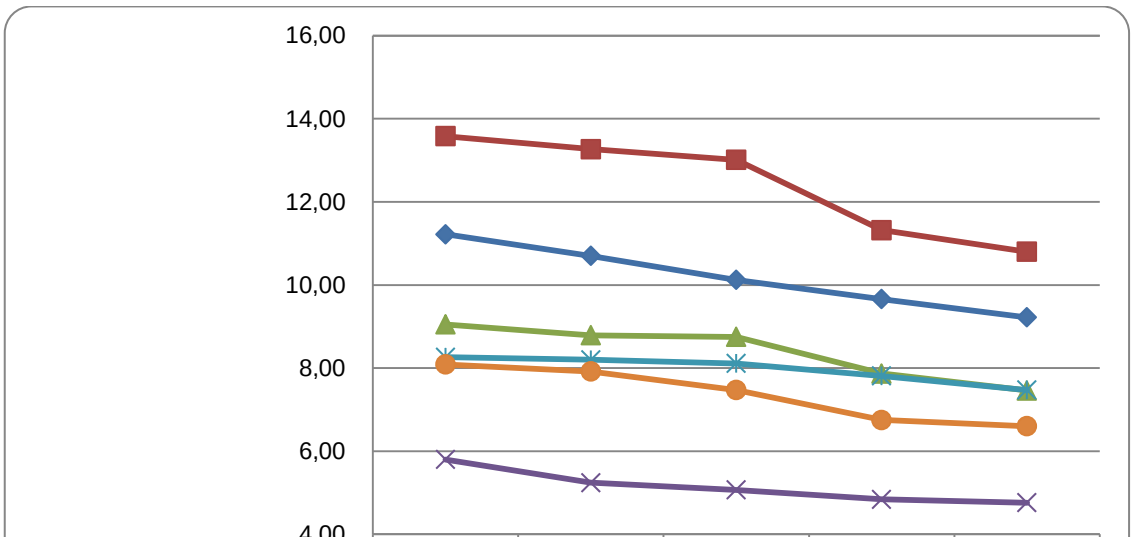

	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional (%)	11,22	10,70	10,12	9,66	9,22
Prov. Jawa Tengah (%)	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80
Kota Magelang (%)	9,05	8,79	8,75	7,87	7,46
Kota Salatiga (%)	5,80	5,24	5,07	4,84	4,76
Kota Tegal (%)	8,26	8,20	8,11	7,81	7,47
Kota Pekalongan (%)	8,09	7,92	7,47	6,75	6,60

Gambar 2.15 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2020

Dengan demikian disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan meski belum signifikan.

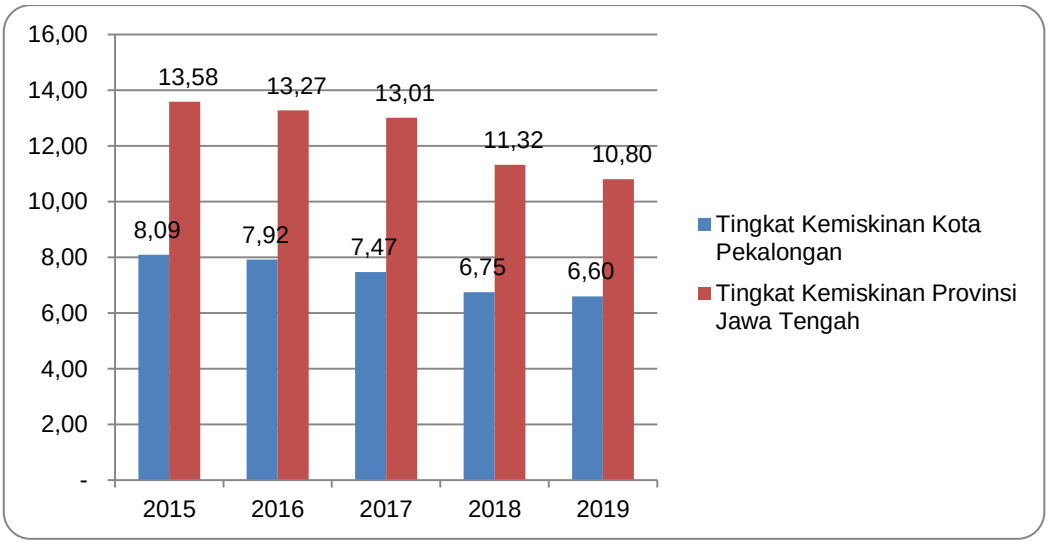

Gambar 2.16 Perbandiangan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2020

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada rata-rata provinsi, di mana tingkat kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan jauh di bawahnya, yaitu 6,75 persen. Jika diurutkan, maka tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada urutan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.5.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,83. Selanjutnya turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,8. Namun pada tahun 2017 indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,12 yaitu menjadi 0,92. Dan pada tahun 2018 mencapai 1,01 serta mengalami penurunan kembali menjadi 0,92 di tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

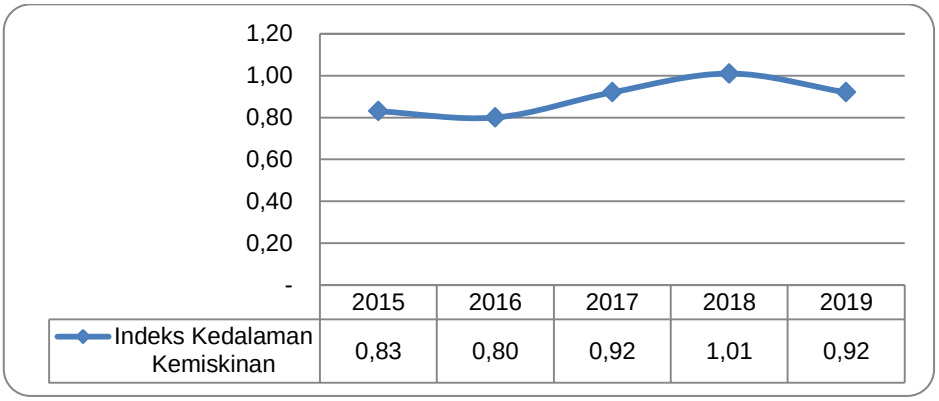

Gambar 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung stagnan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

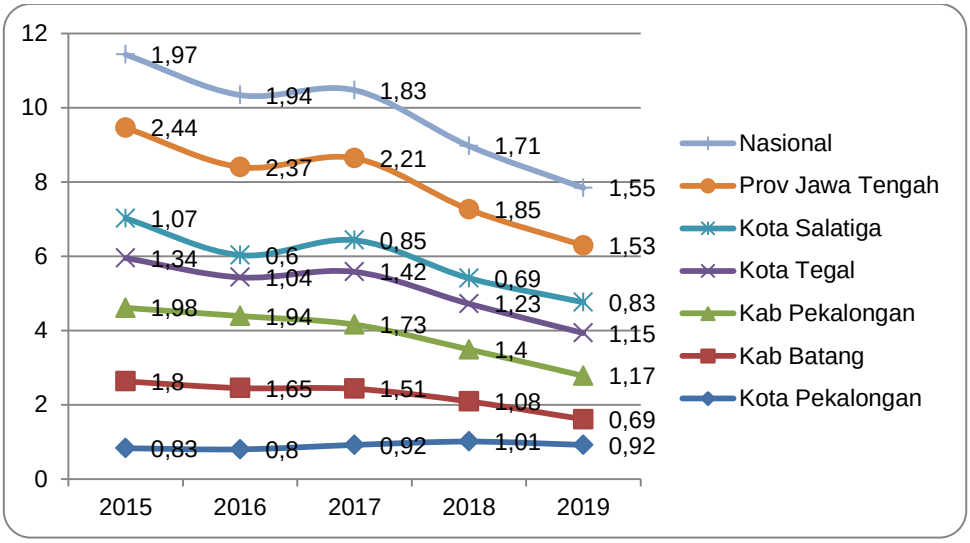

Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

2.1.2.5.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 0,15. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016 indeks ini mengalami penurunan lagi menjadi 0,13, yang berarti kondisi membaik. Kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2017 menjadi 0,2 dan di tahun 2018 naik kembali mencapai 0,22. Namun indeks P2 ini menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,18 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2019 semakin berkurang dibanding tahun 2018.

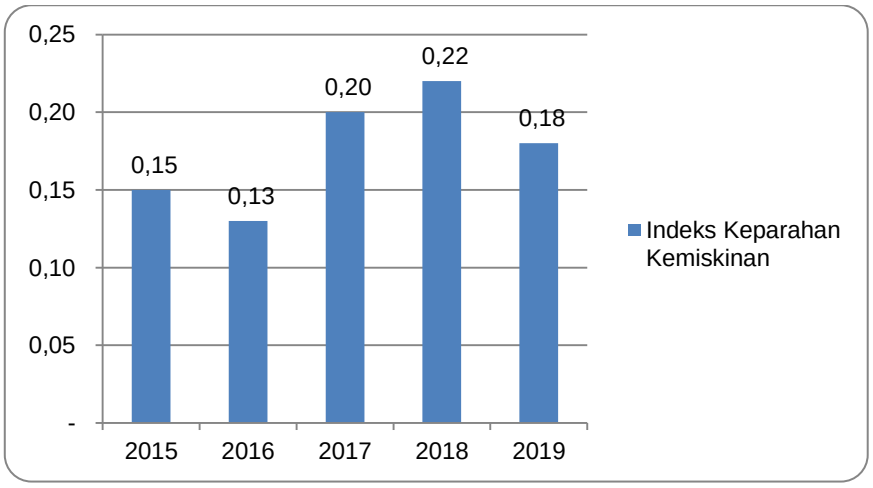

Gambar 2.19 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus, Indeks Keparahan Kemiskinan di

Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

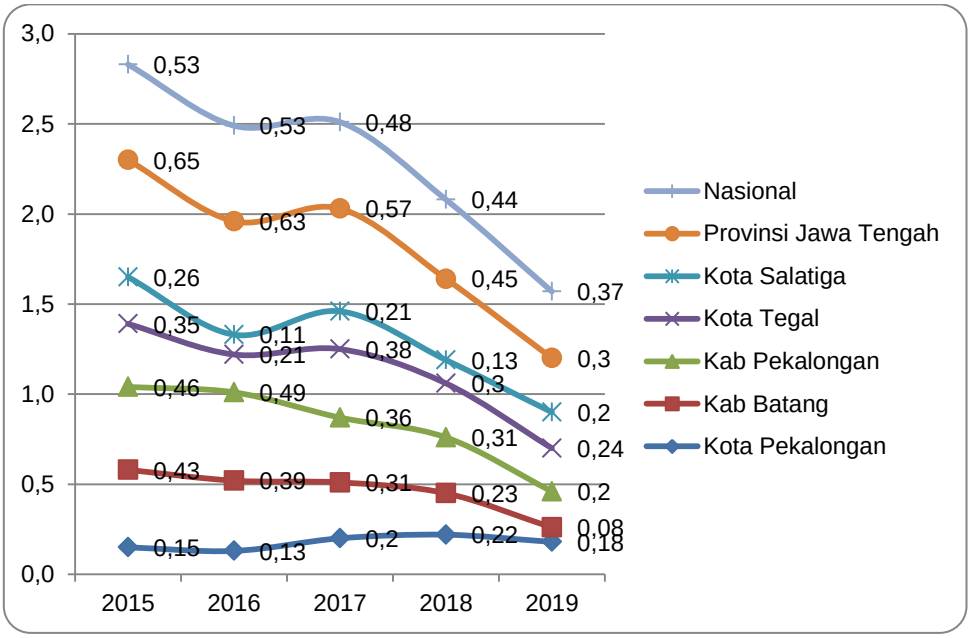

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

Pasca pandemi COVID-19, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

2.1.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2019 tercatat sekitar 230.027 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja meningkat dari 70,21% menjadi 72,32% atau naik 2,11 poin pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) meningkat. Sisanya, yaitu 27,68%

adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Peningkatan TPAK pada tahun 2019 seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

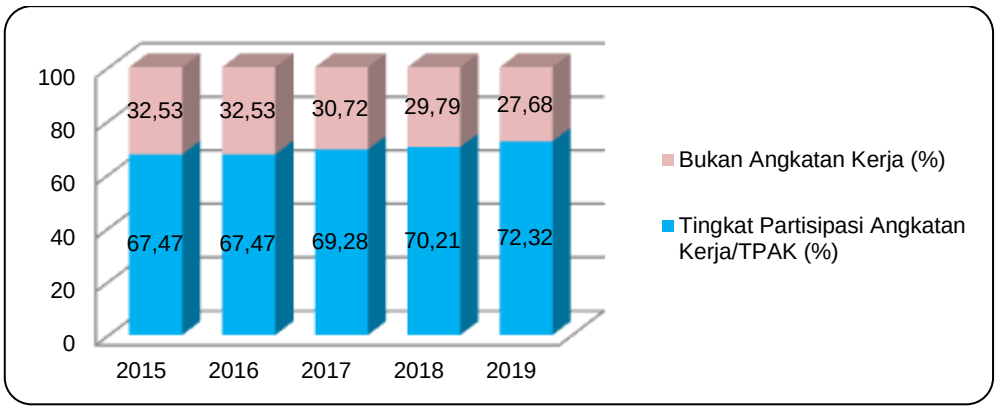

Gambar 2.21 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

*Keterangan : Tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,23%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,77% atau menurun 0,36 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 6 orang yang benar-benar menganggur.

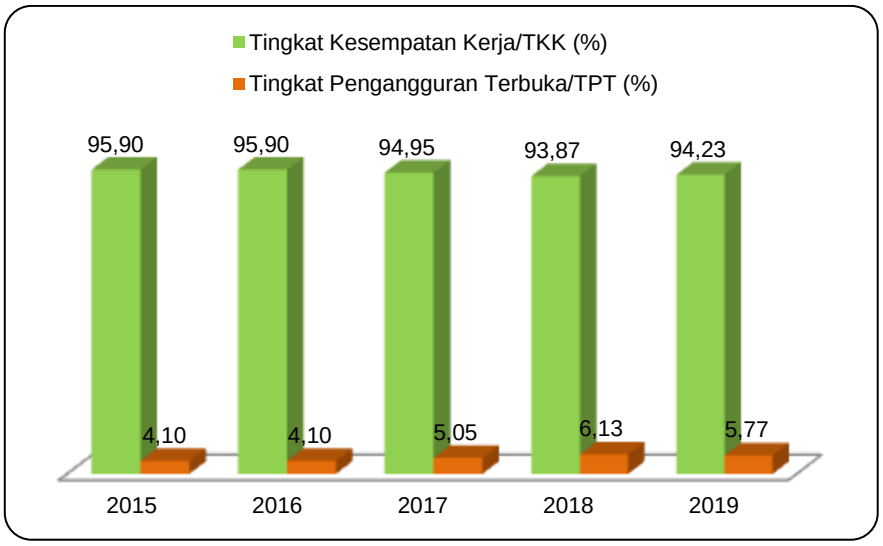

Gambar 2.22 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan.

2.1.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2015 berada di angka 3,07 dan terus merangkak naik di angka 3,34 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menurun tajam di angka 1,03 dan kembali melonjak hingga di tahun 2019 menjadi 3,78. Sepanjang lima tahun terakhir, rata-rata kasus tertinggi ada pencurian.

Tabel 2.14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Angka Kriminalitas
2015	3,07
2016	3,34
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar 72,69 menjadi 74,77 di tahun 2019. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2015 sampai 2019, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.

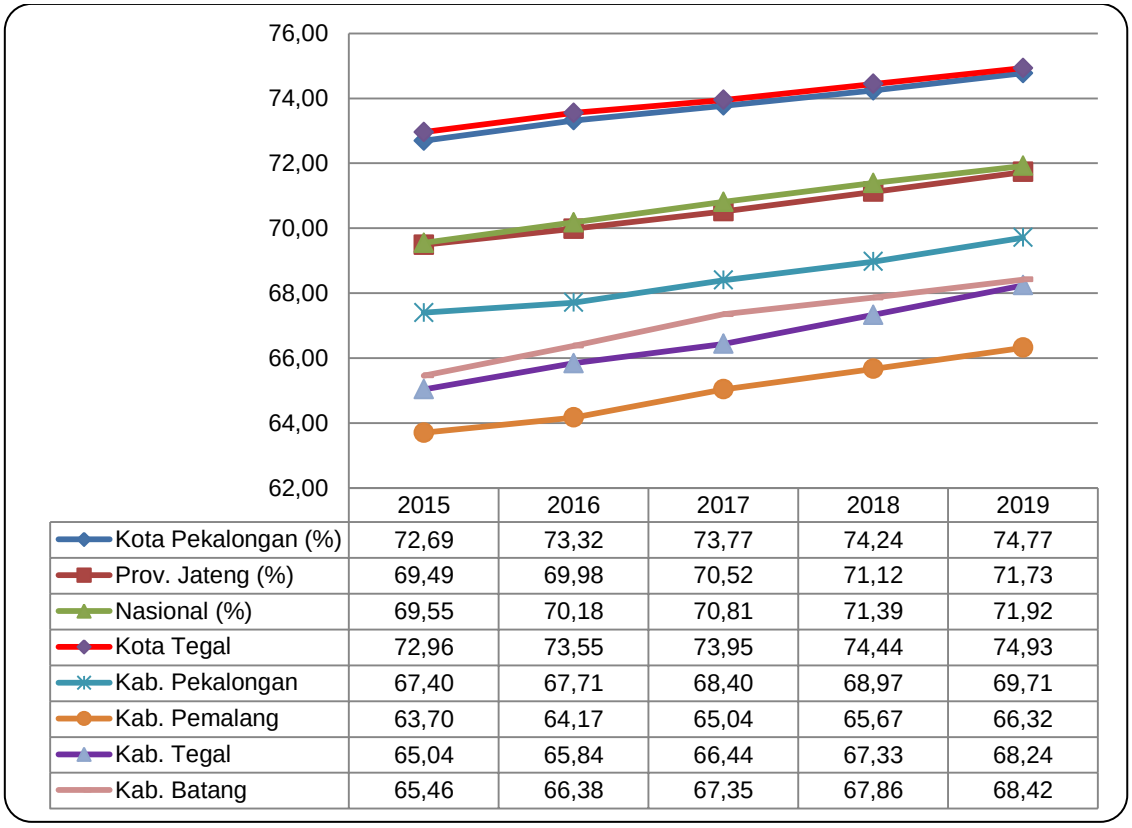

	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pekalongan (%)	72,69	73,32	73,77	74,24	74,77
Prov. Jateng (%)	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
Nasional (%)	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92
Kota Tegal	72,96	73,55	73,95	74,44	74,93
Kab. Pekalongan	67,40	67,71	68,40	68,97	69,71
Kab. Pemalang	63,70	64,17	65,04	65,67	66,32
Kab. Tegal	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
Kab. Batang	65,46	66,38	67,35	67,86	68,42

Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019 (%)

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari tabel 2.14.

Tabel 2.15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2015	8,28	12,59	74,11	11.253,00	72,69
2016	8,29	12,77	74,15	11.721,00	73,32
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

2.1.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada

tahun 2015 rata-rata lama sekolah hanya 8,28 tahun, pada tahun berikutnya, 2016 menjadi 8,29 tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah menjadi 8,56 tahun, di tahun 2018 sebesar 8,57 tahun dan tahun 2019 menjadi 8,71 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2019 berada pada angka 7,53.

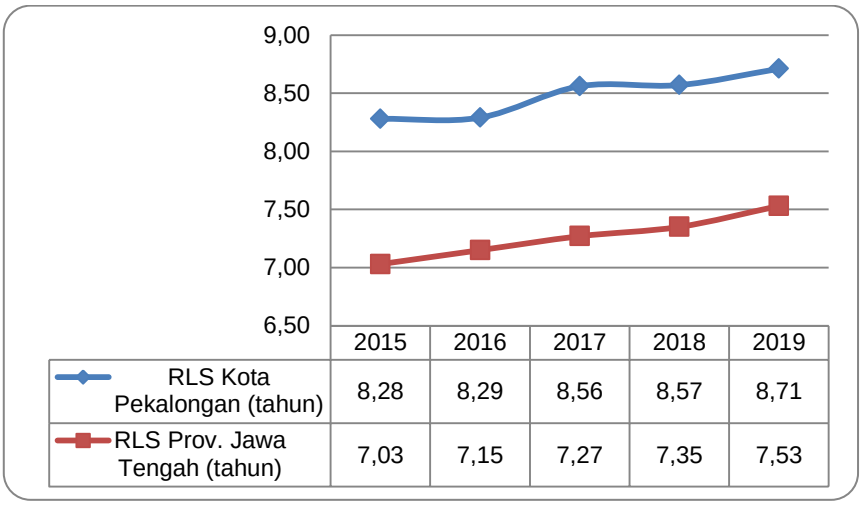

	2015	2016	2017	2018	2019
RLS Kota Pekalongan (tahun)	8,28	8,29	8,56	8,57	8,71
RLS Prov. Jawa Tengah (tahun)	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53

Gambar 2.24 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

2.1.2.10. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

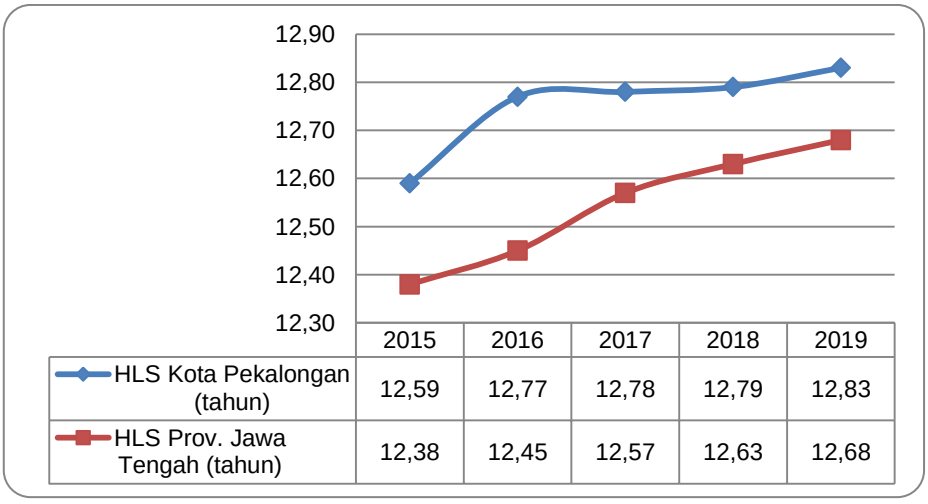

	2015	2016	2017	2018	2019
HLS Kota Pekalongan (tahun)	12,59	12,77	12,78	12,79	12,83
HLS Prov. Jawa Tengah (tahun)	12,38	12,45	12,57	12,63	12,68

Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

Pada tahun 2019 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 1.283 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.1.2.11. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2015 - 2019, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,11 pada tahun 2015 menjadi 74.28 di tahun 2019, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

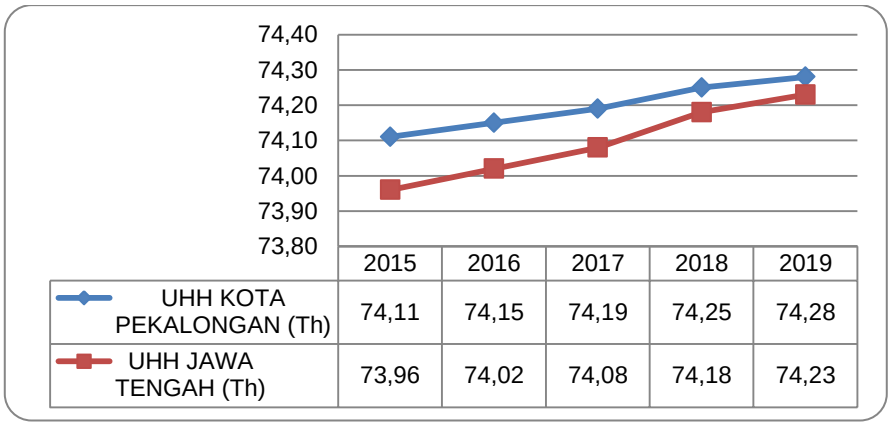

	2015	2016	2017	2018	2019
UHH KOTA PEKALONGAN (Th)	74,11	74,15	74,19	74,25	74,28
UHH JAWA TENGAH (Th)	73,96	74,02	74,08	74,18	74,23

Gambar 2.26 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

www.jateng.bps.go.id, 2020

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.26. Dari tahun 2015 - 2019, UHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.12. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2015-2019. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.253.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.721.000 pada tahun 2016. Di tahun 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000.

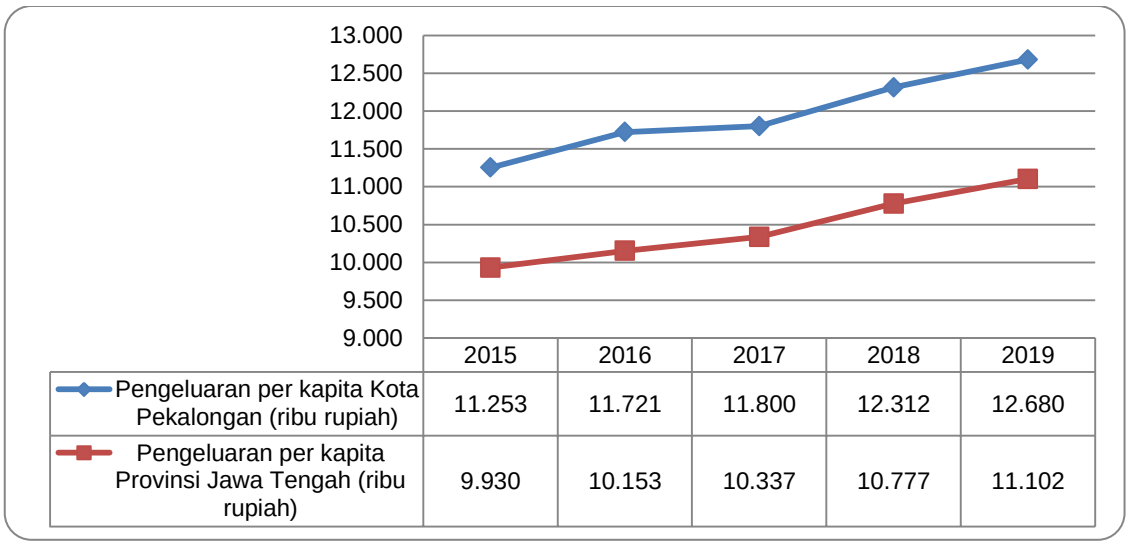

	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran per kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	11.253	11.721	11.800	12.312	12.680
Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah)	9.930	10.153	10.337	10.777	11.102

Gambar 2.27 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.1.2.13. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Pada jenjang SD/MI, APK Kota Pekalongan mengalami peningkatan namun di akhir periode (tahun 2018) mengalami penurunan.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTs/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2015	101,08	104,25	102,57	99,22	83,79	74,47
2016	110,93	104,62	102,67	99,30	85,01	78,04
2017	110,57	104,39	104,21	99,84	91,70	83,00
2018	106,97	101,28	104,67	99,09	91,35	84,08
2019	98,32	99,61	106,27	99,25	96,29	88,14

Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id, 2020

Pada tahun 2015, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 101,08%, tahun 2016-2017 berada di kisaran 110%, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 106,97%. Pada akhir periode (tahun 2019) APK jenjang SD/MI/sederajat kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018, yaitu 101,25%. APK di jenjang SMP/MTs justru berkebalikan dengan APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018 dan di akhir periode (tahun 2019) mengalami kenaikan, yaitu 104,69%. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari awal periode (tahun 2015). Pada tahun 2018, APK jenjang SMA/MA/SMK berada di angka 91,35% dan di akhir periode (tahun 2019) meningkat menjadi 96,29.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100% selama periode tahun 2015-2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu 99,61%. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 99%, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 74-88%. Secara umum, APK Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi laki-laki dengan nilai 117,52. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 79,35. Pada tingkatan yang lebih tinggi yakni SMA/setara, angka partisipasi kasar laki-laki lebih dominan dari perempuan dengan nilai 98,49 dan 59,16.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan Tahun 2019

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara	117,52	106,07
	SMP/Setara	73,74	79,35
	SMA/Setara	98,49	59,16

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id, 2020

2.1.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2015-2019, persentase pada pendidikan tingkat SD/setara selalu lebih tinggi dibandingkan SMP dan SMA. Sedangkan perbandingan antara SMP dan SMA, persentase SMP/setara pada tahun 2016-2017 lebih tinggi dibandingkan tingkat SMA/setara. Namun pada akhir periode (2019) tingkat SMA/setara lebih tinggi dibandingkan SMP/setara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kota Pekalongan yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA/setara.

Selama kurun waktu ini, persentase pendidikan yang ditamatkan menurun cukup drastis pada tahun 2017, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Untuk tingkat SMA/setara terjadi penurunan sekitar 2,4%, pada tingkat SMP menurun sekitar 5,2%, dan penurunan paling drastis terjadi di tingkat pendidikan SD/setara yaitu sekitar 11,47%. Sayangnya data pada tahun 2016 dan 2018 tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisis secara utuh. Namun demikian data yang ada dapat memberikan gambaran angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Pekalongan sebagaimana tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	SD/Setara (%)	SMP/Setara (%)	SMA/Setara (%)
2015	33,38	22,09	23,85
2016	80,71	59,41	N/A
2017	71,03	60,71	21,31
2018	N/A	N/A	N/A
2019	26,47	28,67	33,33

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka tahun 2020, 2020

2.1.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 jenjang SD/MI mendekati 100% dan di akhir periode (tahun 2019) mengalami penurunan menjadi 92,63. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Demikian juga APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2019) mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTs/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2015	96,07	94,33	87,36	81,95	68,70	57,89
2016	97,97	92,16	74,72	75,20	61,80	58,63
2017	97,18	91,68	76,14	75,50	66,13	61,79
2018	97,20	90,38	76,1	74,47	67,89	63,90
2019	79,03	90,91	61,14	78,42	77,43	69,15

Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id, 2020

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2019, perbedaan antara laki-laki dan perempuan cukup signifikan, terutama untuk jenjang SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, APM berdasarkan gender paling tinggi. Pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, hal berbanding terbalik dengan jenjang SMA/setara dimana laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2019

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	99,38	99,71
	SMP/Setara	70,87	73,40
	SMA/Setara	65,51	47,65

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2020

2.1.2.16. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2017 sebesar 9,08 per 1.000 kelahiran hidup. Namun mulai tahun 2018 kembali menunjukkan peningkatan kasus menjadi 10,99 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dan 11,99 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka trend Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2015 sampai 2019 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka 987,64 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 990,92 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Namun mulai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 989,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2015	9,80	990,20
2016	12,36	987,64
2017	9,08	990,92
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01

Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2.1.2.17. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 cenderung menunjukkan trend yang meningkat. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,69 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 12,67 per 1.000 KH pada Tahun 2017. Namun mulai tahun 2018 sampai 2019 meningkat kembali dari 13,36 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi 16,04 per 1.000 KH pada tahun 2019. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 – 2019 mengalami trend yang fluktuatif. Pada tahun 2015, AKABA sebesar 11,64 per 1.000 KH, kemudian naik ditahun 2016 menjadi 11,8 per 1.000 KH dan secara konsisten sejak tahun 2017 menurun namun kembali naik menjadi 9,63 per 1.000 KH pada tahun 2019.

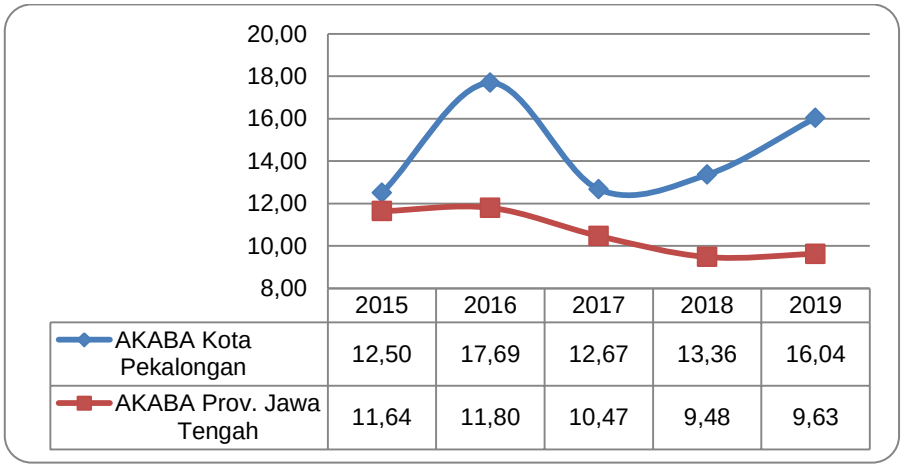

	2015	2016	2017	2018	2019
AKABA Kota Pekalongan	12,50	17,69	12,67	13,36	16,04
AKABA Prov. Jawa Tengah	11,64	11,80	10,47	9,48	9,63

Gambar 2.28 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan 2019, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2020

2.1.2.18. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.22 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2015	6	101,33
2016	8	137,36
2017	10	171,26
2018	7	118,42
2019	6	101,30

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2015 AKI sebesar 101,33 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus meningkat menjadi 171,26 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 10 kasus. Namun mulai tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 118,42 per 100.000 KH pada tahun 2018 dan kemudian menurun lagi menjadi 101,30 per 100.000 KH pada tahun 2019. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus pre eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban.

2.1.2.19. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, angka kesakitan berada di angka 11,61%. Kemudian menurun menjadi 10,59% di tahun 2016. Angka tersebut fluktuatif sampai dengan tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Angka Kesakitan (%)
2015	11,61
2016	10,59
2017	13,33
2018	13,07
2019	16,68

Sumber : jateng.bps.go.id, 2020

2.1.2.20. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan 2019 sebesar 0,05%.

Tabel 2.24 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2015	29	21.972	0,13
2016	37	23.468	0,16
2017	31	22.933	0,14
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada peningkatan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2016 sebanyak 37 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan menjadi 12 kasus.

2.1.2.21. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

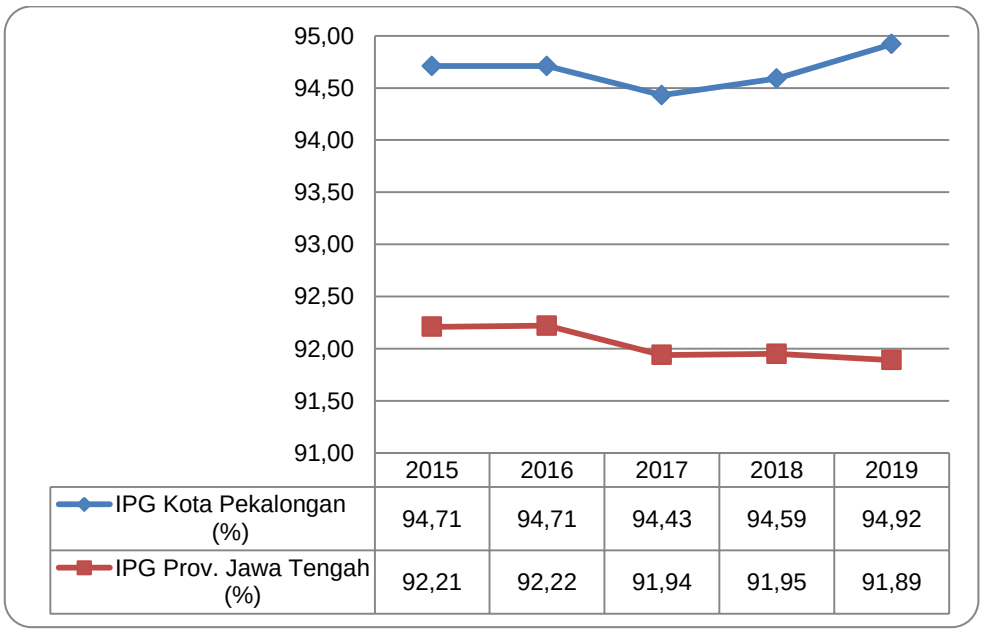

	2015	2016	2017	2018	2019
IPG Kota Pekalongan (%)	94,71	94,71	94,43	94,59	94,92
IPG Prov. Jawa Tengah (%)	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89

Gambar 2.29 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Sumber : www.bps.go.id, 2020

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2015-2019 cenderung relatif stabil. Pada tahun 2016 data IPG Kota Pekalongan tidak dapat diperoleh dikarenakan

pada tahun tersebut BPS tidak melakukan penghitungan IPG di tingkat Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019, IPG Kota Pekalongan sebesar 94,92 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019, nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2016, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 67,44, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 65,11 dan meningkat kembali ditahun 2018 diangka 68,62. Pada tahun 2019 menurun cukup drastis di angka 60,95.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2015-2019 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Ini dapat terlihat pada Gambar 2.30. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

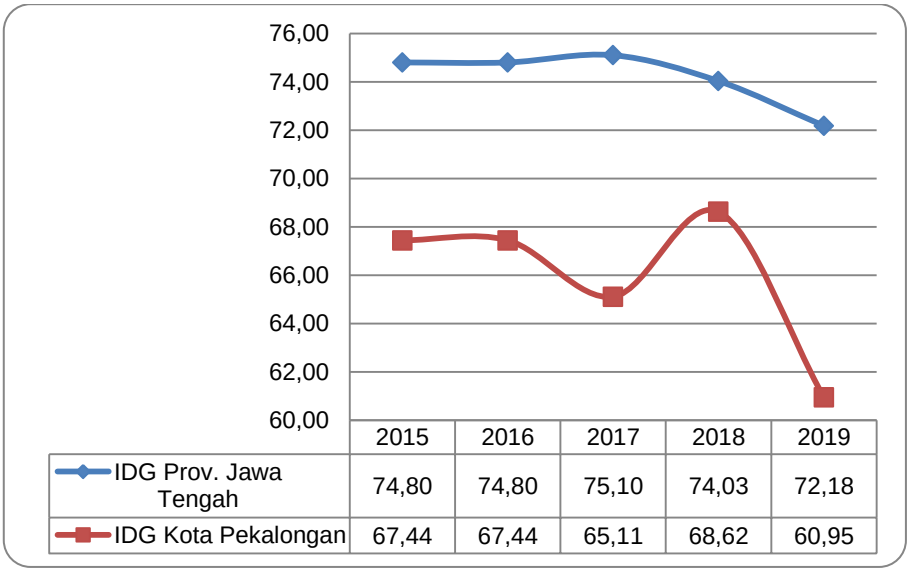

	2015	2016	2017	2018	2019
IDG Prov. Jawa Tengah	74,80	74,80	75,10	74,03	72,18
IDG Kota Pekalongan	67,44	67,44	65,11	68,62	60,95

Gambar 2.30 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Sumber : www.bps.go.id, 2019

2.1.2.23. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota

Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain : Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.25 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dibandingkan pada tahun 2015 atau 2016 maka jumlah kelompok kesenian pada tahun 2018 dan 2019 mencapai hampir dua kali lipatnya. Jumlah kelompok kesenian pada tahun 2019 mengalami sedikit penyusutan dibandingkan tahun 2018. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2015 sampai 2019 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian, sehingga persentase sarana budaya per jumlah kelompok menunjukkan kecenderungan penurunan karena belum adanya penambahan sarana budaya selama tahun 2015 s.d. 2019.

Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Kesenian	87	82	109	164	162
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (%)	4,59	4,87	3,67	2,44	2,47

Sumber : Profil Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

2.1.2.24. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2015 jumlah organisasi pemuda yaitu 8 organisasi. Jumlahnya relatif tetap, dimana pada tahun 2017 dan 2018 hanya 9 organisasi dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 26 organisasi pemuda. Sementara itu jumlah kegiatannya tidak berubah banyak, antara 6 sampai 10 kegiatan kepemudaan sepanjang lima tahun terakhir.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2015-2019 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Pemuda	8	8	9	9	26
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	10	8	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Tidak banyak jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan, jumlahnya tidak sampai 20 klub. Dari tahun 2015 dan 2016, jumlah klub olahraga adalah 19 klub, berkurang menjadi 16 klub pada tahun 2017,

dan bertambah lagi menjadi 20 klub pada tahun 2018 dan 2019. Sementara itu fasilitas gedung olahraga yang tersedia sampai saat ini berjumlah 2 unit.

Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Klub Olahraga	19	19	16	20	20
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2015 berjumlah 30 organisasi dan jumlahnya masih tetap hingga tahun 2018 dan terdapat penambahan 1 (satu) organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2019, dimana sebelumnya di tahun 2016 hanya berjumlah 12 lapangan. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.28 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	30	31
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	12	12	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	7	5	7	7	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Dalam lima tahun terakhir jumlah siswa PAUD/TK di Kota Pekalongan cenderung meningkat, hanya saja di tahun 2018 sedikit mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2015 sebanyak 7.669 siswa menjadi 9.019 di tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2015	7.669	15.195	50,47
2016	7.901	15.422	51,23
2017	8.107	15.873	51,07
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2015-2018 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 101,08 pada tahun 2015 menjadi 106,97 di tahun 2018. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga cenderung meningkat dari 102,57 pada tahun 2015 menjadi 104,67 di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100%. Hal ini karena adanya kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 ditunjukkan dalam tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
APS SD/MI	101,08	110,93	110,57	106,97	98,67
APS SMP/MTs	102,57	102,67	104,21	104,67	97,69

Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id, Dindik Kota Pekalongan, 2020

3) Usia 6-15 tahun

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APS 6-15 tahun dihitung sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses pendidikan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun dijelaskan dalam tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun		Jumlah anak usia sekolah TK s.d. SMP	Jumlah penduduk usia 6-15 thn	APS (%)	
2015	L	26.754	28.656	93,36	93,19
	P	25.805	27.745	93,01	
2016	L	26.481	26.528	99,82	101,95
	P	25.853	24.805	104,22	
2017	L	27.187	25.893	104,99	106,36
	P	26.245	24.342	107,81	
2018	L	28.202	26.691	105,66	109,04
	P	28.051	24.900	112,65	
2019	L	29.622	26.794	110,55	111,36
	P	28.028	24.974	112,23	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, ketersedian jumlah SD/MI dari tahun 2015-2016 berkurang di tahun 2016 karena karena adanya penggabungan beberapa SD di Kota Pekalongan. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah SD/MI bertambah menjadi 146 di tahun 2017 dan 149 di tahun 2018, dan pada tahun 2019 jumlahnya masih sama dengan tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah SD/MI	146	145	146	149	149
Jumlah SMP/MTs	36	37	38	38	38
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	30.357	30.519	29.873	30.524	32.855
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.678	15.682	15.229	15.330	15.385

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 39,59 di tahun 2015 menjadi 40,78 di tahun 2018, tetapi rasionya menurun di tahun 2019 menjadi 38,76, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2015	39,59
2016	39,61
2017	40,57

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2018	40,78
2019	38,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio sebesar 562,28, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 menjadi 579,51 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid
Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.762	1.889	1.763	1.887	1.840
	Jumlah Murid	32.390	32.242	32.121	32.210	32.092
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	954	1.015	963	993	933
	Jumlah Murid	15.913	16.206	16.168	15.905	15.759
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.716	2.904	2.726	2.880	2.773
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.303	48.448	48.289	48.115	47.851
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		562,28	599,41	564,52	598,57	579,51

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2020, 2020

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.35, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 dan berakhir menurun di tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2015	2.716	1.656	1,64	48.303	0,340
2016	2.904	1.654	1,76	48.448	0,360
2017	2.726	1.708	1,6	48.289	0,331
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 dan Data Evaluasi RKPD Tahun 2019

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,47 di tahun 2015, mengalami naik turun sampai tahun 2019 dengan kondisi terakhir di angka 0,48 sebagaimana disajikan pada tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Karakteristik	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Guru SD/MI*)	1.762	1.889	1.763	1.887	1.840
Rombongan Kelas*)	1.161	1.161	1.195	1.215	1.173
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,52	1,62	1,47	1,55	1,57
Murid SD/MI*)	32.390	32.242	32.121	32.210	32.855
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,47	0,5	0,46	0,48	0,48

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2015-2019. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 berada di angka 1,21, kemudian naik di tahun 2016, dan terus menurun sampai tahun 2018. Namun kembali naik di tahun 2019 di angka 1,26. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Karakteristik	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Guru SMP/MTs*)	954	1.015	963	933	933
Rombongan Kelas*)	408	493	513	516	481
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	2,34	2,06	1,88	1,81	1,94
Murid SMP/MTs*)	15.913	16.206	16.168	15.905	15.385
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,21	1,27	1,16	1,14	1,26

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2015-2019, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015-2017 kondisi bangunan SD/setara cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2019 menurun drastis. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2015 sebesar 77,87% dan pada tahun 2017 menjadi 94,82%. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 86,80%, namun kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,10%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 – 2019

Jenjang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI (%)	71,23	86,51	91,65	89,36	49,66
SMP/MTs (%)	77,87	77,87	94,82	86,80	92,10

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2019, 2020

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,09% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,07%, kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 0,10%. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2015 – 2019

Jenjang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI (%)	0,09	0,09	0,07	0,07	0,10
SMP/MTs (%)	0,31	0,43	0,14	0,15	0,46

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2019, 2020

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2015-2019 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100%. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/sederajat selama kurun waktu 2015-

2019 secara perlahan mengalami kenaikan hingga 100% di tahun 2019. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Jenjang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	99,94	99,98	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs sebagaimana disajikan dalam tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	6,47	7,30	7,53	7,26	69,69
	MI	6,27	7,26			
2	SMP	6,114	6,088	6,13	5,74	59,02
	MTs	5,353	5,393			

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2019

h. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara pada tahun 2015 sebesar 104,7 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai 104,78 pada tahun 2019. Sedangkan angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang 2015-2019 juga mengalami fluktuasi dari 104,13 menjadi 101,25.

Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2015 – 2019

Jenjang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	104,7	113,35	111,82	102,44	104,78
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	104,13	105,12	98,41	98,00	101,25

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2019, 2020

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Jenjang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	86,38	90,45	94,23	92,42	92,80
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	90,98	92,12	93,39	93,96	94,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.46 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jenjang TK/RA				
- Sekolah Terakreditasi A	-	3	8	18
- Jumlah Sekolah	104	108	109	110
- Persen	0,00	2,78	7,34	16,36
Jenjang SD/MI				
- Sekolah Terakreditasi A	85	99	95	102
- Jumlah Sekolah	145	146	149	149
- Persen	58,62	76,81	63,76	68,46
Jenjang SMP/MTs				
- Sekolah Terakreditasi A	18	23	23	26
- Jumlah Sekolah	37	38	38	38
- Persen	48,65	60,53	60,53	68,42
Jenjang TK-SMP				
- Sekolah Terakreditasi A	103	122	122	146
- Jumlah Sekolah	286	292	292	297
- Persen	36,00	41,78	42,57	49,16

Sumber : LKPJ Kota Pekalongan Tahun 2019, 2020

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2014	403	23.201	17,37
2015	405	29.860	13,56
2016	406	21.420	18,95

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2017	407	22.933	17,75
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
Rata-rata			17,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Jumlah Posyandu dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015 – 2019 adalah 17,16 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 17 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 56 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 berdasarkan data pada Tabel 2.46, secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun		Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah Penduduk	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2015	296.533	14	0,047	27	0,091	22	0,074	8	0,027
2016	299.222	14	0,047	27	0,090	22	0,074	8	0,027
2017	301.870	14	0,046	27	0,089	14	0,046	8	0,027
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2015 – 2019, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah

untuk tahun 2018 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk dokter gigi per 1.000 penduduk. Secara umum rasio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dokter Spesialis	0,52	0,42	0,48	0,53	0,39
Dokter Umum	0,52	0,52	0,79	0,91	0,60
Dokter Gigi	0,1	0,1	0,17	0,16	0,11
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,13	0,94	1,45	1,60	1,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2015 – 2019 semakin membaik. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Perawat	2,29	2,23	2,32	2,58	2,63
Rasio Bidan	0,87	0,95	1,00	1,20	1,08
Rasio Farmasi	0,89	0,44	0,93	1,18	0,84
Perawat	678	698	709	804	827
Bidan	257	286	304	375	339
Tenaga Farmasi	263	133	285	348	265

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya meliputi cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani **	78	94,36	94,36	100	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**	99,97	99.98	99.98	100	100
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**	100	100	100	100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**	143,3	128,31	128,31	138,03	139,90
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin**	188,11	100	198,75	149,60	157,82
Cakupan kunjungan bayi **	97,06	97,08	95,43	96,65	96,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020
**Standar Pelayanan Minimal Data dalam satuan persen

Cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam setiap kecamatan dalam bentuk persentase menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani warganya, khususnya dibidang kesehatan. Sampai dengan tahun 2017, Kota Pekalongan memiliki 14 puskesmas yang tersebar di 4 kecamatan.

Maksud dari cakupan pelayanan puskesmas adalah banyaknya puskesmas pada suatu wilayah atau daerah otonom dibagi banyaknya kecamatan pada daerah otonom. Adapun cakupan pada puskemas pembantu adalah kemampuan puskesmas pembantu dalam suatu area atau wilayah dalam menangani masalah kesehatan di wilayah yang diperbantukan dalam sebuah area kerja puskesmas pembantu tersebut. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan rujukan selama tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan puskesmas (%)	300	350	350	350	350
Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

d. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2019 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 57,20%. Angka ini sudah memenuhi presentase yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 45%. Untuk terus

meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.51 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif	Cakupan (%)
2015	1.940	1.536	79,18
2016	1.996	1.731	86,72
2017	5.066	2.168	42,80
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2015	11,03	12,12	1,67	219,96	4	8
2016	15,56	0	5,33	193,97	14	14
2017	14,42	4,55	5,9	214,72	32	16
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2018. Namun kembali melonjak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 21.193 orang. Dan pada kenyataannya penerima BPJS Kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2019 adalah PBI APBN sebanyak 79.933 jiwa dan Jamkesda sebanyak 70.931 jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2015 - 2019) tersaji pada tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	% Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	% Penerima Jamkesda
2015	296.533	24.060	75.774	25,55	32.401	10,93

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	% Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	% Penerima Jamkesda
2016	299.222	23.650	77.379	25,86	36.060	12,05
2017	301.870	22.510	77.464	25,66	50.621	16,77
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2015-2019, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Perubahan panjang jalan Negara terjadi mulai tahun 2017, dimana sebelumnya 10,37 Km berkurang menjadi 9,090 Km. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali bertambah menjadi 9,420 Km dengan kondisi baik 36,49%, kondisi sedang 46,32% dan kondisi rusak 17,45%.

Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2015–2019

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (%)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (%)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (%)
2015	10,73	10,73	0	0	100	0	0
2016	10,73	10,73	0	0	100	0	0
2017	9,090	8,585	0,505	0	94,44	5,56	0
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, DPUPR Kota Pekalongan, 2019

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perubahan seiring bertambahnya panjang jalan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi maupun penambahan ruas jalan kota. Pada tahun 2016 panjang jalan kota semula 140,49 km berubah menjadi 153,41 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 sepanjang 110,23 km. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (%)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (%)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (%)
2015	140,49	100,52	19,86	20,11	71,55	14,14	14,31
2016	140,49	108,29	12,92	19,27	77,08	9,20	13,72
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2014, rasio irigasi kota sebesar 26,58% dan tahun 2018 masih tetap sama. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Jaringan Irigasi	26,58%	26,58%	26,58%	26,58%	26,58%

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2019

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2014 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 75,16%, tahun 2015 meningkat menjadi 76,43%. Angka tersebut bertahan sampai dengan tahun 2018, sebagimana dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Luas irigasi kota dalam kondisi baik	75,16%	76,43%	76,43%	76,43%	76,43%

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2019

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2014-2018, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal semakin berkurang. Pada tahun 2014, rasio sempadan sungai yang dimanfaatkan untuk bangunan liar sebesar 40%. Dalam jangka lima tahun, yakni 2018, rasio sempadan sungai yang dimanfaatkan untuk bangunan liar berkurang menjadi hanya 25%. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sempadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dapat dilihat pada tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	40%	20%	25%	25%	25%

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2019

c. Drainase

Selain saluran irigasi, yang setiap tahunnya menjadi perhatian pemerintah adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2018 sepanjang 31.715 meter, terdiri dari saluran drainase primer dan sekunder. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 15.287 meter, kondisi rusak sepanjang 7.534 meter dan kondisi sebagian rusak sepanjang 8.894 meter.

Tabel 2.59 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan

No	Nama Jalan	Kelurahan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Jenis	Kondisi	Fungsi
1	Jl. Pasar Ratu	Bendan	115	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
2	Jl. Pemuda	Bendan	210	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Rusak	Sekunder
3	Jl. KHM masyur	Bendan	930	0.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
4	Jl. Gajahmada	Bendan	475	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
5	Jl. Slamet	Bendan	470	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
6	Jl. Kerinci	Bendan	100	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
7	Jl. Bengawan	Dukuh	830	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
8	Jl. Sekrading	Dukuh	770	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Primer
9	JL. Garuda	Kandang Panjang	300	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
10	Jl. Cendrawasih	Kandang panjang	235	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Sekunder
11	Jl. Cendrawasih	Kandang panjang	235	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Baik	Sekunder
12	Jl. Kapuas	Kandang panjang	245	0.5	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
13	Jl. Jend Sudirman	Kebulen	1400	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder

No	Nama Jalan	Kelurahan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Jenis	Kondisi	Fungsi
14	Jl. Wahid Hasyim	Keputren	259	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
15	Jl. Dr Cipto	Keputren	560	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
16	Jl. Sulawesi	kergon	417	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Sekunder
17	Jl. Bengawan	Kraton lor	830	0.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Baik	Sekunder
18	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	460	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
19	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	460	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
20	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	300	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
21	Jl. Sejahtera	Kraton Kidul	295	0.6	Ps Batu Belah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
22	Jl. Kemakmuran	Kraton Lor	290	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
23	Jl. Progo	Kraton Lor	300	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
24	Jl. Imam Bonjol	Kraton Lor	225	0.8	Ps Batu Belah	Tertutup	Sebagian Rusak	Sekunder
25	Jl. Hayam Wuruk	Kraton lor	880	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
26	Jl. Progo	Kraton lor	750	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
27	Jl. Dharma bakti	Medono	780	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
28	Jl. RA Kartini	Noyontaan	780	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
29	Jl. Tondano	Noyontaan	775	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Rusak	Sekunder
30	Jl. Dr. sutomo	Noyontaan	440	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
31	Jl. Ahmad Yani	Noyontaan	530	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Primer
32	Jl. Wahidin	Noyontaan	1250	1.2	Ps Batu Belah	Tertutup	Sebagian Rusak	Primer
33	Jl. Seta Budi	Noyontaan	176	1		Terbuka	Rusak	Primer
34	Jl. Dr Sutomo	Noyontaan	300	1.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
35	Jl. WR Supratman	panjang wetan	290	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
36	Jl. Kutilang	panjang wetan	450	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
37	Jl. Wilis	podo sugih	145	0.5	Ps Batu Belah	Tertutup	Baik	Sekunder
38	Jl. Urip Sumoharjo	podo sugih	178	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Primer
39	Jl. Kerinci	podo sugih	750	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Primer
40	Jl. Cempaka	poncol	830	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Primer
41	Jl. Dr. Wahidin	poncol	700	1.2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
42	Jl. Teratai	poncol	4360	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
43	Jl. Seruni	poncol	980	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
44	Jl. Melati	poncol	172	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
45	Jl.Manggis	sampangan	560	0.5	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
46	Jl. Hasanudin	sampangan	1200	0.8	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
47	Jl. S. Agung	sampangan	1000	0.8	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
48	Jl. Surabaya	sugihwaras	525	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder

No	Nama Jalan	Kelurahan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Jenis	Kondisi	Fungsi
49	Jl. Surabaya	sugihwaras	535	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
50	Jl. Bandung	sugihwaras	313	0.5	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
51	Jl. Semarang	sugihwaras	365	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
52	Jl. KH Agus salim	sugihwaras	830	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
53	Jl. Bandung	sugihwaras	160	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
	TOTAL PANJANG		31.715	M				

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2019

Pada tahun 2019, panjang saluran drainase di wilayah Kota Pekalongan bertambah menjadi 33.007 meter, dengan drainase primer dalam kondisi baik kurang lebih sepanjang 19.441 meter atau sekitar 58,9%.

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan ditunjukkan dalam Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan	Luas Genangan	Persentase
2015	4.525 Ha	1.920 Ha	42,43 %
2016	4.525 Ha	1.870 Ha	41,33 %
2017	4.525 Ha	1.396 Ha	30,85 %
2018	4.525 Ha	1.391 Ha	30,75 %
2019	4.525 Ha	1.057 Ha	23,35 %

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Revetment (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan *long storage* sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi :

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (%)	18,40	18,40	18,40	18,60	18,60
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	0,3	0,2	0,3	0,16	0,17
3.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	95	96	98	98

Sumber : DPUPR dan DLH Kota Pekalongan, 2020

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,6% dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2015-2018 dari 0,3 pada tahun 2015 menjadi 0,17 pada tahun 2019. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2015-2019. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2015 sebesar 90%. Namun secara kinerja pada akhir tahun 2018 dan 2019 membaik menjadi 98%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 9,15%, setara dengan 6.739 unit rumah. Tahun 2016-2019 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun, artinya kondisi ini semakin membaik. Pada tahun 2016 sebesar 8,68% menjadi 3,11% pada tahun 2019. Perkembangan rumah tidak layak huni dan rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.63 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (%)	Jumlah (unit)	Rasio (%)
2015	73.613	6.739	9,15	66.874	90,85
2016	74.313	6.448	8,68	67.865	91,32
2017	74.970	5.159	6,88	69.811	93,12
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

b. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 82,14% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2019 mencapai 88,60% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan.

Tabel 2.64 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*)
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	243.572	257.002	255.724	265.430	272.090
Jumlah Penduduk (jiwa)	296.533	299.222	301.870	304.477	307.097
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	82,14	85,89	84,71	87,18	88,60

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

*) Angka sementara

c. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 sebesar 110,75%, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44% pada tahun 2019. Persentase pengguna listrik yang

mencapai di atas 100% disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel 2.65 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2015	81.529	73.613	110,75
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020

d. Penduduk Bersanitasi

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2015 cakupan pelayanan sebesar 89,71% dan pada tahun 2019 mencakup 99,32%. Perkembangan penduduk bersanitasi di Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Bersanitasi (jiwa)	266.020	276.810	284.029	297.839	305.009
Jumlah Penduduk (jiwa)	296.533	299.222	301.870	304.477	307.097
Rasio Penduduk Bersanitasi	89,71%	92,51%	94,09%	97,82%	99,32%

Sumber : Dinkes Kota Pekalongan, 2020

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disingkat Dinperkim merupakan Dinas teknis pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinperkim dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2019, telah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh baik yang berasal dari APBN, APBD Prov.Jawa Tengah dan APBD Kota Pekalongan sehingga pada Tahun 2018 luas kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/213 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/215 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2014 berkurang menjadi 155,82 Hektar.

Tabel 2.67 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2019

No.	Kelurahan	Luas							Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2019 (Ha)	
		SK	2017		2018		2019			
		Ha	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bandengan	23,92	20,19	84,41	17,07	71,36	2,37	9,91	14,70	61,45
2	Kandang Panjang	28,22	20,36	72,15	13,35	47,31	3,14	11,13	10,21	36,18
3	Padukuhan Kraton	30,84	22,03	71,43	16,03	51,98	4,75	15,40	11,28	36,58
4	Panjang Baru	40,85	33,47	81,93	25,82	63,21	2,72	6,66	23,10	56,55
5	Panjang Wetan	13,85	11,04	79,71	2,85	20,58	0,43	3,10	2,42	17,47
6	Pasirkraton kramat	22,46	19,08	84,95	5,99	26,67	2,38	10,60	3,61	16,07
7	Tirto	3,70	3,22	87,03	2,22	60,00	0,93	25,14	1,29	34,86
8	Poncol	9,21	7,00	76,00	1,87	20,30	0,20	2,17	1,67	18,13
9	Klego	2,89	1,89	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Krapyak	11,90	10,34	86,89	1,44	12,10	0,40	3,36	1,04	8,74
11	Banyurip	6,78	6,23	91,89	0,56	8,26	0,25	3,69	0,31	4,57
12	Jenggot	0,80	0,80	100,00	0,29	36,25	0,00	0,00	0,29	36,25
13	Degayu	0,17	0,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	195,59	155,82	79,67	97,49	49,84	17,57	8,98	79,92	40,86

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2015-2019 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,77 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,76 personel untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat cukup tajam menjadi 1,31 personel pers 10.000 penduduk dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebanyak 0,91 personel untuk setiap 10.000 penduduk. Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2.68 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
2015	22	296.533	0,74
2016	23	299.222	0,77
2017	23	301.870	0,76
2018	40	304.477	1,31
2019	28	307.097	0,91

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Bantuan Polisi PP (Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 4,05 per 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 4,94 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlahnya masih sama dengan tahun 2017 yaitu 149 personil. Tetapi rasionya menurun menjadi 4,89 per 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan menjadi 4,36 personel per 10.000 penduduk.

Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Persentase
2015	120	296.533	4,05
2016	126	299.222	4,21
2017	149	301.870	4,94
2018	149	304.477	4,89
2019	134	307.097	4,36

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2015 pelanggaran Perda sebanyak 630 kasus, dan pada tahun 2017 melonjak menjadi 2.003 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pelanggaran Perda dapat ditekan menjadi 1.382 kasus. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90% mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.70 Penyelesaian Pelanggar Perda di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2015	630	570	90,47
2016	1.337	1.217	91,02
2017	2.003	1.883	94,01
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan kecenderungan meningkat, dimana rasio pada tahun 2015 adalah 48,80 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 55,62. Kenaikan rasio ini diakibatkan jumlah linmas yang meningkat yang diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Tabel 2.71 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
2015	1.447	296.533	48,80

Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
2016	1.447	299.222	48,36
2017	1.533	301.870	50,78
2018	1.417	304.477	46,54
2019	1.708	307.097	55,62

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Untuk jumlah Linmas pada Ton Inti, Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 yang semula berjumlah 31 personil dengan rasio 1,05, bertambah menjadi 35 personil pada tahun 2019 dengan rasio 1,14.

Tabel 2.72 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
2015	31	296.533	1,05
2016	31	299.222	1,04
2017	35	301.870	1,16
2018	35	304.477	1,15
2019	35	307.097	1,14

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 berjumlah 432 pos siskamling, meningkat menjadi 514 pada tahun 2017 dan 2018. Namun pada tahun 2019 berkurang menjadi 441 pos.

Tabel 2.73 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2015	432	27	16
2016	432	27	16
2017	514	27	19
2018	514	27	19
2019	441	27	16

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2019 adalah 8 panti, bertambah 1 Panti dibandingkan tahun 2018. Namun untuk jumlah anak yang diasuh lebih sedikit dibandingkan tahun 2018. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2015-2019) tersaji pada tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2015	8	217
2016	9	260
2017	7	237
2018	7	545
2019	8	354

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2019 jumlah PMKS adalah 24.823 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 24.116 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2015-2019) dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	254	254	105	12	3
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	942	942	337	21	164
Wanita Rawan Sosial	865	865	361	827	-
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	4.545	4.545	-	-	-
Anak Nakal	51	51	69	50	-
Korban Penyalahgunaan Narkoba	74	74	67	6	2
Penyandang Cacat :	966	966	1.142	343	535
- Tubuh	297	297	316	110	357
- Netra	170	170	174	58	103
- Mental	328	328	449	132	-
- Ganda	30	30	56	12	-
- Wicara	141	141	147	31	75
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	-	542	-	-
Gelandangan	6	-	16	-	-
Tuna Susila	4	-	-	-	-

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	22	-	87	30	3
Bencana Alam	-	-	-	2.623	-
Fakir Miskin	75.916	115.796	75.839	63.829	24.116
Jumlah	84.611	124.459	79.707	67.741	24.823

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2019 untuk organisasi sosial berjumlah 9 organisasi, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS sebanyak 5 orang dan jumlah PSM sebanyak 53 orang serta perintis / pejuang kemerdekaan sejumlah 6 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	0	0	9	6
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	90	87	87	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	288	288	288	88	53
Karang Taruna	51	27	32	91	32
Organisasi Sosial	0	8	7	7	9

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date. Untuk mendapatkan data yang up to date tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40% terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2018-2019.

Tabel 2.77 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2018	33.282	131.761

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613

Sumber : Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan Rumah Tangga Sasaran sebanyak 3664 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi 29.618 RTS dan penurunan Anggota Rumah Tangga Sasaran dari 131.761 jiwa pada tahun 2018 menjadi 112.613 jiwa pada tahun 2019. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya intervensi penanggulangan kemiskinan yaitu melalui program pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan keberlanjutan UMKM dan adanya sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan lintas program dan lintas sektor.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2015 s.d. 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1	2015	149.507	67,47
2	2016	149.507	67,47
3	2017	157.445	69,28
4	2018	161.502	70,21
5	2019	168.339	72,32

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari 67,47% di tahun 2015 menjadi 72,32% di tahun 2019. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 232.769 orang. Persentase angkatan kerja meningkat dari 70,21% menjadi 72,32% atau naik 2,11 poin pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) meningkat.

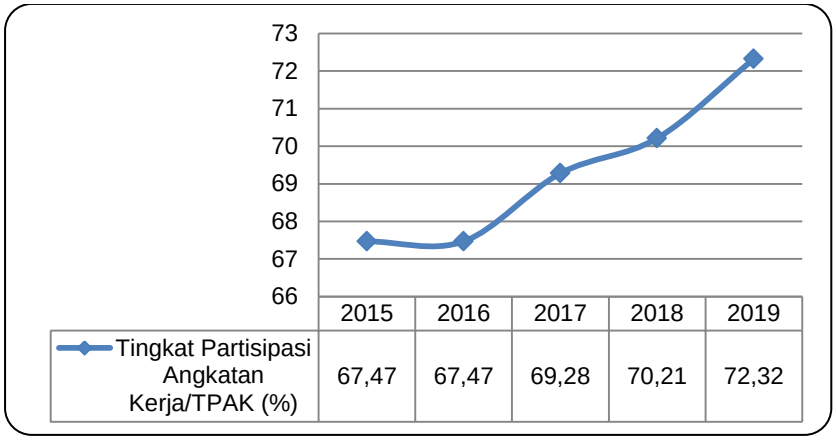

Gambar 2.31 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : jateng.bps.go.id, 2020

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 20 (dua puluh) kasus dari sekitar 300 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi tetapi pada tahun 2019 menunjukkan jumlah dan persentase sengketa terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian persengketaan ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2015	13	334	3,89
2016	11	368	2,99
2017	13	382	3,40
2018	13	365	3,60
2019	11	369	2,98

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dimana pada tahun 2019 sebesar 72,32%. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan berakhir tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018, begitu juga dengan AKAD dan

AKAN memiliki nilai yang berfluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2015	442	0	76
2016	58	3	20
2017	104	33	200
2018	180	21	103
2019	184	4	111

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar 5,77% atau menurun 0,36 poin dari tahun 2018, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 6 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

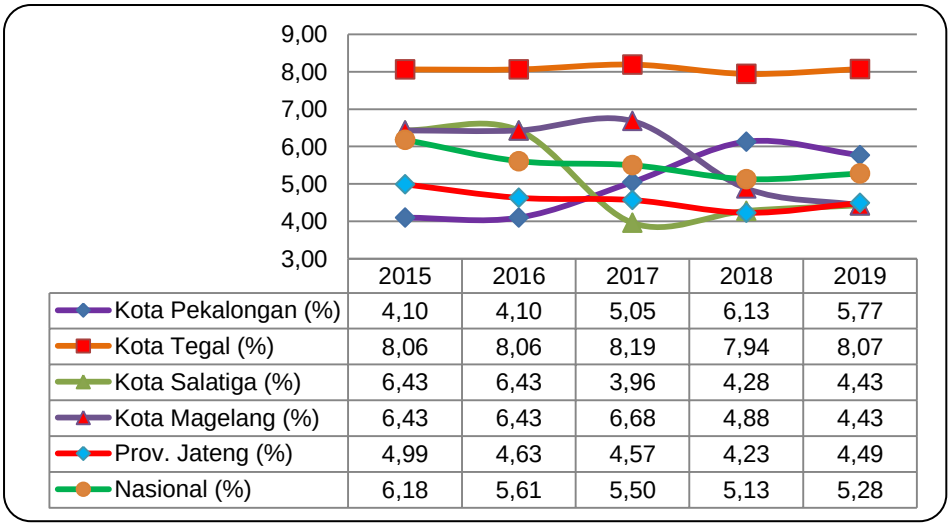

	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pekalongan (%)	4,10	4,10	5,05	6,13	5,77
Kota Tegal (%)	8,06	8,06	8,19	7,94	8,07
Kota Salatiga (%)	6,43	6,43	3,96	4,28	4,43
Kota Magelang (%)	6,43	6,43	6,68	4,88	4,43
Prov. Jateng (%)	4,99	4,63	4,57	4,23	4,49
Nasional (%)	6,18	5,61	5,50	5,13	5,28

Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 20120

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, TPT Kota Pekalongan memiliki nilai dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tetapi pada tahun 2017 melonjak melampaui TPT Provinsi Jawa Tengah bahkan pada tahun 2019 melampaui TPT Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT

Kota Pekalongan masih berada di bawahnya, tetapi lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 terjadi peningkatan penerapan K3 perusahaan di Kota Pekalongan, mulai dari 300 perusahaan di tahun 2015 hingga meningkat menjadi 410 perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2018, namun sangat menurun di tahun 2019 menjadi 319 perusahaan. Jika dilihat dari sisi persentase akan terlihat fluktuatif dan puncaknya pada tahun 2017 sebesar 96,86%. Fluktuasi ini dikarenakan jumlah perusahaan yang juga fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2015	300	334	89,82
2016	300	368	81,52
2017	370	382	96,86
2018	410	425	96,47
2019	319	376	84,84

Sumber : Diperinaker Kota Pekalongan, 2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2019 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 2.322 orang (sumber data BKPPD Kota Pekalongan) sedangkan jumlah pekerja perempuan di perusahaan formal sebanyak 8.330 orang (Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinperinaker).

Tabel 2.82 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	n/a	2.007	1.621	1.540	2.322
Jumlah pekerja perempuan (org)	n/a	56.536	9.799	9.870	45.571
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	n/a	3,55	16,54	15,60	5,10

Sumber : BKPPD dan Dinperinaker Kota Pekalongan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah bertambah, semula 1.540 orang pada tahun 2018 menjadi 2.322 orang pada tahun 2019.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 terus menurun. Pada tahun 2015 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 231 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 196 orang di tahun 2019. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.33 berikut.

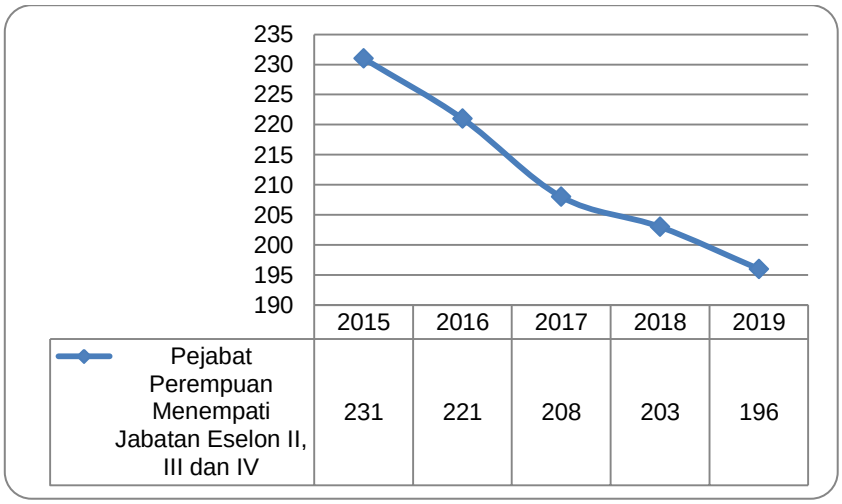

Gambar 2.33 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2015-2019 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka rasio 0,038%.

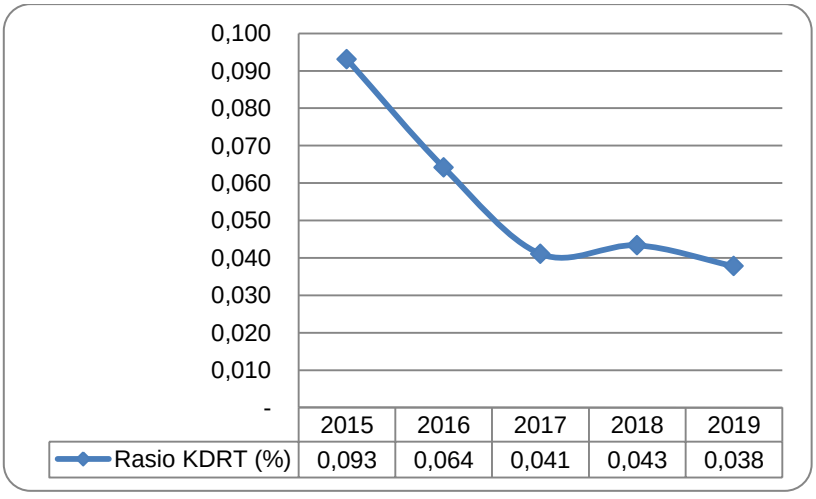

Gambar 2.34 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).

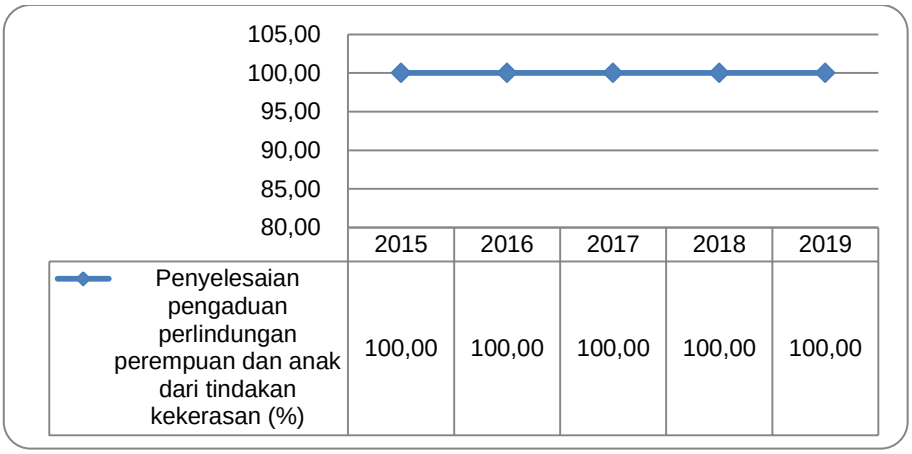

Gambar 2.35 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu : (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada tabel 2.83 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2015-2017 ketersediaan pangan utama mengalami kecenderungan naik, dari 6.323.153 di tahun 2015 menjadi 7.382.286 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 5.876.484 dan pada tahun 2019 lebih menurun lagi menjadi 5.400.416. Secara otomatis persentase ketersediaan pangan juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan, yaitu meningkat pada tahun 2015-2017 dan semakin menurun pada tahun 2018-2019.

Tabel 2.83 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2015	6.323.153	296.533	21,31
2016	6.855.003	299.222	22,91
2017	7.382.286	301.870	24,46

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2014-2018 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir terus membaik. Skor PPH Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik pada tahun 2015-2019. Jika skor PPH tahun 2015 sebesar 88,40 maka pada tahun 2019 semakin naik menjadi 91,31. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2015	88,40
2016	88,70
2017	89,71
2018	90,42
2019	91,31

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 sebesar 102,0 kg per kapita/tahun. Begitu pula dengan sayur dan buah bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, yaitu 73,8 kg per kapita/tahun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 82,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2019. Di urutan ketiga ditempati kelompok pangan hewani (47 kg/kapita/tahun tahun 2018) dan menurun sedikit menjadi 45,0 kg perkapita/tahun pada tahun 2019, selanjutnya diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Padi-padian	Kg/Kap/th	89,9	101,5	107,0	98,8	102,0
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	15,6	16,0	16,5	16,5	18,8
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	39,3	38,3	40,2	47,0	45,0
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	19,7	17,2	12,2	11,8	5,7
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	2,9	3,5	2,6	2,8	2,3
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	11,7	13,8	19,0	18,0	23,5
Gula	Kg/Kap/th	7,0	9,5	10,0	9,5	5,9

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	70,6	78,4	74,1	73,8	82,2
lain-lain	Kg/Kap/th	2,9	2,8	1,3	1,4	2,3

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun, konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dengan jumlah 974,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 1.006,1 kkal/kapita/tahun pada tahun 2019. Urutan berikutnya selalu berubah jenis kelompok pangannya. Pada tahun 2019, di urutan kedua ada pangan hewani sebesar 255,4 kkal/kapita/tahun, diikuti oleh kacang-kacangan sebanyak 213,2 kkal/kapita/tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	886,7	1.000,8	1.055,0	974,9	1.006,1
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	46,7	48,0	49,5	49,6	56,3
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	222,7	217,2	228,1	266,7	255,4
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	468,4	410,7	289,8	280,1	136,8
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	50,8	60,2	45,3	49,1	40,6
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	105,7	124,9	172,1	163,4	213,2
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	70,3	94,9	99,8	94,7	58,7
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	100,2	111,4	105,3	104,9	116,8
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	23,4	22,6	10,3	11,1	18,5

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
Luas tanah bersertifikat	3.617,23	3.690,93	3.778,43	4.013,28	4.157,29
Hak Milik	2.880,99	2.939,78	3.013,55	3.192,36	3.320,74
HGB	286,96	289,49	293,52	305,94	13,21
Hak Guna Usaha	5,76	5,76	6,76	6,76	6,76
Hak Pakai	382,56	394,95	403,04	444,70	451,53
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Hak Wakaf	56,96	56.96	58,57	60,5396	62,06
Lahan Bersertifikat (%)	74,47%	77,96%	79,94%	88,69%	91,87%

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2020

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 luas lahan bersertifikat adalah 74,47%, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2019 sebanyak 91,87% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan.

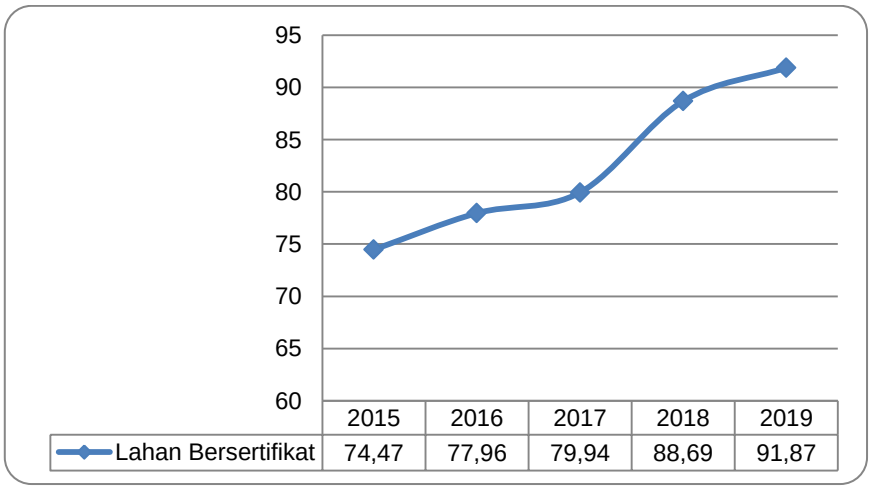

Gambar 2.36 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2020

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

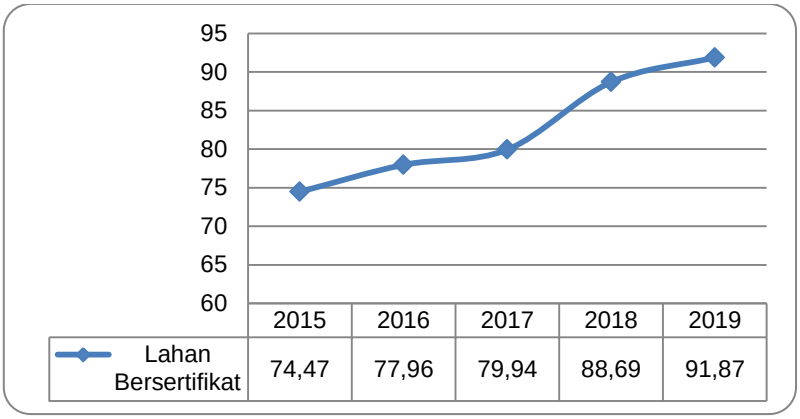

Gambar 2.37 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2015 – 2019

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2020

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL mengalami pasang surut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.37.

Pada tahun 2015 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 100%. Pada akhir tahun 2016, pengawasan UPL-UKL mengalami penurunan menjadi 60,42%. Hal ini terjadi karena dari 96 perusahan yang terdaftar hanya 58 perusahaan yang diawasi secara terus menerus UKL-UPL nya. Namun pada tahun 2017 dan 2018 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun terakhir menjadi 76,7%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 56%.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2015-2019 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.88 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

IPAL	2015		2016		2017		2018		2019	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Kauman	26	70	29	100	26	100	29	120	20	150
Jenggot	75	70	75	400	75	400	102	700	80	700
Industri Kecil	73	400	83	425	83	426	83	426	83	426
IPAL Bersama	3	378	3	500	3	500	3	500	3	500
Industri Besar	5	450	5	700	5	700	5	700	5	900
IPAL Biogas Duwet	118	120	125	160	28	90	125	120	125	120
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	210	7	210	7	210	7	75
IPAL Pringrejo	-	-	-	-	-	-	70	180	20	50
IPAL Banyurip	-	-	-	-	-	-	-	-	69	150
JUMLAH	307	1698	327	2.495	227	2.426	424	2.956	4122	3.071

Sumber : Profil DLH Kota Pekalongan, 2020

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung tetap seperti ditunjukkan dalam gambar 2.38.

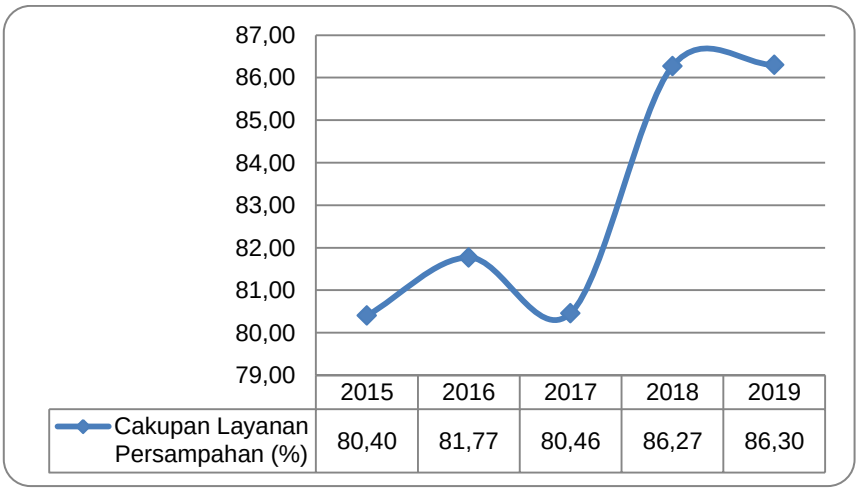

Gambar 2.38 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Sumber : Profil DLH Kota Pekalongan, 2020

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2015 - 2019 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2015-2019. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2015-2019 pengelolaannya setiap hari semakin membaik. Puncaknya, pada tahun 2015 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir mencapai 895 m^3 per hari.

Tabel 2.89 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Data Sampah per Hari	2015		2016		2017		2018		2019	
	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%
Timbulan sampah					153.788					
Sampah terangkut ke TPA	618	69,05	650	78,49	530	79,12	271,87	73,3	353,93	79,15
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	277	30,95	140	16,91	140	20,88	99	26,7	31,97	20,85
Jml Sampah tertangani (m^3)	895	100	790	95,40	670	100	370,87	54,48	385,91	86,30

Sumber : Profil DLH Kota Pekalongan, 2020

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

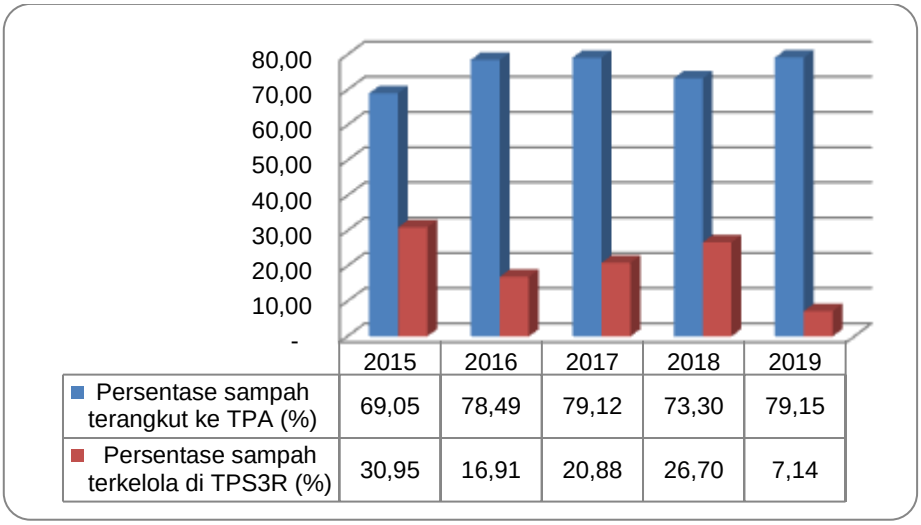

	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase sampah terangkut ke TPA (%)	69,05	78,49	79,12	73,30	79,15
Persentase sampah terkelola di TPS3R (%)	30,95	16,91	20,88	26,70	7,14

Gambar 2.39 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2015–2019 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2015–2019. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah selama tahun 2015–2019 pengelolaannya setiap hari semakin menurun. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

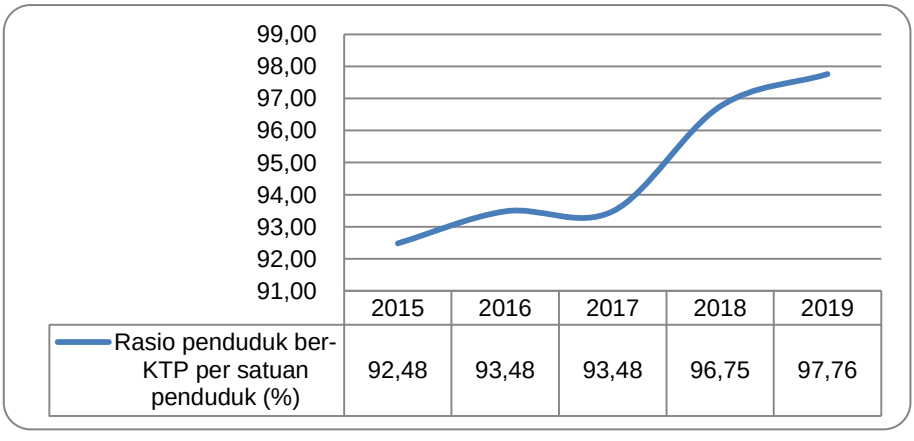

	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	92,48	93,48	93,48	96,75	97,76

Gambar 2.40 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2019 ini telah melaksanakan perekaman KTP-el mencapai 225.252 jiwa (97,76%) dan

kepemilikan KTP-el telah mencapai 225.252 jiwa (97,76%) dari target wajib KTP-el sebesar 230.411 jiwa.

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2015-209), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2015	100%
2016	100%
2017	100%
2018	100%
2019	100%

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

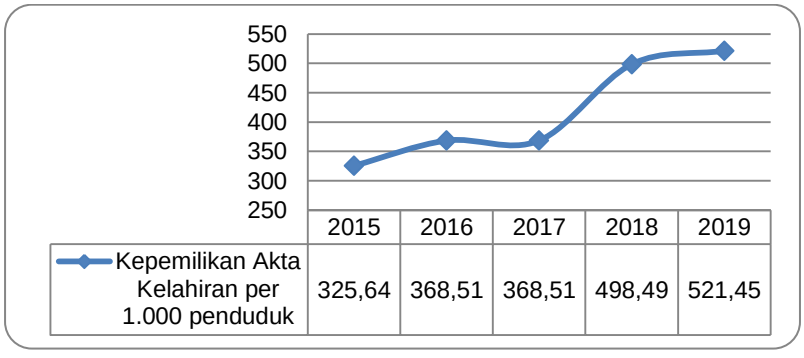

Gambar 2.41 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2020

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2015 sampai dengan 2019 ditunjukkan dalam Gambar 2.41.

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terkahir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 705 akta, pada tahun 2016 diterbitkan sebanyak 1.133 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2019 diterbitkan sebanyak 2.797 akta sebagaimana disajikan dalam tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.91 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2015	705
2016	1.133
2017	1.473
2018	2.691
2019	2.797

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

Tabel 2.92 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2015	58
2016	62
2017	43
2018	60
2019	46

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan

mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 sampai sekarang dikarenakan penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah LPM
2015	27
2016	27
2017	27
2018	27
2019	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2015 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Tabel 2.94 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2015	32
2016	32
2017	32
2018	32
2019	31

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2019

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan peran dan fungsi

Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019 terdapat tambahan 2 Posyandu dari 409 pada tahun 2018 menjadi 411 ditahun 2019. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2015	405
2016	406
2017	407
2018	409
2019	411

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2015 - 2017 terus mengalami penurunan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin berkurang. Namun pada tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat di diatas 27.000 orang. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2015-2019 tersaji pada tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2015	47.389	39.387	83,11
2016	45.805	35.570	77,65
2017	44.965	24.027	53,43
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 berfluktuatif sebagaimana Gambar berikut.

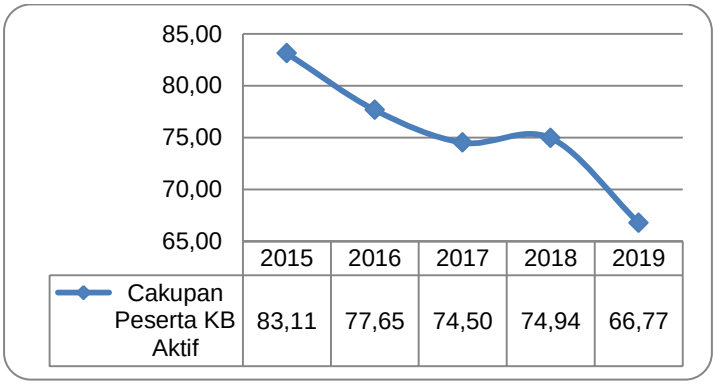

Gambar 2.42 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2019 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 51,99%, menurun dari tahun 2018 sebesar 57,71%. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2015-2019 tersaji pada tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2015	77.747	25.569	32,89
2	2016	77.747	55.032	70,78
3	2017	77.575	46.478	59,91
4	2018	77.817	44.487	57,71
5	2019	80.653	41.938	51,99

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

9. Perhubungan

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya jalan lingkar. Dengan adanya jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan kota. Masih banyak kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota Pekalongan sebagai jalur pantura.

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 VC ratio di Kota Pekalongan selalu mengalami kenaikan, mulai dari 0,8 sampai 0,88. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan tajam yaitu menjadi 0,39 dan pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,45. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya jalan tol trans Jawa yang beroperasi mulai tahun 2018.

VC Ratio diatas 0,5 artinya pada ruas jalan tersebut sudah mengalami kemacetan yang akan mempengaruhi ruas jalan lain.

Tabel 2.98 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Nama Jalan	Kapasitas Jalan	VC Ratio				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jl. Dr. Sutomo	5.702	0,84	0,84	0,84	0,41	0,35
Jl. Gajah Mada	5.588	0,78	0,78	0,78	0,35	0,43
Jl. Merdeka	2.720	1,01	1,01	0,92	0,43	0,58
Jl. Pemuda	3.925	1,02	1,02	0,77	0,67	0,61
Jl. Jend Sudirman	4.463	0,94	0,95	1,01	0,39	0,55
Jl. Dr. Setiabudi	3.347	0,99	0,99	1,03	0,56	0,85
Jl. Wilis – Jl. Sriwijaya	2.143	0,66	0,66	0,93	-	-

Nama Jalan	Kapasitas Jalan	VC Ratio				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jl. Wilis	4.234	-	-	-	0,17	0,17
Jl. Sriwijaya	3.183	-	-	-	0,33	0,23
Jl. KH. Mansur	3.981	0,75	0,77	0,66	0,31	0,47
Jl. Slamet	2.323	n/a	n/a	n/a	0,30	0,27
RATA-RATA		**0,8**	**0,87**	**0,88**	**0,39**	**0,45**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 0,00025. Hal ini memiliki makna 2,5 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2016 sebesar 0,00028 mengalami kenaikan atau 2,8 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 stagnan di angka 0,00032 atau 3,2 izin per 10.000 penduduk.

Tabel 2.99 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2015	73	296.533	0,00025
2016	83	299.222	0,00028
2017	97	301.870	0,00032
2018	97	304.477	0,00032
2019	97	307.097	0,00032

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2019, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2017 berjumlah 1.912.577 orang dan naik di tahun 2018 menjadi 1.938.614 orang. Pada tahun 2019 sebesar 1.876.174 orang sedangkan otobis AKAP dan AKDP di tahun 2017 berjumlah 377.428 unit dan menurun di tahun 2018 menjadi 339.637 unit. Per tahun 2019, jumlah otobis berjumlah 294.470 unit, sehinga dapat dikatakan bahwa persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana terlihat pada tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.100 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Otobis AKAP AKDP	n/a	600	377.428	339.637	294.470
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	n/a	n/a	1.912.577	1.938.614	1.876.174
Persentase Angkutan Darat	n/a	n/a	19,8%	17,6%	15,7%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2018 kembali menurun. Pada tahun 2015, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 732 kendaraan. Tahun 2017 meningkat menjadi 800 kendaraan, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 788 kendaraan dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 829 kendaraan.

Tabel 2.101 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	732	743	800	788	829

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector, uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lama Pengujian (Menit)	20	20	20	30	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2015-2019 tidak ada kenaikan yaitu Rp.40.000.

Tabel 2.103 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengedara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Tabel 2.104 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun n	414	1.136	1.217	1.271	1.371
Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia	480	1.457	1.437	1.437	1.437
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	86,25%	77,97%	84,69%	88,45%	95,41%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.105 berfluktuasi dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 1.230.166 penumpang. Perkembangan dari tahun 2015-2019 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya.

Tabel 2.105 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2015	343.808
2016	537.704
2017	585.215
2018	821.085
2019	1.230.166

Sumber : Stasiun Kota Pekalongan, 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel 2.106 berikut.

Tabel 2.106 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2019

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	Dinkominfo	1000	Sangat Informatif
2	RSUD Bendan	1000	Sangat Informatif
3	Satpol PP	1000	Sangat Informatif
4	Dindik	1000	Sangat Informatif
5	DPMPTSP	1000	Sangat Informatif
6	DKP	1000	Sangat Informatif
7	Sekretariat DPRD	970	Informatif
8	BKPPD	920	Informatif
9	BAPPEDA	900	Informatif
10	BPBD	870	Menuju Informatif
11	DPUPR	850	Informatif
12	DPMPPA	850	Informatif
13	DINSOSP2KB	835	Sangat Informatif
14	DINPERINAKER	815	Menuju Informatif
15	DINKES	800	Menuju Informatif
16	DINDUKCAPIL	715	Menuju Informatif
17	DINARPUS	765	Menuju Informatif
18	DLH	745	Menuju Informatif
19	SETDA	732	Menuju Informatif
20	Kecamatan Barat	730	Menuju Informatif
21	DINPARBUD	675	Cukup Informatif
22	Inspektorat	675	Cukup Informatif
23	Kecamatan Timur	665	Cukup Informatif
24	BKD	650	Cukup Informatif
25	Kecamatan Selatan	660	Cukup Informatif
26	Kecamatan Utara	615	Cukup Informatif
27	Kesbangpol	630	Cukup Informatif
28	DINHUB	595	Kurang Informatif
29	DINPERKIM	575	Kurang Informatif
30	DINDAGKOP UKM	550	Kurang Informatif
31	DINPERPA	530	Kurang Informatif

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.107 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah SIM	49	53	55	76	92

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun

masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat http://pusaka.pekalongankota.go.id. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, MGMP, Formaci, PKK, Himpaudi, Wartawan, Batik TV dan RKB. Fotografer dan Film, e-bisnis bagi pelaku usaha, pendamping TIK Kecamatan, Telecenter, Guru SMA dan SMK, DPP KNPI, IPBNU Ranting Selatan, PAC Ansor.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Bakrie Telephone, Telkomsel, Indosat, Axis, Protelindo, Excelcomindo/Xl, HCPT, Telkom Flexi, TBG (Tower Bersama Grup), Smart Fren, STI dan Radio Damashinta. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2018 di Kota Pekalongan sebanyak 80 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jaringan telepon genggam	12	12	12	12	7
Stasioner	62	84	84	80	80
Rasio jaringan komunikasi	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Keterangan : jaringan telepon genggam : 1G: (AMPS), 2G: (GSM, CDMA) ,2,5G (GPRS, EDGE) 3G (Mobile Broadband), 3,5 G (HSPA, HSDPA, HSUPA), 3,75G (HSPA+, EVDO), 4G(LTE Long Term Evolution), 5G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Surat Kabar	10	10	10	15	15

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penyiaran Radio	10	10	13	14	17
Jumlah Penyiaran TV	15	15	15	16	20

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2019

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2016-2019 semakin menurun. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 14.271 orang. Jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 15.096 orang. Namun jumlah tersebut menurun secara signifikan di tahun 2019 menjadi 10.531 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.111.

Tabel 2.111 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2019

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (%)
2016	14.271	74.313	19,20
2017	14.671	74.970	19,57
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2020, 2020

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

a) domain arsitektur Proses Bisnis;
b) domain arsitektur data dan informasi;
c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e) domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f) domain arsitektur Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, SPBE Kota Pekalongan telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut :

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola : 2,86
- Domain Layanan SPBE : 3,39

Adapun indeks SPBE Kota Pekalongan tahun 2019 yaitu 3,14 dengan predikat "Baik". Informasi secara lengkap disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.43 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : spbe.go.id, 2020

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Akan tetapi prosentase koperasi aktif di Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2.112 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2015	235	273	86,08
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34

Sumber : Profil Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan sampai tahun 2016 namun turun pada tahun 2017. Jika pada tahun 2015 jumlah UMKM adalah 22.934, maka pada tahun 2019 jumlah UMKM menjadi 22.980. Peningkatan jumlah UMKM ini dapat terlihat pada tabel 2.113.

Tabel 2.113 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

TAHUN	KOMPONEN UMKM				JUMLAH
	PERDAGANGAN (SIUP)	INDUSTRI KECIL MENENGAH	PEDAGANG PASAR	PEDAGANG KAKI LIMA	
2015	9.243	6.319	6.311	1.061	22.934
2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980

Sumber : Profil Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Sektor-sektor yang paling tinggi kemampuannya dalam menarik investasi adalah sektor tersier yang mampu menarik investasi sebesar 1.126,85 milyar rupiah dari 544 unit usaha, kemudian sektor sekunder mampu menarik investasi sebesar 68,90 milyar rupiah dari 68 unit usaha dan kemudian sektor primer yang mampu menarik investasi sebesar 7,52 milyar rupiah dari 20 unit usaha. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investor (PMA/PMDN)	439	385	304	202	745
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	794	460	233	175	3.294,76
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	2.681	2.825	1.274	1.351	8.377
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	6,11	7,34	4,19	6,68	11,24

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2020

Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2015-2019, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 8.377 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 11,24. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang dengan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 4,19.

Tabel 2.115 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	794,069	460,727	232,835	175,150	3.294,76
Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi (Rp. Milyar)	1.117,830	794,069	460,727	232,835	175,150

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Pekalongan, 2020

Tabel 2.116 menjelaskan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2015-2019 atas realisasi PMDN tahun evaluasi mengalami penurunan. Pada tahun 2015, realisasi PMDN Rp. 794,069 milliar. Kemudian realisasi PMDN tahun evaluasi turun menjadi Rp. 460,727 milliar pada tahun 2016 dan Rp. 232,835 milliar pada tahun 2017 serta sebesar 175,150 miliyar akhir tahun 2018, dan pada akhir tahun 2019 realisasi PMDN tahun evaluasi menjadi sebesar Rp.3.294,76 milliar.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, namun di tahun 2017–2019 kegiatan kepemudaan menjadi 8 kegiatan. Karena ada kegiatan yang kurang relevan dan kegiatan tersebut dihapus. Pada tahun 2019 terjadi penambahan organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi sesuai yang tercatat di Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.116 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Kepemudaan	8	8	9	9	26
Jumlah kegiatan Kepemudaan	6	10	8	8	8
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber : Profil Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2019, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 8 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan.

Tabel 2.117 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	30	31
Jumlah kegiatan Olahraga	7	5	7	7	8
Jumlah Lapangan Olahraga	12	12	55	55	55

Sumber : Profil Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Goverment, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta

layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 even pada tahun 2018, menjadi 57 even di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan even tersebut.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	23	23	29	42	57
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	206	282	282	282	282

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menyelenggarakan berbagai even seni dan budaya dengan total 57 even sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.119 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Hut Satpol PP Provinsi (Pentas Tari Batik Jlamprang)	21-Feb-19	Kota Pekalongan
2	Pentas Keroncong di TVRI	8-Feb-19	Kota Semarang
3	Festival Pekawis	Maret 2019	Kota Pekalongan
4	Pentas Kampung Budaya Landungsari	18 Mar 19	Kota Pekalongan
5	Jetayu Car Free Night	23 Mar 19	Kota Pekalongan
6	Pentas Kampung Budaya Setono	27-Mar-19	Kota Pekalongan
7	Pentas Seni Kecamatan	31-Mar-19	Kota Pekalongan
8	Festival Sarung	1-Apr-19	Kota Pekalongan

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
9	Kirab Hari Jadi Kota Pekalongan	1-Apr-19	Kota Pekalongan
10	Lomba PGDK	3-Apr-19	Kota Pekalongan
11	Lomba Volksong	4-Apr-19	Kota Pekalongan
12	Lomba Anekdot	6-Apr-19	Kota Pekalongan
13	Sarasehan Bahasa Kalongan	6-Apr-19	Kota Pekalongan
14	Pentas Seni PPID	4-7 April 19	Kota Pekalongan
15	Jetayu Car Free Night	4-May-19	Kota Pekalongan
16	Pekchun	7-Jun-19	Kota Pekalongan
17	Festival Jlamprang Kultur	11-Jun-19	Kota Pekalongan
18	Syawalan Krapyak	12-Jun-19	Kota Pekalongan
19	Pentas JKPI Di Bali	20-23 Jun 19	Bali
20	Karnaval JKPI Di Bali	20-23 Jun 19	Bali
21	Karnaval Apeksi	3-Jul-19	Kota Semarang
22	Pentas Ronggeng Apeksi	3-Jul-19	Kota Semarang
23	Jetayu Car Free Night	13-Jul-19	Kota Pekalongan
24	Paf (Pekalongan Art Festival)	15-20 Jul 19	Kota Pekalongan
25	Pentas Tari Batik Kejati	17-Jul-19	Kota Pekalongan
26	Lomba Rias Manten	26-Jul-19	Jakarta
27	Jetayu Car Free Night	17 Ags 19	Kota Pekalongan
28	Pentas Resepsi Hut Ri	18 Ags 19	Kota Pekalongan
29	Parade Hari Jadi Prop Jateng	25 Ags 19	Kab Wonogiri
30	Pentas Seni Pameran Museum	26-27 Ags 19	Kota Pekalongan
31	Peresmian Kampung Budaya	27 Ags 19	Kota Pekalongan
32	Pentas Seni Pameran Inovasi	5-8 Sept 19	Kota Pekalongan
33	Pentas Event Bersama Sapta Mitra Pantura	24-Sep-19	Kab Brebes
34	Pengiriman Sintren	30-Sep-19	Kota Solo
35	Pentas Seni Grumungan Wong Batik	30-Sep-19	Kota Pekalongan
36	Upacara Hari Batik	2-Oct-19	Kota Pekalongan
37	Pentas Event Bersama Tk Jateng	4-Oct-19	Kab Kebumen
38	Karnaval Pekan Batik	6-Oct-19	Kota Pekalongan
39	Pentas Seni Pekan Batik	4-8 Okt 19	Kota Pekalongan
40	Bantuan Komunitas Sepeda Onthel	6-Oct-19	Kota Pekalongan
41	Jetayu Car Free Night	12-Oct-19	Kota Pekalongan
42	Pentas Seni Sarasehan Seni Budaya	12-Oct-19	Kota Pekalongan
43	Sarasehan Pitutur Bijak	17-Oct-19	Kota Pekalongan
44	Pentas Seni Sarasehan Seni Budaya	19-Oct-19	Kota Pekalongan
45	Sedekah Laut Nelayan	24-Oct-19	Kota Pekalongan
46	Lomba Perahu Hias	25-Oct-19	Kota Pekalongan
47	Upacara Sumpah Pemuda	28-Oct-19	Kota Semarang
48	Kauman Art	28-Oct-19	Kota Pekalongan
49	Peringatan Sumpah Pemuda (Pentas Seni)	28-Oct-19	Kota Pekalongan
50	Ikhtiar Penguat Literasi Lokal	31-Oct-19	Kota Pekalongan
51	Pentas Wayang Kulit Hari Wayang	6-Nov-19	Kota Solo
52	Penetapan TACB	14-16 Nov 19	Kota Pekalongan
53	Pagelaran Wayang Dalam Rangka Hari Wayang Nasional	14 Nov 19	Kota Pekalongan

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
54	Festival Marawis	15 Nov 19	Kota Pekalongan
55	Sarasehan Budaya	20 Nov 19	Kota Pekalongan
56	Festival Kampung Budaya	22 Nov 19	Kota Pekalongan
57	Pentas Seni Di TMII	1-Dec-19	Jakarta

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2019

Tabel 2.120 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

No	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Qosidah/Rebana	Seni Musik	Seni Musik
3	Seni Musik	Sanggar Teater	Sanggar Teater
4	Sanggar Teater	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Tari	Seni Rakyat	Seni Rakyat
6	Seni Rakyat	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Seni Karawitan	Perfilman	Perfilman
8	Perfilman	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat
9	Komunitas Musik Rakyat	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Orkes Melayu (Dangdut)	Samroh	Samroh
11	Musik Rampak	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan
12	-	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	-	Reklame	Reklame
14	-	Dekorasi	Dekorasi
15	-	Seni Lukis	Seni Lukis
16	-	Kerajinan	Kerajinan
17	-	Sastra	Sastra

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 86.127 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 87.849 dan 89.682 pengunjung. Pada tahun 2018 jumlahnya menurun lagi menjadi 83.068, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.150. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media *online* yang saat ini sudah dalam genggaman. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 2.121 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2015	86.127	296.533	0,29
2016	87.849	299.142	0,29
2017	89.682	268.070	0,33
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 328 perpustakaan di tahun 2016, berkurang menjadi 105 di tahun 2017, dan di tahun 2019 kembali berkurang menjadi 94. Hal ini dikarenakan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2015 - Tahun 2019

Uraian Data	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	3
Perpustakaan RW	328	328	105	105	94
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2015 - 2019 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan PD yang mengelola arsip secara baku, stagnan di angka 22 OPD. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD seperti dapat dilihat pada tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2015	34	22	64,71%
2016	34	22	64,71%
2017	66	22	33,33%
2018	66	49	74,24%
2019	66	49	74,24%

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan dapat dilihat pada gambar 2.44 berikut.

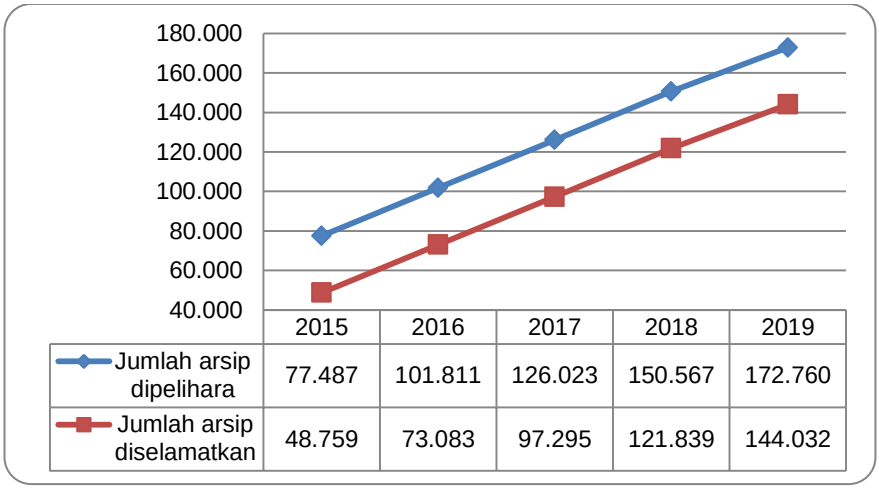

Gambar 2.44 Jumlah Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2015-2019 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan. Pada tahun 2017, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 23 orang, pada tahun 2018 sebanyak 28 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 48 orang.

Tabel 2.124 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2017	6	16	1	orang
2018	7	20	1	orang
2019	10	36	2	orang

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Namun sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 Pemerintah Kota Pekalongan belum ada arsiparis yang memiliki sertifikasi kompetensi kearsipan.

Tabel 2.125 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2017	4	orang	0%
2018	3	orang	0%

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2019	2	orang	0%

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 97,99% dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 14.992 ton. Pencapain Target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton dapat terpenuhi,dengan realisasi 1.746,2 ton (145,41%). Pencapaian produksi ikan air tawar pada tahun 2019 sebesar 11,3 ton dari target sebesar 83 ton, atau hanya tercapai 13,61%. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya air payau mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019, namun untuk budidaya ikan air tawar mengalami penurunan atau berkurang dikarenakan berkurangnya lahan karena terinterusi air laut, faktor cuaca yaitu kemarau yang panjang (Bulan Juli – Desember), minimnya pasokan air tawar di kawasan budidaya ikan, sungai yang tercemar air limbah sehingga sumber air susah untuk sarana budidaya, banyak pembudidaya yang beralih profesi dan banjir Bulan Januari.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2015-2019) dapat dilihat pada tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2015- 2019 (kg)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	14.619	15.641	10.475	10.980	14.992
b. Target Daerah	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	97,46	104,27	68,46	71,76	97,99
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.280,9	1.392	1.578,50	1.698,30	1.746,2
b. Target Daerah	745	745	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	171,93	186,85	131,54	141,53	145,51
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	101,1	110	46,7	46,90	11,3
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	121,81	132,53	56,27	56,51	13,61
Jumlah Produksi (ton)	16.001	17.143	12.100	12.725	16.750
Target Produksi	15.828	15.828	16.583	16.583	16.583

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2020

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 belum bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 30 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2018 sudah dapat melampaui target yaitu 31,60

kg/kapita/tahun dengan persentase 105,33%. Sedangkan untuk tahun 2019 belum ada data yang dapat disajikan (belum ada rilis dari BPS Kota Pekalongan). Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan tersaji pada tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2015	23,2	30	77,30
2016	25,2	30	84,00
2017	26,7	30	89,00
2018	31,60	30	105,33
2019	31,60	30	NA

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2020

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2017 sampai sekarang (tahun 2019).

Tabel 2.128 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2015	1	33	3,03
2016	1	34	2,94
2017	0	34	0
2018	0	35	0
2019	0	35	0

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2020

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu 14.991 ton (tahun 2018 sebesar 10.980 ton). Sedangkan jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 530,14 ton di tahun 2015 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 tersaji pada tabel 2.129 berikut.

Tabel 2.129 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (ton)

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2015	530,14	14.619	3,63
2016	471,82	15.641	3,02
2017	259,48	10.475	2,48
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2020

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlahnya dari 28 hotel pada tahun 2015 menjadi 30 hotel pada tahun 2019. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 4. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 85 di tahun 2015, sekarang telah berkembang menjadi 152 restoran di tahun 2019. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata sebesar 720.816 pada tahun 2019.

Tabel 2.130 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2015	28	85	230.903
2016	31	132	363.585
2017	28	137	387.417
2018	30	138	784.254
2019	30	152	720.816

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota

Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon *Show*, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tersaji pada tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penyelenggaraan	23	23	35	42	57

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan, antara lain di pantai Pasir Kencana, pantai Slamaran Indah, Museum Batik, kolam renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Bahkan Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Jumlah pengunjung wisata bahari mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah abrasi yang merusak kawasan pantai serta adanya rob.

Sementara itu kunjungan di Museum Batik semakin meningkat, bahkan wisatawan dari mancanegara banyak yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel 2.132 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Objek Wisata	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	6	2
	2). Wisnus	167.923	109.057	105.360	69.184	69.057
	B. Pendapatan (Rp.)	801.290.250	509.935.500	529.565.500	360.360.250	355.370.750
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	5.231	7.437	9.134	7.641	11.283
	B. Pendapatan (Rp.)	20.558.500	27.310.000	31.851.500	32.826.750	44.572.750
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	265	265	358	454	286
	2). Wisnus	16.583	21.834	23.044	25.154	28.312
	B. Pendapatan (Rp.)	55.114.000	70.653.000	84.254.000	96.861.000	100.530.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					

No	Objek Wisata	2015	2016	2017	2018	2019
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	42.775	40.901	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	272.112.500	0	0	0	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,90 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun berikutnya yaitu sebesar 4,25 ton per hektar. Tahun 2017 kembali naik dan tahun 2018 menurun lagi pada posisi 6,36 ton per hektar. Tahun 2017 kembali naik dan menurun lagi hingga tahun 2019 pada posisi 5,53 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan dilihat pada tabel 2.133 berikut.

Tabel 2.133 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi tanaman padi (ton)	10.872,00	11.793,00	12.425,00	10.077,00	5.131,09
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.098,00	2.771,00	1.704,00	1.584	1.618,74
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	9,90	4,25	7,29	6,36	3,16

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2018,dari 67 kelompok tani pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok tani di tahun 2018. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak 28 kelompok, kelompok tani sebanyak 28 kelompok dan kelompok ternak sebanyak 24 kelompok. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota juga telah mampu membina semua kelompok tani dengan capaian 100%.

Tabel 2.134 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	4	26	0	3	28
Jumlah kelompok tani	66	66	66	67	80
Cakupan bina kelompok petani	6,06 %	39,40%	0%	4,48%	100%

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2019

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha

UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Jenis Pasar / Toko	2015	2016	2017	2018	2019
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
Pasar Tradisional	11	11	11	11	11
Toko	247	247	247	650	650
Kios	1.524	1.652	1.685	1.685	1.685
Toko Modern :					
- Minimarket	26	26	41	42	43
- Supermarket	2	2	2	3	3
- Department store	4	4	4	3	3
- Hypermarket	2	2	2	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meroket dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 2014 sebesar Rp.1,584 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,195 triliun di tahun 2018. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,342 triliun di tahun 2014 menjadi Rp.1,570 triliun di tahun 2018. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	7.778.271,61	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.701.212,30	1.847.835,00	2.019.945,16	2.195.304,05	2.369.793,83
		Kontribusi	21,87%	21,72%	21,78%	21,76%	21,79%
2	ADHK 2010	PDRB Total	6.043.095,73	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.342.161,54	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	1.655.883,36
		Kontribusi	21,08%	22,10%	22,18%	22,15%	22,14%

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan tidak sejalan dengan perkembangan nilai ekspor yang cenderung fluktuatif, dari tahun 2015 sebesar 17,340 Juta US$, pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 19,081 Juta US$. Akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar 17,883 Juta US$. Tahun 2018 nilai ekpor kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 19,656 Juta US$. Hal ini berbeda dengan perkembangan nilai impor yang cenderung naik pada tahun 2015 – 2018 dan turun di tahun 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

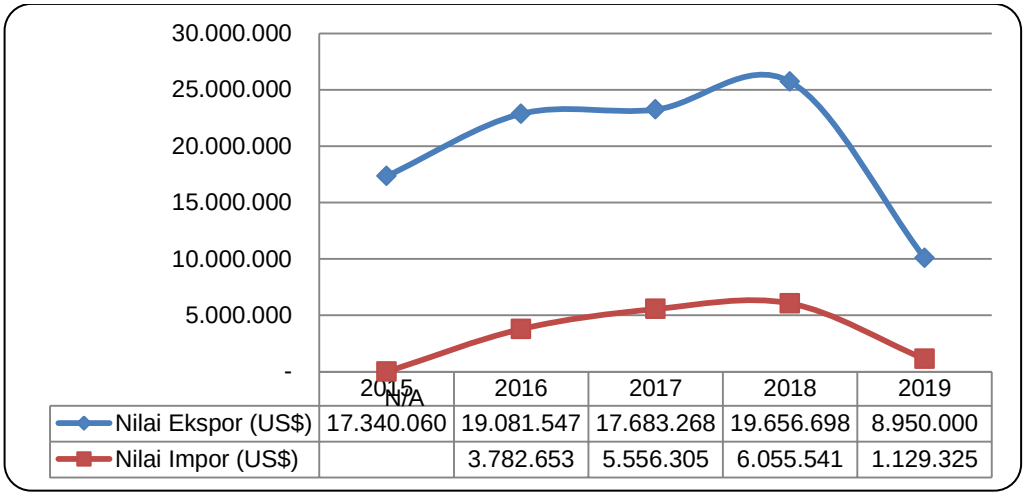

	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor (US$)	17.340.060	19.081.547	17.683.268	19.656.698	8.950.000
Nilai Impor (US$)	N/A	3.782.653	5.556.305	6.055.541	1.129.325

Gambar 2.45 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Dindagkop Kota Pekalongan, 2020

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami perkembangan. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4.570 unit dan di tahun 2018 penurunannya sebesar 4.327 unit, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4.640 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI				
	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	700	712	559	485	499
Industri Aneka (IA)	2.589	2.619	2.181	2.207	3.617
Industri Hasil Pertanian (IHP)	3.135	3.145	1.830	1.635	524
JUMLAH	**6.324**	**6.469**	**4.570**	**4.327**	**4.640**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.138 berikut.

Tabel 2.138 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	28.246,01	43.393,34	0	933,00	9.412,03
Industri Aneka (IA)	199.139,20	1.065.863,56	9.688,00	11.682,00	69.483,30
Industri Hasil Pertanian (IHP)	154.134,55	879.368,28	0	0	85.249,60
JUMLAH	381.519,76	1.988.625,18	9.688,00	12.615,00	164.144,93

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2020

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2015-2019 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.139 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Jenis industri	2015	2016	2017	2018	2019
Batik	861	878	760	770	781
Pakaian jadi dari tekstil	595	606	913	913	953
Pembekuan ikan	6	6	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	53	53	22	22	23
Penggaraman/Pengeringan Ikan	25	25	5	5	9
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	26	44	7	7	8
Pengolahan Teh dan Kopi	40	41	8	8	11
Pertenunan	149	151	31	31	34

Sumber : Dinperinaker, 2020

Tabel 2.140 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Jenis industri	2015	2016	2017	2018	2019
Batik	12.004	12.937	12.104	5.197	5.278
Pakaian jadi dari tekstil	5.726	6.751	5.630	5.849	6.047
Pembekuan ikan	50	50	30		
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	396	396	477	477
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	175	175	102	56	59
Penggaraman/Pengeringan Ikan	681	681	390	71	75
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	639	639	380	58	58
Pengolahan Teh dan Kopi	1.485	1.478	450	1.066	1.174
Pertenunan	4.040	4.055	760	595	595

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Tabel 2.141 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenis industri	2013	2014	2015	2016	2017
Batik	38.298	38.317	38.344	49.235	45.760
Pakaian jadi dari tekstil	26.830	27.604	27.604	33.540	25.750
Pembekuan ikan	406	406	406	406	215
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Pengasapan Ikan dan Biota	278	278	278	278	210

Jenis industri	2013	2014	2015	2016	2017
Perairan Lainnya					
Penggaraman/Pengeringan Ikan	1.218	1.218	1.218	1.218	560
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7.449	7.543	7.543	7.542	3.950
Pengolahan Teh dan Kopi	13.694	28.165	44.296	46.530	19.115
Pertenunan	32.845	33.040	33.040	33.533	7.250

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2019

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2015-2019 terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.677.230,21 Juta (21,56% dari total PDRB), dan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi Rp. 2.270.288,33 juta (20,87% dari total PDRB), meskipun secara persentase mengalami penurunan. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	7.778.271,61	8.507.535,11	9.287.961,80	10.114.282,24	10.873,976,04
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.677.230,21	1.822.761,67	1.968.839,49	2.148.020,97	2.270.288,33
	Kontribusi	21,56%	21,43%	21,20%	21,23%	20,87%
ADHK (2010)	PDRB Total	6.043.095,70	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477,425,04
	PDRB Perindustrian	1.302.422,46	1.356.596,75	1.415.641,58	1.478.741,06	1.550.360,71
	Kontribusi	21,55%	21,31%	21,11%	20,86%	20,73%

Sumber : Kota Pekalongan Dalam AngkaTahun 2020, 2020

2.1.3.4 Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.143 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	120	72	118	150	136

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2020

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu :

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat https://jdih.pekalongankota.go.id.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Tabel 2.144 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	**30**	14.49	15.05	19.95	24,42	24,53
2	Pengukuran Kinerja	**25**	9.14	9.48	10.39	17,07	17,54
3	Pelaporan Kinerja	**15**	8.52	9.65	8.56	10,46	11,09
4	Evaluasi Internal	**10**	4.08	4.31	5.12	7,24	7,29
5	Capaian Kinerja	**20**	8.66	9.04	11.71	11,69	12,14
	Nilai SAKIP	**100**	**44.89**	**47.53**	**55.73**	**70,88**	**72,59**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**C**	**CC**	**BB**	**BB**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah penggukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2019 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 83,99 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2019

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	83,01	Baik
2	Dinas Kesehatan	82,13	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	79,15	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	88,77	Sangat Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	81,34	Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja	93,01	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,34	Baik
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	84,87	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	85,22	Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	82,66	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlind Anak	80,56	Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	88,19	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	79,48	Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	87,9	Baik
15	Dinas Perhubungan	88,19	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	84,68	Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	76,67	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	80,99	Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	78,26	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	82,88	Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	73,24	Kurang Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	82,24	Baik
23	Badan Keuangan Daerah	89,07	Sangat Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	85,28	Baik
25	Sekretariat Daerah	86,15	Baik
26	Sekretariat DPRD	81,76	Baik
27	Inspektorat	79,07	Baik
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	78,97	Baik
29	Bagian Rumah Tangga Setda	92,22	Sangat Baik
30	Bagian Hubungan Masyarakat Setda	90,74	Sangat Baik
31	Bagian Organisasi	89,91	Sangat Baik
32	Bagian Umum Setda	86,55	Baik
33	Bagian Hukum	85,42	Baik
34	Bagian PBJ dan PP	84,24	Baik
35	Bagian Perekonomian	83,71	Baik
36	Kecamatan Pekalongan Utara	87,27	Baik
37	Kecamatan Pekalongan Selatan	87,94	Baik
38	Kecamatan Pekalongan Barat	84,92	Baik
39	Kecamatan Pekalongan Utara	87,27	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	83,99	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2019

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekaongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
	Total Komponen pengungkit (A)	**60,00**	**36,11**	**35,32**
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**30,33**	**33,65**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**66,44**	**68,97**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2019, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak 16 Raperda yang terdiri dari 4 Raperda inisiatif dan 12 Raperda usulan Walikota.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak 7 Perda, terdiri dari 1 Perda inisiatif dan 6 Perda usulan Walikota.

2.1.3.5 Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja urusan perencanaan Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2012 - 2016 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pantura, yaitu : Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. Capaian lainnya adalah terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pada 82 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk kelurahan. Terhitung 1 Januari 2015, terdapat penggabungan kelurahan, dari 47

kelurahan menjadi 27 kelurahan sehingga jumlah PD tahun 2015 menjadi 62 PD. Capaian selanjutnya adalah pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), dalam bentuk Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan (jangka panjang) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (jangka menengah) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan periode ke-3 RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Namun pada tahun 2018 dilakukan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Walikota. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global, nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Profil Emisi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2018, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 3.052 orang, kemudian bertambah menjadi 3.142 orang di tahun 2019. Penambahan jumlah ASN dikarenakan adanya rekrutmen Calon ASN/CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan mulai bekerja di tahun 2019.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.147 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

Jabatan	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	20	6	26	22	6	28
Eselon III	76	39	115	69	34	103
Eselon IV	222	158	380	216	156	372
Fungsional Umum	636	291	972	681	406	1.087
Fungsional Tertentu	558	1.046	1.604	538	1.014	1.552
Jumlah Total	**1.512**	**1.540**	**3.097**	**1.526**	**1.616**	**3.142**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

Jabatan	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana/ doktor/ Ph.d	758	1.092	1.850	803	1.171	1.974
Diploma III/ Sarjana Muda	132	194	326	140	218	358
Diploma I, II	28	21	49	24	16	40
SMA/ Sederajat	395	224	619	383	202	858
SLTP/ sederajat	107	8	115	101	8	109
SD	92	1	93	75	1	76
Jumlah Total	**1.512**	**1.540**	**3.052**	**1.526**	**1.616**	**3.142**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Upaya lain yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan Sistem Merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP No. 11 tahun 2017 yaitu :

a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Diklat	2015	2016	2017	2018	2019
Teknis	205	250	455	350	366
Fungsional	123	206	231	285	166
Kepemimpinan	4	35	5	52	8
Prajabatan	140	65	2	3	251

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat prajabatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya pengangkatan CPNS pada tahun 2018 sejumlah 251 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan dan penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja daerah pada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan – kebijakan.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

(1) mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
(2) meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;

(3) mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015 – 2019 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika. Pada tahun 2019 beberapa kasus tindak kejahatan mengalami kenaikan, diantaranya penganiayaan, pencurian dan penipuan. Sedangkan kasus narkotika dan psikotropika mengalami penurunan. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tindak Kejahatan	2015	2016	2017	2018	2019
Pembunuhan	9	0	0	1	0
Pemerkosaan	2	1	0	2	0
Penganiayaan	17	1	1	6	7
Pencurian	33	47	25	45	71
Penipuan	13	18	0	11	19
Penadahan	0	2	2	0	0
Narkotika dan Psikotropika	17	31	3	50	44

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.142 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2.151 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kasus Konflik Sosial	34	14	1	2	1

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu pada tahun 2016 dan 2017 tidak dilakukan kegiatan pembinaan politik karena pada tahun tersebut tidak ada pemilihan umum di Kota Pekalongan.

Tabel 2.152 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	32	0	0	32	32

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2018 telah diadakan pemilihan Gubernur Jawa Tengah dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 64%.

Tabel 2.153 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

JENIS PEMILIHAN UMUM	2015	2016	2017	2018	2019
Pemilu Kepala Daerah (Walikota)	73,37%	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur)		-	-	64,00%	-
Pemilu Presiden		-	-	-	85,88%
Pemilu Legislatif		-	-	-	85,51%

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2014-2019 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2015-2019 masing-masing sebanyak 1 kali pada tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019. Sedangkan di tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali.

Tabel 2.154 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	2	1	1

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.

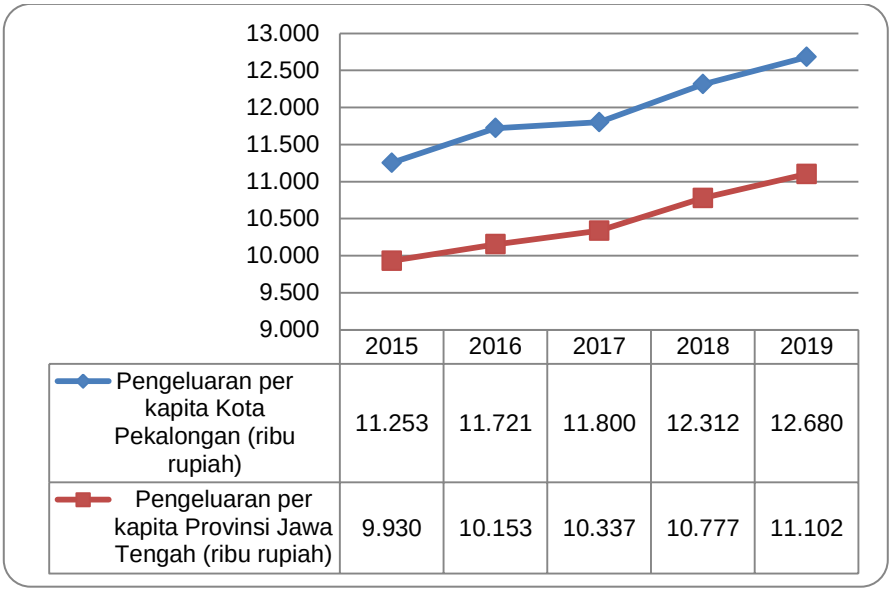

	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran per kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	11.253	11.721	11.800	12.312	12.680
Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah)	9.930	10.153	10.337	10.777	11.102

Gambar 2.46 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, BPS Kota Pekalongan, 2019

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2015-2019. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.253.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.721.000 pada tahun 2016. Di tahun 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000. Gambar 2.39 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Di Kota Pekalongan, jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2015 sampai 2019 jumlanya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Kondisi selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.155.

Tabel 2.155 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2015	148,28	171.863	0,0009
2016	155,44	182.944	0,0008
2017	155,44	147.135	0,0008
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu dari 856.944 penumpang menjadi 956.797 penumpang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 4.648 penumpang sehingga menjadi 952.149 penumpang. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut.

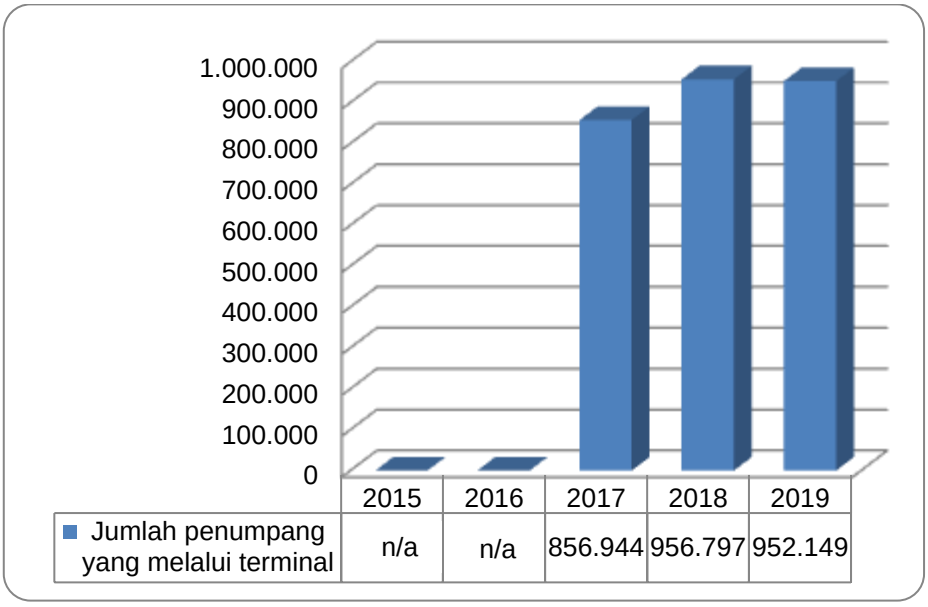

Gambar 2.47 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.

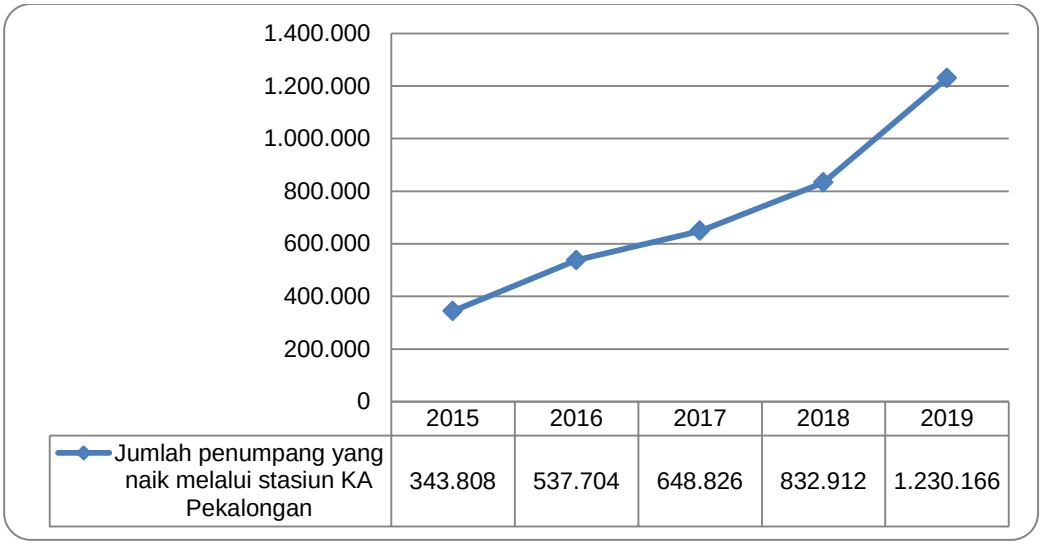

Gambar 2.48 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperi yang terlihat pada Gambar 2.48. Tahun 2015 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 343.808 penumpang. Dalam kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2019 sebanyak 1.230.166 penumpang. Hal ini disebabkan saat ini PT. Kereta Api Indonesia telah menyediakan tambahan berbagai rute perjalanan, penambahan armada kereta api dan jadwal keberangkatan kereta, serta peningkatan kualitas layanan.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100% terlayani. Pada tahun 2014, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 76,14%, sampai dengan tahun 2016 terus meningkat, namun pada tahun 2017 menurun, dan meningkat kembali dengan kondisi akhir di tahun 2018 sebesar 86,17%. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.49 berikut.

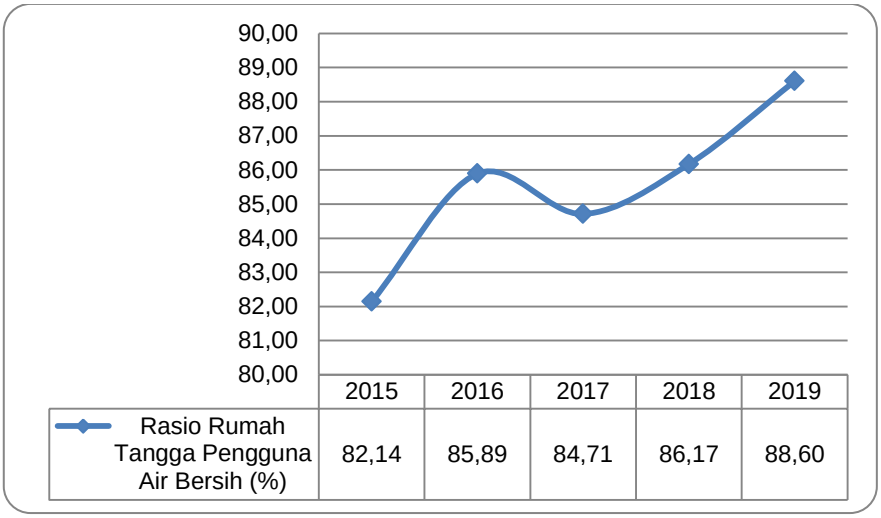

Gambar 2.49 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2019

Di Kota Pekalongan, layanan air bersih disediakan oleh PDAM dan Pamsimas. Pada tahun 2019, jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan PDAM dengan air bawah tanah sebanyak 22.160 SR, sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan Pamsimas dan sumur (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 21.933 SR. Dengan demikian total SR yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2019 sebanyak 44.093 SR. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebanyak 307.097 jiwa, jika diasumsikan bahwa 1 SR digunakan untuk 5 orang maka total kebutuhan SR untuk seluruh penduduk yaitu sebanyak 61.419 SR. Sehingga persentase sambungan rumah (SR) yang menggunakan air bawah tanah sebesar 71,79%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019

Tahun	SR dari PDAM	SR dari PAMSIMAS dan Sumur	Jumlah SR pengguna air bawah tanah	Jumlah kebutuhan SR	Persentase penggunaan air tanah untuk kebutuhan sambungan rumah
2019	22.160	21.933	44.093	61.419	71,79%

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2014 sebesar 247,12 MWh, maka pada akhir tahun 2018 sebesar 271,18 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2014-2018.

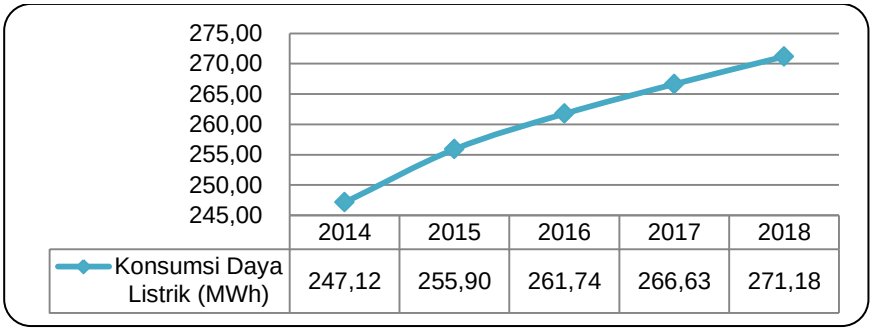

Gambar 2.50 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, 2019

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2015-2019 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2015 sebesar 110,75%. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44% pada tahun 2019. Secara lengkap disajikan dalam tabel 2.157 berikut.

Tabel 2.157 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2015	81.529	73.613	110,75
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2019

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi rata-rata sebesar 50%-70%, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 telah dibangun 3 (tiga) hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang *representative* salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.158 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Akomodasi	2015	2016	2017	2018	2019
Hotel Berbintang	8	9	10	10	10
Hotel Non Berbintang	21	22	18	20	20

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2018, telah dibuka layanan perijinan untuk 83 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-12 menit. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 16 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2020

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam grafik berikut.

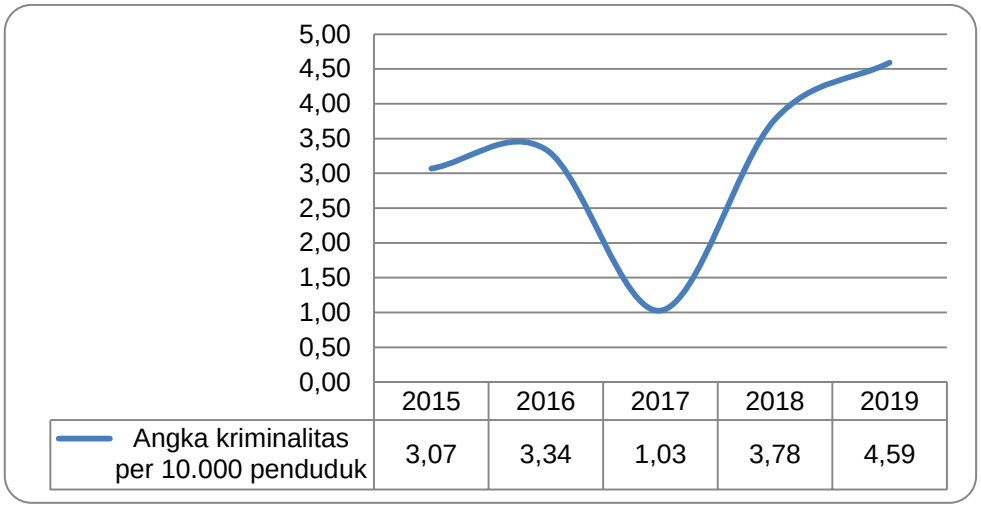

	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,07	3,34	1,03	3,78	4,59

Gambar 2.51 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

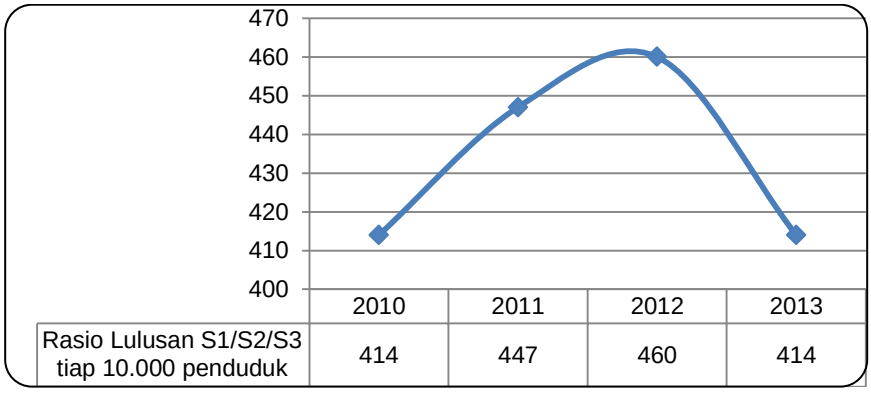

	2010	2011	2012	2013
Rasio Lulusan S1/S2/S3 tiap 10.000 penduduk	414	447	460	414

Gambar 2.52 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Sumber : BPS, 2014 diolah

Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.52.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2015 – 2019 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 43,77 dan pada tahun 2019 menjadi 42,37.

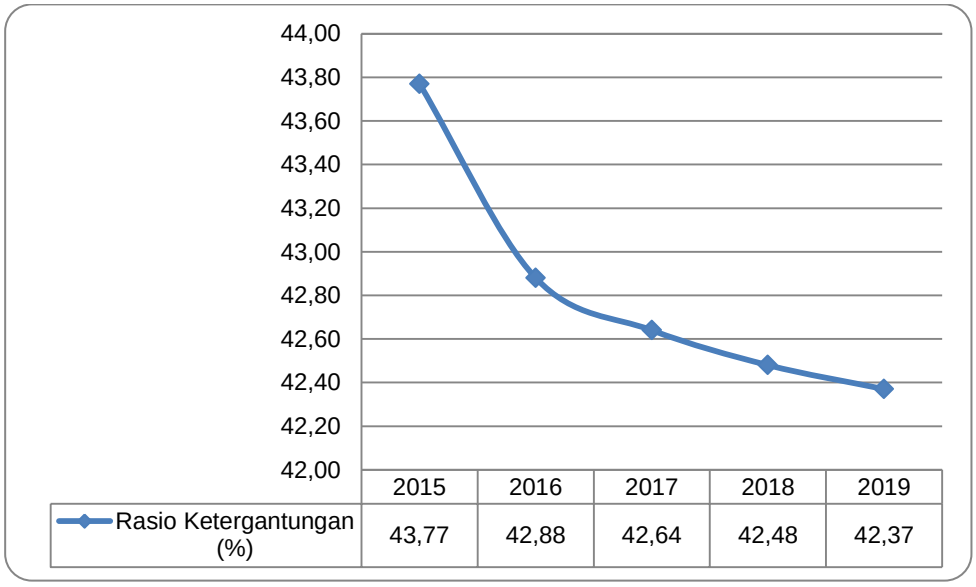

Gambar 2.53 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2020

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.53.

2.1.4.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Inovasi sebagai salah satu daya ungkit bagi penyelenggaraan Pemerintahan terus didorong baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah, dimana regulasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2018, beberapa SIM/aplikasi dibangun/dikembangkan sebagai bentuk inovasi tata kelola, antara lain sebagai berikut :

a. Penambahan fitur peta lokasi pada SIMRAL (SIM Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi). Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan menjadi objek pembangunan, misalnya lokasi pembangunan jalan. Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

b. Penambahan fitur evaluasi pada SIMRAL. Fitur ini berfungsi untuk mendukung SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

c. Pembangunan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City*. Aplikasi ini berbasis android, berisikan berbagai macam aplikasi yang telah dibangun sebelumnya (baik aplikasi untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun aplikasi untuk layanan publik), serta fitur-fitur baru yang dikembangkan. Dengan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* ini semua informasi yang berkaitan dengan Kota Pekalongan dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah.

d. Pembangunan aplikasi PUSAKA. Aplikasi ini merupakan salah satu wujud dari pengelolaan satu data terpadu Kota Pekalongan. Dengan SIM/aplikasi diharapkan dapat menjadi portal pengelolaan satu data terpadu, sehingga tidak ada lagi perbedaan data atas jenis data yang sama. Selain itu, data yang ada nantinya akan dapat diolah dan diintegrasikan.

e. Integrasi data pendidikan. Integrasi ini mencakup data pendidikan Kota, Kemenag, dan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan data siswa yang merupakan penduduk Kota Pekalongan, sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan, misalnya pemberian beasiswa agar tepat sasaran.

Inovasi tata kelola lainnya adalah pengendalian administrasi kegiatan, yaitu dengan membubuhkan paraf pengendali program (Kepala Bidang) di lembar A2. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya, dimana Kepala Bidang tidak melakukan pengecekan terhadap administrasi kegiatan, yang secara otomatis tidak dapat mengendalikan program sepenuhnya. Atas dasar itulah maka mulai tahun 2019 Kepala Bidang sebagai pengendali program harus membubuhkan paraf sebagai bukti telah mengecek administrasi kegiatan.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya

dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

a. P21 (Puskesmas 21) atau Pusdalu (Puskesmas Buka Sampai Dalu). Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggot dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari.
b. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dibuka 6 hari (senin-sabtu). Pada dasarnya hari kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 5 hari kerja (Senin-Jumat). Namun demikian layanan kependudukan dan pencatatan sipil dibuka sampai hari Sabtu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya percepatan untuk mencapai target kinerja Dindukcapil.
c. Pendaftaran rawat jalan via SMS di RSUD Bendan. Semenjak BPJS diwajibkan bagi semua layanan kesehatan, jumlah pasien meningkat cukup siginifikan, termasuk pasien rumah sakit. Bahkan pasien rawat jalan di RSUD Bendan harus mengantri sejak pagi sebelum loket pendaftaran dibuka. Merespon hal ini, pihak RSUD membuat inovasi berupa layanan pendaftaran melalui SMS. Calon pasien tidak perlu lagi mengantri untuk mendaftar, bahkan dapat mengetahui nomor antrian yang sedang dilayani.
d. Aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* berbasis android. Aplikasi ini tidak hanya memuat layanan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga menyediakan portal layanan informasi publik seperti kesehatan, pendidikan, SPBU, ATM dan Bank, kuliner, property, hotel dsb. Dengan layanan ini masyarakat dimudahkan dengan ketersedian berbagai informasi dalam satu aplikasi.
e. SMS LBA (*Location Based Advertising*). Merupakan metode pengiriman SMS dengan memanfaatkan informasi lokasi keberadaan telepon seluler sesuai cakupan BTS provider. Inovasi ini dilakukan dalam rangka merespon adanya jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Pekalongan dimana para pengendara tidak lagi masuk ke Kota Pekalongan. Untuk menarik minat para pengendara tersebut, digunakan SMS LBA berisi berbagai informasi yang disebarkan kepada pengguna ponsel sebelum masuk Kota Pekalongan. Dengan strategi ini diharapkan para pengguna jalan akan transit di Kota Pekalongan untuk menikmati wisata dan berbagai layanan lainnya.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Pemerintah Kota Pekalongan tidak hanya dituntut menciptakan inovasi dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, tetapi juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2019, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.160 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	"Shoot!" Kaos Anti Radiasi dan Kaos Augmented Reality	M. Khoirul Lutfi	Inovasi yang menggabungkan dunia fashion dan teknologi informasi, dengan memanfaatkan smatphone dan sentuhan teknologi

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
			augmented reality, gambar pada kaos yang statis bisa bergerak.
2.	Membuat Strain Baru Ikan Hias Guppy dan Cupang Sendiri yang Berkualitas Ekspor	Aji Putranto	Menghasilkan strain ikan yang baru dan berkualitas melalui persilangan persilangan ikan guppy dan ikan cupang
3.	Pengolahan Limbah Cair Sistem Koagulasi dan Biosand Berbasis Home Industri	Anaf Uliany, dkk	Alat teknologi ini memecah ikatan kimia yang komplek menjadi lebih sederhana sehingga tidak berbahaya ketika dibuang di sungai karena mampu menyisihkan TSS mencapai 95 persen. Material banyak tersedia di toko dan bahkan dapat dibuat sendiri.
4.	Alat Pembersih Biji Milet untuk Pakan Burung	Khusnawan, ST.	Alat ini dapat dapat melakukan proses pemisahan biji milet dengan kotoran lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara ditawu/diawur.
5.	Art & Furniture Limbah Ranting Pohon	Muchidin, dkk.	Limbah ranting pohon dimanfaatkan oleh perajin kriya menjadi barang kerajinan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2020

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.161 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	IAIN Walisongo Pekalongan	Desember 2019	111	836	33	980
2.	Universitas Pekalongan	September 2019	65	471	-	536
3.	STMIK Widya Pratama	Oktober 2019	46	155	-	201

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2020

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di

Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

2.2. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019, SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*). Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019 ditunjukkan dengan capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan.

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2019

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Pekalongan pada Tahun 2019 diukur berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Capaian Sasaran yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama tercapai cukup baik, dimana 18 dari 23 indikator telah tercapai. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel 2.163 berikut :

Tabel 2.163 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Uraian	Indikator Sasaran				
	Jumlah	Tercapai		Tidak Tercapai	
		Jml	%	Jml	%
Misi I	2	1	50,00	1	50,00
Misi II	9	6	66,67	3	33,33
Misi III	2	2	100,00	-	-
Misi IV	6	5	83,33	1	16,67
Misi V	1	1	100,00	-	-
Misi VI	3	3	100,00	-	-
Jumlah	**23**	**18**	**78,26**	**5**	**21,74**

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Adapun capaian sasaran (IKU) per Misi dapat diuraikan sebagai berikut.

Misi I : Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, dengan 1 (satu) indikator sasaran tercapai (50 %) dan 1 (satu) indikator sasaran tidak tercapai (50%). Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.164 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Angka partisipasi sekolah	97,00%	99,40	97,13	Tercapai	▼
2	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	52,00	43,10	49,16	Tidak Tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs. Angka Partisipasi Sekolah diukur dengan jumlah anak sekolah pada jenjang dimaksud di Tahun 2019 (57.650 siswa) dibagi dengan Jumlah penduduk umur 5-15 tahun Tahun 2019 (59.352 orang) dikali X 100.

Secara *series*, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenanangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel 2.161 berikut :

Tabel 2.165 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan

Uraian	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Sekolah	96,32	99,40	97,13

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

2. Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan akreditasi oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang kepada Standar Nasional Pendidikan.

Sampai dengan tahun 2019 sejumlah sekolah dari jenjang TK/ RA sampai dengan SMP/ MTs telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.166 Akreditasi Sekolah

No	Jenjang	Akreditasi				Jumlah Sekolah
		A	B	C	Belum	
1	TK	8	57	0	19	84
2	SD	67	32	1	2	102

No	Jenjang	Akreditasi				Jumlah Sekolah
		A	B	C	Belum	
3	SMP	21	6	0	1	28
4	RA	10	16	0	0	26
5	MI	35	11	0	1	47
6	MTs	5	5	0	0	10
	Juml Sekl per Akreditasi	146	127	1	23	297
Persentase (jml sekl per akreditasi/ jumlah sekolah all*100%		49,16	40,07	0,34	13,13	100,00

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, target penyelengaraan Pendidikan Berakreditasi A sebesar 52 % belum tercapai. Hal ini disebabkan kuota dan prioritas dari lembaga akreditasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dan Badan Akreditasi Madrasah (BAM) hanya untuk sekolah dan madrasah yang telah kadaluarsa akreditasinya. Pada Tahun 2019 jumlah sekolah/madrasah yang memperoleh akreditasi sebanyak sekolah/madrasah yang kadaluarsa yaitu 21 sekolah/madrasah. Dengan demikian Kota Pekalongan tidak dapat menambah kuota untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Pencapaian misi 2 diukur dengan 9 (Sembilan) indikator sasaran dengan pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2019 adalah 5 (lima) indikator yang tercapai (55,55 %), 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai (33,33%) dan 1 (satu) indikator yang belum tersedia data (11,11%). Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.167 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Usia Harapan Hidup	74,32	74,25	74,28	Tidak tercapai	▲
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	6,13	5,77	Tidak tercapai	Angka ▼ semakin baik
3	Persentase Penurunan PMKS	8,78	10,40	12,83	Tercapai	▲
4	Kategori Evaluasi AKIP	B	BB	BB	Tercapai	●
5	Tingkat kematangan implementasi SPIP	2,75	3,02	3,02	Tercapai	▲
6	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	WTP	Tercapai	n/a
7	Indeks Profesionalitas ASN	84,00	82,26	60,54	Tidak tercapai	▼
8	Persentase PD dengan IKM baik	93,55	43,94	93,94	Tercapai	▲
9	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00	74,19	67,74	Tercapai	▼

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup

Indikator usia harapan hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Indikator tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap tahun sebagai bagian dari Komponen Indeks Pembangunan Manusia. Angka Usia Harapan Hidup sedikit lebih rendah dari target RPJMD tahun 2019 sebesar 74,32. UHH Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar 74,28 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dibandingkan capaian di Tahun 2018.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,36% dari angka 6,13% di tahun 2018 menjadi 5,77% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan upaya pengurangan pengangguran terbuka telah menunjukan arah yang positif. Namun demikian, mengingat angka tersebut masih belum mencapai target di Tahun 2019 yakni sebesar 3,70% dan nilai tersebut masih cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka masih perlu usaha yang lebih maksimal untuk mengatasi pengangguran di Kota Pekalongan.

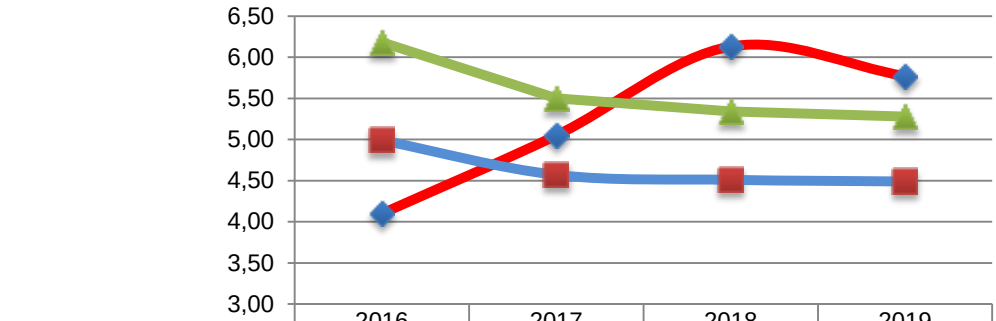

	2016	2017	2018	2019
Kota Pekalongan (%)	4,10	5,05	6,13	5,77
Provinsi Jawa Tengah (%)	4,99	4,57	4,51	4,49
Nasional (%)	6,18	5,50	5,34	5,28

Gambar 2.54 Perbandingan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

3. Persentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Persentase penurunan PMKS Tahun 2019 adalah negatif (-) dari jumlah PMKS tahun 2019 (5. 376) dikurangi jumlah PMKS tahun 2018 (6.167) dibagi jumlah PMKS Tahun 2018 (6.167) atau terjadi penurunan sebesar 12,83 %.

Persentase Penurunan PMKS pada tahun 2019 ini yang lebih banyak dibandingkan persentase di Tahun 2018 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian target tersebut.

4. Kategori Evaluasi AKIP

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/680/AA.05/2019 tanggal 30

Desember 2019, Kota Pekalongan memperoleh nilai 72,59 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.168 Hasil Penilaian SAKIP Kota Pekalongan

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09
4	Evaluasi Internal	10	7,24	7,29
5	Capaian kinerja	20	11,69	12,14
	Hasil Evaluasi	100	70,88	72,59
	Predikat		BB	BB

Sumber : Kemenpan-RB, 2020

5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Pencapaian target indikator kinerja Tingkat Maturitas implementasi SPIP pada Level 3 dengan skor 3,022, atau pada tingkat maturitas “terdefinisi”, menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan praktik pengendalian *intern* dan terdokumentasi dengan baik serta semakin efektifnya pelaksanaan rancangan pengendalian *intern* yang ada di masing-masing SKPD dan rancangan pengendalian *intern* di Pemerintah Kota Pekalongan.

Capaian target sasaran strategis Tingkat Maturitas implementasi SPIP Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 tercapai sebesar 110% atau kategori Sangat Baik, diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama “Level Maturitas SPIP” yaitu dengan membandingkan target yang ingin dicapai yaitu Level 3 Dengan Catatan (DC) dengan *score* 2,5 dan berdasarkan hasil *Quality Asurance* (QA) BPKP yang menjamin hasil Penilaian Mandiri (*Self Asessment*) oleh APIP Inspektorat Kota Pekalongan dengan nilai 3,02 atau pada level Maturitas SPIP Level 3 Penuh.

Keberhasilan pencapaian target tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung sebagai berikut :

- Pembinaan kepada OPD juga dengan menyusun regulasi/pedoman/SOP penyelenggaraan SPIP di tingkat kota maupun OPD, antara lain Pedoman Pemantauan Perkembangan/Maturitas SPIP, Pedoman Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tk. OPD, Pedoman Penyusunan RTP dan Penilaian Risiko.
- Pembinaan dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP pada tahun 2019, pelaksanaan bimbingan teknis kepada Satuan Tugas SPIP pada setiap Perangkat Daerah dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Monitoring implementasi SPIP pada OPD melalui Pemeriksaan Reguler (Komprehensif) yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Pekalongan kepada PD.
- Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dengan menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan SPIP dan melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD di lingkungan Pemerintah

6. Opini BPK Atas LKD

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh rangkaian proses pengelolaan (sosialisasi, rekonsiliasi, asistensi dan lain-lain) keuangan dan *asset* daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Proses ini disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang disusun sampai dengan 31 Maret 2020 oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan akhirnya hasil penilaian kinerja tersebut dirilis Kementerian Keuangan pada Bulan Juli 2020.

Merujuk pada serangkaian proses tersebut, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini WTP untuk yang kelima kali tersebut merupakan usaha dan proses perencanaan-penganggaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan secara maksimal dan akuntabel melalui :

a. Komitmen dari semua elemen dari Kepala Daerah hingga staf penyusun LK OPD.
b. *Reward and punishment* yang tegas.
c. Rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan *asset* daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali.
d. Sosialisasi pengelolaan keuangan dan *asset* daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah.
e. Asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran.
f. Penyusunan LKD tepat waktu
g. Kualitas laporan sesuai standart
h. SIMKEU dan SIMBADA tidak ada kendala dan memadai
i. SDM yang kompeten
j. Data Laporan Neraca Aset Tetap OPD dikirim tepat waktu

7. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018 sebesar 82.26, dan pada tahun 2019 turun signifikan menjadi 60.54. Hal ini disebabkan karena :

a. Penggunaan parameter penilaian yang berubah. Pada saat pentargetan RPJMD menggunakan parameter pejabat struktural, namun pengukuran pada tahun 2019, Kemenpan RB RI melakukan penilaian untuk seluruh ASN;
b. Kualifikasi Pendidikan mempengaruhi hasil nilai Indeks Profesionalitas ASN, karena di Pemerintah Kota Pekalongan masih ada yang berpendidikan rendah (SD, SMP);
c. Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN, menggunakan indikator diklat yang diikuti ASN dalam satu tahun terakhir.

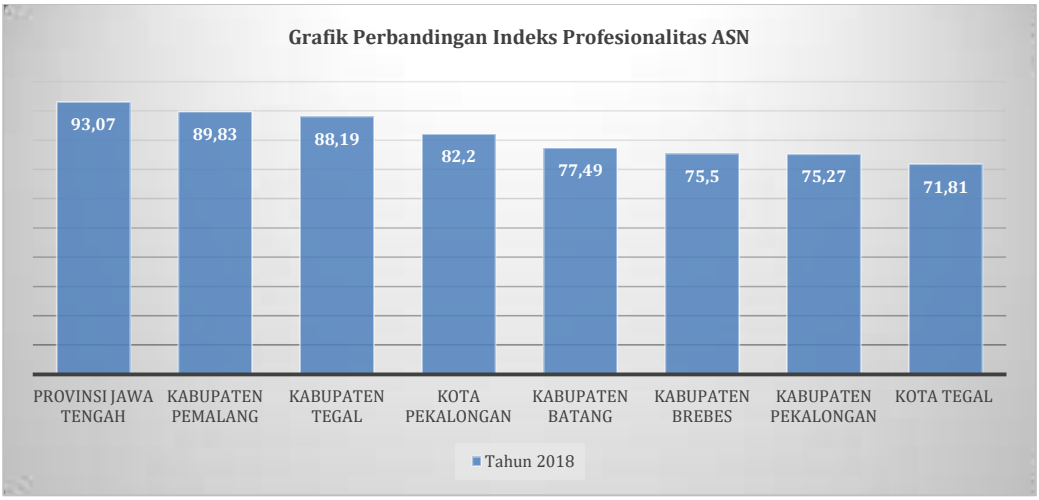

Gambar 2.55 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2020

Dilihat dari Gambar diatas, bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Pekalongan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi apabila dibandingkan dengan daerah se Eks-Karesidenan Pekalongan Indeks Profesionalitas ASN Kota Pekalongan ada pada urutan ke - 3 dari 7 Kabupaten/ Kota.

Di tahun-tahun mendatang, upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Mengikut sertakan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengikuti diklat.
- Memberikan kesempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S-1.

8. Persentase PD Dengan IKM Baik

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu tahun sekali. Adapun unsur yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Pada tahun 2019, dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri pada 66 (enam puluh enam) OPD/ Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil pengukuran terdapat 7 (tujuh) OPD/ Unit Kerja dengan kategori ”Sangat Baik”, 55 (lima puluh lima) OPD/ Unit Kerja dengan kategori ”Baik” dan 6 (enam) OPD/ Unit Kerja dengan kategori ”Kurang Baik”, dengan rata-rata nilai IKM Kota Pekalongan sebesar 82,21.

Dari data hasil survei kepuasan masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 66 (enam puluh enam) OPD/ Unit Kerja yang disurvei , sebanyak 62 (enam puluh dua) OPD/ Unit Kerja mendapatkan kategori minimal ”Baik”, sehingga persentase Perangkat Daerah/ Unit Kerja dengan minimal kategori baik adalah sebesar 93,94%.

9. Persentase OPD Dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (informatif)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo telah memberikan layanan akses keterbukaan informasi publik pada OPD secara bertahap. Seluruh OPD telah melakukan publikasi dokumen-dokumen yang berisi informasi publik melalui web ppid.pekalongankota.go.id. Harapannya seluruh OPD nantinya akan memperoleh predikat minimal ”baik/informatif” atas layanan keterbukaan informasi publik di Tahun 2021.

- Pada tahun 2018, dari 31 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebanyak 8 OPD (25,81 %) telah memperoleh predikat ”sangat baik” dan 15 OPD (38,39 %) memperoleh predikat baik, sehingga capaiannya Nilai KIP minimal baik adalah sejumlah 74,19 %.
- Pada tahun 2019, dari 31 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebanyak 9 (29,03%) OPD telah memperoleh predikat ”sangat baik” dan 12 (38,71%) memperoleh predikat baik, sehingga capaiannya Nilai KIP minimal baik adalah sejumlah 67,74 %.

Tabel 2.169 Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018-2019

Kategori KIP	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Baik	8	25,81%	9	29,03%
Baik	15	48,39%	12	38,71%
Cukup Baik	7	22,58%	7	22,58%
Kurang Baik	1	3,23%	3	9,68%

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Misi III : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Pencapaian misi 3 diukur dengan 2 (Dua) indikator sasaran, dengan target 2 (dua) indikator sasaran tercapai 100%. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,70	4,46	4,84	tercapai	▲

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
2	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40	5,82	5,72	tercapai	▼

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Salah satu penyumbang PDRB Kota Pekalongan adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan rilis BPS (28 Februari, 2020), Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Tahun 2019 tumbuh sebesar 4,84 % (naik dari laju di tahun 2018 sebesar 4,46 %). Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan RPJMD untuk pertumbuhan PDRB Sektor industri Pengolahan Tahun 2019.

2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Pertumbuhan Sektor perdagangan dan jasa terdiri dari pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ditambah pertumbuhan sektor Jasa Lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019, dapat diketahui data PDRB dan pertumbuhan kedua sektor tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.171 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019

Kategori	Nilai PDRB 2017 (Juta rupiah)	Nilai PDRB 2018 (Juta Rupiah)	Nilai PDRB 2019 (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2018 (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2019 (%)
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	5,53	5,47
RSTU. Jasa Lainnya	123.313,75	133.293,88	145.310,96	9,02	8,47
Jumlah Perdagangan dan Jasa	**1.530.738,75**	**1.621.065,60**	**1.715.383,99**	**5,82**	**5,72**

Sumber data : Badan Pusat Statistik (diolah), 2020

Misi IV : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Pencapaian misi 4 diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran, dengan realisasi pada Tahun 2019, Adapun capaian indikator sasaran pada Tahun 2019 terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tercapai (83,33%) dan 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai (16,67%). Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.172 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54	29,56	23,36	Tidak tercapai	▲
2	Cakupan layanan sarpras permukiman perkotaan	87,88	86,75	88,17	tercapai	▲
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	1,03	1,9	0,39	tercapai	Angka ▼ semakin baik
4	Rasio kapasitas jalan (VC Ratio)	0,84	0,39	0,45	tercapai	▲
5	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	71,40	62,86	71,43	tercapai	▲
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,67	52,85	52,92	tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Luas Wilayah Genangan Banjir dan Rob

Indikator Persentase luas Kawasan terdampak rob dan banjir adalah indikator yang menggambarkan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi kawasan yang terdampak banjir dan rob. Indikator ini dihitung berdasarkan data sebagai berikut :

- Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 hektar.
- Kondisi awal luas genangan rob 1.920 hektar.
- Pada tahun 2019 luas genangan yang tersisa adalah 1.057 hektar
- Realisasi capaian kinerjanya adalah (1.057/4.525)*100% = 23,36%

Adapun wilayah yang masih terdampak genangan banjir dan rob dapat dilihat pada gambar 2.56 berikut.

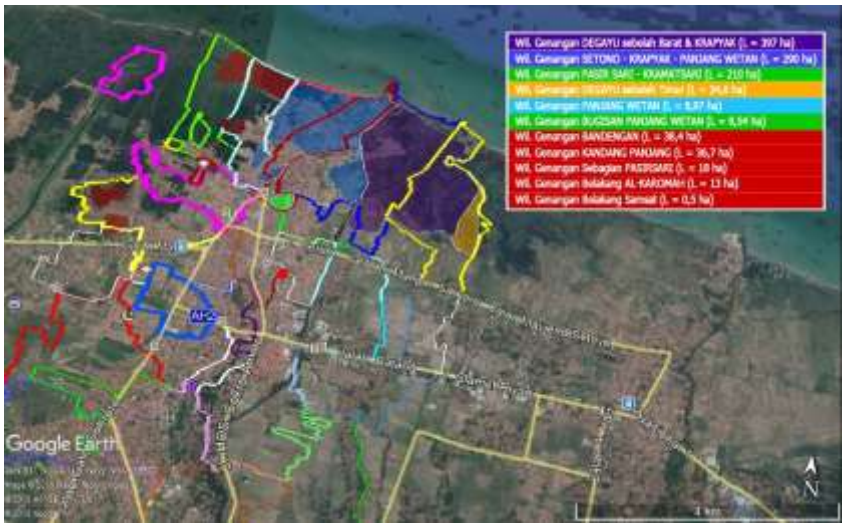

Gambar 2.56 Peta Genangan di Kota PekalonganTahun 2019

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

2. Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan

Cakupan Sarpras Permukiman Perkotaan adalah rata-rata dari Cakupan Layanan Persampahan, Rasio Akses Air Minum terhadap Jumlah Penduduk, Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Cakupan Jalan dan Jembatan Permukiman. Berikut ini adalah capaian sarana prasarana permukiman perkotaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 2.173 Persandingan Cakupan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan Tahun 2018 dan 2019.

No	Cakupan Sarpras Permukiman Perkotaan	2018	2019
1	Cakupan Layanan Sampah	86,27	86,30
2	Cakupan Akses Air Minum terhadap Jumlah Penduduk	88,50	88,24
3	Cakupan Layanan pengeloaan Limbah Domestik	97,82	99,32
4	Cakupan Jalan dan Jembatan Permukiman dalam kondisi baik	74,40	78,85
Cakupan layanan Sarpras Permukiman Perkotaan		86,75	88,17

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Luasan kawasan kumuh berdasarkan kondisi awal kondisi kumuh sampai dengan 2017 (Ha), yang telah diverifikasi dan disampaikan ke Kementerian yakni sebesar 195,59 Ha, dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Penanganan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2019

Nama Kelurahan	Luas Kumuh (Awal 2017)	Luas Pengurangan Kumuh			Total Penanganan s.d 2019	Sisa Kumuh s.d 2019
		2017	2018	2019		
Padukuhan Kraton	30,84	9,95	10,83	5,31	26,09	4,75
Bandengan	23,92	3,32	15,28	2,95	21,55	2,37
Panjang Baru	40,85	6,27	20,78	11,08	38,13	2,72
Panjang Wetan	13,85	5,52	6,06	1,84	13,42	0,43
Krapyak	11,90	7,18	4,02	0,30	11,50	0,40
Kandangpanjang	28,22	5,53	18,99	0,56	25,08	3,14
Tirto	3,70	0,47	0,24	2,06	2,77	0,93
Poncol	9,21	3,05	4,29	1,67	9,01	0,20
Pasirkratonkramat	22,46	2,83	17,25	0,00	20,08	2,38
Banyurip	6,78	0,80	5,73	0,00	6,53	0,25
Klego	2,89	0,29	2,60	0,00	2,89	0,00
Degayu	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
Jenggot	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
Grand Total	**195,59**	**45,21**	**107,04**	**25,77**	**178,02**	**17,57**

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Secara ringkas, perhitungan persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut :

- Luasan kawasan kumuh adalah 195,59 hektar
- Persentase luasan kawasan kumuh = (155,82 – 178,02)/4525*100% = 0,39%

4. Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)

VC *Ratio* adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut, nilai v/c *ratio* ditentukan dalam desimal misal 0,8 atau 1,2 jika nilai v/c *ratio* kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar, jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya ,dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet. Secara umum dikatakan adalah rasio atau perbandingan antara volume dengan kapasitas suatu jalan raya, semakin kecil VC *Ratio* maka semakin bagus tingkat pelayanan jalan.

Tabel 2.175 Data Hasil Survei VC Ratio Jalan Nasional Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Nama Jalan	Panjang (M)	Kapasitas	Volume	V/C	Tingkat Pelayanan
1	Jl. Dr. Setia Budi	176	3784	3216	0,85	C
2	Jl. Dr. Sutomo	2446	5702	1978	0,35	B
3	Jl. Gajah Mada	2485	5246	2250	0,43	B
4	Jl. Jendral Sudirman	1522	4128	2270	0,55	B
5	Jl. KH. Mas. Mansyur	1080	4309	2028	0,47	B
6	Jl. Merdeka	500	3653	2105	0,58	B
7	Jl. Pemuda	210	3430	2108	0,61	C
8	Jl. Slamet	997	2323	629	0,27	B
9	Jl. Sriwijaya	719	3183	748	0,23	B
10	Jl. Wilis	593	4234	727	0,17	A
V/C Ratio rata-rata		**0,45**				

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Nilai v/c *ratio* ditentukan dalam desimal, nilai v/c *ratio* kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar , jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya ,dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a) Memaksimalkan Fungsi ATCS (*Area Traffic Control System*).
b) Beroperasinya ruas tol Pemalang – Pekalongan – Batang - Semarang.

5. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pada Ruang Publik Kreatif (Taman Bahagia)

Jumlah Komponen Sarana Prasarana yang dipenuhi pada 6 lokasi pada sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 35 komponen. Pada tahun 2016 telah dibangun 5 komponen, tahun 2017 sebanyak 10 komponen, tahun 2018 sebanyak 7 komponen dan tahun 2019 sebanyak 3 komponen. Komponen Sarana Prasarana yang telah dipenuhi pada tahun 2019 adalah :

- Pembangunan Sarana Prasarana *Diffable* di taman Jetayu.
- Pembangunan Sarana Prasarana WC di taman Jetayu.
- Pembangunan Sarana Prasarana WC di taman Alun-alun.

Sehingga total komponen sarana dan prasarana ruang publik kreatif yang telah dibangun sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 25 komponen. Faktor

pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia) sebagai berikut :

- Penataan kawasan stratergis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Pekalongan.
- Adanya koordinasi antara SKPD terkait dalam penataan strategis taman bahagia.
- Selain itu juga didukung program, kegiatan serta anggaran

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup, hal ini sebagai tindak lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode perhitungan IKLH yang digunakan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggunakan formula sebagai berikut : IKLH = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%). Keterangan : IPA = indeks pencemaran air; IPU = indeks pencemaran udara; ITH = indeks tutupan hutan.

Adapun capaian IKLH Kota Pekalongan dari Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.176 Capaian IKLH Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Indeks Pencemaran Air	Indeks Pencemaran Udara	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
2017	44.67	99.29	23.5	52,59
2018	46.00	98.82	23.5	52.85
2019	46.00	99.05	23,5	52.92

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2020

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan nilai IKLH setiap tahunnya, sehingga dapat dilihat bahwa kondisi kualitas udara dan kualitas air sudah mulai ada penurunan beban pencemaran karena adanya upaya penanganan dan penanggulangan.

Misi V : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pencapaian misi 5 RPJMD diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran dan telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.177 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	20,00	15	21	tercapai	▲

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan Komunitas Yang Berdaya Dan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indikator diatas merupakan indikator mandiri Kota Pekalongan yang merupakan salah satu program unggulan Walikota Pekalongan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi. Pada tahun 2019, jumlah komunitas yang mampu menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan dengan baik sebanyak 21 kelompok, sebagai berikut :

1) Caturpilar
2) RW Net
3) BKR
4) PKK
5) Karang Taruna
6) LPPAR
7) Dewan TIK
8) Relawan TIK
9) *Open Source Software* (Tidak Aktif)
10) Himpaudi
11) MGMP
12) Pecinta Domain
13) Blogger
14) Fotografer
15) Animator
16) Film
17) Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
18) IWODI : Ikatan Wanita Digital Ind
19) Formaci : Forum Masyarakat Anti Hoax Cinta NKRI
20) ARAH : Asosiasi Rakyat Anti Hoax
21) RAPI : Radio Amatir Penduduk Indonesia

Misi VI : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

Pencapaian misi 6 RPJMD diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan seluruhnya tercapai targetnya (100,00%). Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi VI

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
1	Persentase peningkatan penyelenggaraan event	70,97	129,03	138,70	Tercapai	▲
2	Persentase penurunan kasus konflik sosial	14,29	(100)	50	Tercapai	▲
3	Persentase implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	55,00	73,91	83,67	Tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Event

Indikator ini mengukur peningkatan event pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD sehingga pada akhir tahun 2021, target penyelenggaraan event adalah 100 % atau 31 event. Target penyelenggaraan event di Tahun 2019 adalah 70,97 % dimana target event yang diselenggarakan adalah sejumlah 22 event. Pada tahun 2019 telah diselenggarakan 42 event sehingga persentase capaiannya adalah (43/31)*100 % atau sebesar 138,70 %. Persentase ini meningkat dari Tahun 2018 yang semula sejumlah 40 event (129,03%).

2. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Pada tahun 2019 terjadi 1 (satu) konflik di Kota Pekalongan yaitu pembangunan gedung serba guna oleh pengurus Yayasan Al Aiman. Jumlah ini

menurun dibandingkan kasus konflik sosial di tahun 2018 dengan jumlah kasus konfliks sebanyak 2 kasus.

3. Persentase Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2. 179 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2019

Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter	2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan	297	100	297	100
Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter	142	47,81	200	67,34
Rata-rata		**73,90**		**83,67**

Sumber : Dindik Kota Pekalongan (diolah), 2020

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.180 berikut.

Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD		
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target
1	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,00	97,00	97,13	Tercapai	97,13	98,11	Akan tercapai
2	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	%	60,00	52,00	49,16	Tidak tercapai	49,16	81,93	Akan tercapai
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,32	74,28	Tidak tercapai	74,28	99,83	Akan tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	3,70	5,77	Tidak tercapai	5,77	60,66	Belum tercapai
5	Persentase Penurunan PMKS	%	41,68	8,78	12,83	Tercapai	38,87	93,27	Akan tercapai
6	Kategori evaluasi AKIP	Grade	BB	B	BB	Tercapai	BB	> target	Tercapai
7	Tingkat kematangan implementasi SPIP	skor	3,50	2,75	3,02	Tercapai	3,02	86,29	Akan tercapai
8	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP	WTP	Tercapai	WTP	sesuai target	Tercapai
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,00	84,00	60,54	Tidak tercapai	60,54	70,40	Belum tercapai
10	Persentase PD dengan IKM Baik	%	100,00	93,55	93,94	Tercapai	93,94	93,94	Akan tercapai
11	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	%	100,00	50,00	67,74	Tercapai	67,74	67,74	Belum tercapai
12	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	%	4,01	4,70	4,84	Tercapai	4,84	94,90	Akan tercapai
13	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	4,01	5,40	5,72	Tercapai	5,72	98,62	Akan tercapai
14	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	%	9,04	18,54	23,36	Tercapai	23,36	38,69	Belum tercapai
15	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	-	1,03	0,39	Tercapai	0,39	< target	Belum tercapai
16	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	%	93,63	87,88	88,17	Tercapai	88,17	94,17	Akan tercapai
17	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	Indeks	0,73	0,84	0,45	Tercapai	0,45	61,64	Belum tercapai
18	Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	%	100,00	71,40	71,43	Tercapai	71,43	71,43	Belum tercapai
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,76	52,67	52,92	Tercapai	52,92	100,30	Tercapai
20	Cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	kelompok	30,00	20,00	21,00	Tercapai	21,00	70,00	Belum tercapai
21	Persentase peningkatan penyelenggaraan event	%	100,00	70,97	183,87	Tercapai	183,87	183,87	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD		
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target
22	Persentase penurunan kasus konflik sosial	%	20,00	14,29	50,00	Tercapai	50,00	40,00	Belum tercapai
23	Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	%	65,00	55,00	83,67	Tercapai	83,67	128,72	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

2.2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program Tahun 2019

1. Urusan Pendidikan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pendidikan disajikan pada tabel 2.181 berikut.

Tabel 2.181 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PENDIDIKAN										
01. Program Pendidikan Anak Usia Dini	APS 3-6 tahun	%	68,50	67,50	91,44	Tercapai	91,44	133,49	Tercapai	Dindik
	APK PAUD	%	62,50	61,00	69,64	Tercapai	69,64	111,42	Tercapai	Dindik
	APM PAUD	%	70,00	60,00	64,10	Tercapai	64,10	91,57	Akan tercapai	Dindik
	APS 5-6 tahun	%	80,00	75,00	99,16	Tercapai	99,16	123,95	Tercapai	Dindik
	APK TK/RA	%	81,00	76,00	81,16	Tercapai	81,16	100,20	Tercapai	Dindik
	APM TK/RA	%	80,00	75,00	34,49	Tidak tercapai	34,49	43,11	Belum tercapai	Dindik
02. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APS 7-12 tahun	%	100,00	100,00	98,67	Tidak tercapai	98,67	98,67	Akan tercapai	Dindik
	APK SD/MI	%	100,00	100,00	98,32	Tidak tercapai	98,32	98,32	Akan tercapai	Dindik
	APM SD/MI	%	96,00	94,50	79,03	Tidak tercapai	79,03	82,32	Akan tercapai	Dindik
	APS 13-15 tahun	%	100,00	100,00	97,69	Tidak tercapai	97,69	97,69	Akan tercapai	Dindik
	APK SMP/MTs	%	100,00	100,00	106,27	Tercapai	106,27	106,27	Tercapai	Dindik
	APM SMP/MTs	%	77,50	76,50	61,14	Tidak tercapai	61,14	78,89	Belum tercapai	Dindik
03. Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	%	29,00	21,00	306,69	Tercapai	306,69	1057,55	Tercapai	Dindik
	Angka Partisipasi Kesetaraan	%	45,00	36,00	239,63	Tercapai	239,63	532,51	Tercapai	Dindik
	Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesetaraan	%	95,00	80,00	3,67	Tidak tercapai	3,67	3,86	Belum tercapai	Dindik
	Angka Partisipasi LKP	%	30,00	20,00	NA	Belum tersedia data	NA	NA	Belum tersedia data	Dindik
	Angka Partisipasi PKBM	%	12,00	7,00	NA	Belum tersedia data	NA	NA	Belum tersedia data	Dindik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Angka Melek Huruf	%	100,00	98,50	99,98	Tercapai	99,98	99,98	Akan tercapai	Dindik
04. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SD)	%	SD : 95 %	SD : 87.5 %	90,81	Tercapai	90,81	95,59	Akan tercapai	Dindik
	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SMP)	%	SMP : 100 %	SMP : 96 %	86,41	Tidak tercapai	86,41	86,41	Akan tercapai	Dindik
	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (TK)	%	TK : 100 %	TK : 100 %	104,97	Tercapai	104,97	104,97	Tercapai	Dindik
	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SD)	%	SD : 50 %	SD : 20 %	3,76	Tidak tercapai	3,76	7,52	Belum tercapai	Dindik
	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SMP)	%	SMP : 80 %	SMP : 67.5 %	57,35	Tidak tercapai	57,35	71,69	Belum tercapai	Dindik
	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (TK)	%	TK : 60 %	TK : 37.5 %	NA	Belum tersedia data	NA	NA	Belum tersedia data	Dindik
	Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs berijazah S1/DIV	%	100,00	90,00	91,20	Tercapai	91,20	91,20	Akan tercapai	Dindik
	Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	%	62,00	59,00	52,71	Tidak tercapai	52,71	85,02	Akan tercapai	Dindik
	Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikas	%	75,00	35,00	32,51	Tidak tercapai	32,51	57,01	Belum tercapai	Dindik
	Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	%	75,00	30,00	71,01	Tercapai	71,01	94,68	Akan tercapai	Dindik
05. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
06. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,03	0,05	0,12	Tidak tercapai	0,12	25,00	Belum tercapai	Dindik
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,08	0,10	0,46	Tidak tercapai	0,46	17,39	Belum tercapai	Dindik
	Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	104,78	Tercapai	104,78	104,78	Tercapai	Dindik
	Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkanke SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	101,25	Tercapai	101,25	101,25	Tercapai	Dindik
07. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal	%	100,00	100,00	870,73	Tercapai	870,73	870,73	Tercapai	Dindik
	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	%	75,00	65,00	62,77	Tidak tercapai	62,77	83,69	Akan tercapai	Dindik
	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas	%	100,00	100,00	107,49	Tercapai	107,49	107,49	Tercapai	Dindik
	Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung	%	70,00	65,00	65,44	Tercapai	65,44	93,49	Akan tercapai	Dindik
	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	%	90,00	70,00	85,86	Tercapai	85,86	95,40	Belum tercapai	Dindik
08. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar	Angka Lulus Jenjang Dikdas	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Nilai Rata-rata UN SD/MI	nilai	77,00	76,00	69,69	Tidak tercapai	69,69	90,51	Akan tercapai	Dindik
	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	nilai	65,00	60,00	59,02	Tidak tercapai	59,02	90,80	Akan tercapai	Dindik
	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi Penilaian Akreditasi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	indek	3,30	3,30	2,67	Tidak tercapai	2,67	80,91	Akan tercapai	Dindik
	Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi pembinaan oleh pengawas	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
09. Program Pembentukan Karakter Anak	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	%	90,00	80,00	100,00	Tercapai	100,00	111,11	Tercapai	Dindik
	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	%	90,00	80,00	100,00	Tercapai	100,00	111,11	Tercapai	Dindik
	Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/madin	%	10,00	20,00	NA	Belum tersedia data	NA	NA	Belum tersedia data	Dindik
	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang terfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi	%	100,00	20,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Paud Dan PNF	Persentase Satuan Pendidikan PAUD&PNF yang terfasilitasi penilaian akeditasi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Persentase satuan pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi pembinaan oleh Pengawas/penilik	%	95,00	92,00	100,00	Tercapai	100,00	105,26	Tercapai	Dindik
	Persentase organisasi mitra PAUD & PNF yang terfasilitasi pemberdayaan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi lomba dan apresiasi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
11. Program Pembentukan Karakter Siswa	Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	%	100,00	100,00	71,87	Tidak tercapai	71,87	71,87	Belum tercapai	Dindik
	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	%	60,00	25,00	100,00	Tercapai	100,00	166,67	Tercapai	Dindik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	%	30,00	10,00	100,00	Tercapai	100,00	333,33	Tercapai	Dindik
	Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin	Rasio	70,00	50,00	NA	Belum tersedia data	NA	NA	Belum tersedia data	Dindik
	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalam kegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik
	Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatan kepramukaan	Rasio	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindik

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Pendidikan, terdapat 19 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum pada tabel 2.182 berikut :

Tabel 2.182 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2019

Indikator tidak mencapai target	Faktor Penyebab
a. APM TK/RA	Banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya pada jenjang TK/RA dibawah usia 5 tahun dan menyekolahkan anaknya yang belum berusia 7 tahun pada jenjang SD/MI
b. APS 7-12 tahun	Adanya Kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan ditahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada yang ketentuan yang berlaku.
c. APS 13-15 tahun	
d. APK SD/MI	
e. APM SD/MI	
f. APM SMP/MTs	
g. Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesetaraan	Kurang-tepatan pelaksanaan program
h. Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SMP)	Adanya perubahan standar maksimal siswa per rombongan belajar yang semula 36 siswa menjadi 32 siswa
i. Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SD)	Adanya moratorium PNS
j. Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SMP)	
k. Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	Kuota jumlah peserta sertifikasi profesi guru yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya sejumlah guru bersertifikasi yang pensiun yaitu 51 orang
l. Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Ada tambahan persyaratan kualifikasi kepala sekolah
m. Angka Putus Sekolah SD/MI	Karena kurangnya motivasi anak dan keluarga atau pindah sekolah keluar kota
n. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
o. Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh TK/RA
p. Nilai Rata-rata UN SD/MI	Diterapkannya penggunaan soal-soal yang berjenis *High Order Thinking Skill* (HOTS) atau soal-soal yang membutuhkan daya nalar tinggi padahal soal-soal dalam Try-out belum menerapkan itu
q. Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	
r. Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	Jumlah anak berkebutuhan khusus tidak banyak, sehingga jika diselenggarakan pada sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi hal tersebut menjadi tidak efisien
s. Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	Capaian rasio siswa jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin tidak tersedia datanya dikarenakan data peserta didik di TPQ/Madin tidak ada NIK-nya sehingga tidak bisa diolah secara sistem dengan Dapodik dan Emis

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

2. Urusan Kesehatan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Kesehatan disajikan pada tabel 2.183 berikut.

Tabel 2.183 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KESEHATAN										
01. Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	%	95,00	90,00	88,70	Tidak tercapai	88,70	93,36	Akan tercapai	Dinkes
	Persentase temuan makanan berbahaya	%	3,00	4,00	4,56	Tercapai	4,56	152,09	Tercapai	Dinkes
02. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus balita gizi buruk	%	0,05	0,05	0,05	Tercapai	0,05	100,00	Tercapai	Dinkes
	Persentase ibu hamil KEK	%	< 13,5	<13,6	13,33	Tercapai	13,33	101,28	Tercapai	Dinkes
	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	50,00	45,00	57,20	Tercapai	57,20	114,40	Tercapai	Dinkes
03. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	%	100,00	35,00	42,86	Tercapai	42,86	42,86	Belum tercapai	Dinkes
	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	%	100,00	75,00	55,56	Tidak tercapai	55,56	55,56	Belum tercapai	Dinkes
	Persentase sarana kesehatan lainnya yang terakreditasi	%	50,00	-	0,00	Tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai	Dinkes
04. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	Indeks	<2	<2	1,82	Tercapai	1,82	109,89	Tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	%	99,00	97,00	93,89	Tidak tercapai	93,89	94,84	Akan tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	%	100,00	100,00	29,91	Tidak tercapai	29,91	29,91	Belum tercapai	Dinkes

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	%	100,00	100,00	16,69	Tidak tercapai	16,69	16,69	Belum tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	%	100,00	100,00	96,34	Tidak tercapai	96,34	96,34	Akan tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	%	100,00	100,00	69,68	Tidak tercapai	69,68	69,68	Belum tercapai	Dinkes
05. Program Pelayanan BLUD Puskesmas Dan Sarana Kesehatan Lainnya	Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	%	50,00	43,00	103,32	Tercapai	103,32	206,64	Tercapai	Dinkes
	Tingkat kemandirian BLUD BKPM	%	30,00	25,00	97,43	Tercapai	97,43	324,77	Tercapai	Dinkes
	Tingkat kemandirian BLUD PSPJ	%	25,00	18,00	99,29	Tercapai	99,29	397,16	Tercapai	Dinkes
06. Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	%	59,26	51,85	77,78	Tercapai	77,78	131,25	Tercapai	Dinkes
	Persentase kualitas air minum pada penyelenggara air minum	%	84,00	79,00	82,99	Tercapai	82,99	98,80	Akan tercapai	Dinkes
	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan	%	98,00	94,00	92,10	Tidak tercapai	92,10	93,98	Akan tercapai	Dinkes
	Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal	%	40,00	35,00	41,37	Tercapai	41,37	103,43	Tercapai	Dinkes
	Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD	%	40,00	30,00	33,33	Tercapai	33,33	83,33	Akan tercapai	Dinkes
07. Program Kesehatan Keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100,00	100,00	97,73	Tidak tercapai	97,73	97,73	Akan tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100,00	100,00	99,88	Tidak tercapai	99,88	99,88	Akan tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	100,00	100,00	94,81	Tidak tercapai	94,81	94,81	Akan tercapai	Dinkes

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM)	%	65,00	64,70	100,00	Tercapai	100,00	153,85	Tercapai	Dinkes
	Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	%	95,00	90,00	80,08	Tidak tercapai	80,08	84,29	Akan tercapai	Dinkes
08. Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang memenuhi standar Puskesmas	%	95,00	90,00	100,00	Tercapai	100,00	105,26	Tercapai	Dinkes
	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	%	100,00	100,00	94,61	Tidak tercapai	94,61	94,61	Akan tercapai	Dinkes
	Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	%	18,00	14,00	27,00	Tercapai	27,00	150,00	Tercapai	Dinkes
	Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	%	18,00	14,00	15,56	Tercapai	15,56	86,44	Akan tercapai	Dinkes
09. Program Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan	Cakupan Posyandu strata mandiri	%	30,00	25,00	24,33	Tidak tercapai	24,33	81,10	Akan tercapai	Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	%	100,00	100,00	99,29	Tidak tercapai	99,29	99,29	Tercapai	Dinkes
10. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dibutuhkan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
	Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Di Rumah Sakit	Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	%	100,00	98,00	93,18	Tidak tercapai	93,18	93,18	Akan tercapai	RSUD Bendan
	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	%	≤ 1	≤ 1	4,29	Tidak tercapai	4,29	23,31	Belum tercapai	RSUD Bendan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre-ekslampsia	%	≤ 30	≤ 30	0,45	Tercapai	0,50	200,00	Tercapai	RSUD Bendan
	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh sepsis	%	≤ 0,2	≤ 0,2	0,00	Tercapai	0,00	0,00	Tercapai	RSUD Bendan
12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS	%	100,00	95,00	96,97	Tercapai	96,97	96,97	Akan tercapai	RSUD Bendan
13. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari sama dengan 30 menit	menit	30,00	40,00	28,38	Tercapai	28,38	94,60	Akan Tercapai	RSUD Bendan
	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit	menit	50,00	54,00	48,39	Tercapai	48,39	96,78	Akan Tercapai	RSUD Bendan
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Skor Akreditasi RS	skor	reakreditasi	terakreditasi snars	terakreditasi SNARS	Tercapai	terakreditasi SNARS	Terakreditasi snars	Tercapai	RSUD Bendan
15. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	RSUD Bendan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan kesehatan, terdapat 17 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.184 berikut :

Tabel 2.184 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	Masih ada sarana pelayanan kefarmasian yang belum memenuhi standar pelayanan kefarmasian
b. Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	Masih ada beberapa RS yang sarana dan prasarana belum memenuhi standar (Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit)
c. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	Masih adanya orang tua yang menolak anaknya untuk diimunisasi dan ada beberapa vaksin yang sering kosong dari pusatnya berupa vaksin Ipv dan polio
d. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	Dikarenakan ada perubahan penghitungan estimasi penderita hipertensi yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas tahun 2013
e. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	Bahan Pemeriksaan untuk usia produktif terutama untuk test gula darah belum mencukupi dengan sasaran yang ditargetkan
f. Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	Ada perubahan penghitungan estimasi penderita Diabetes Mellitus yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas tahun 2013
g. Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	Ada perubahan penghitungan sasaran Pelayanan Kesehatan ODGJ yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas tahun 2013
h. Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan	Belum semua Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memiliki sertifikat laik hygiene sanitas
i. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	Ibu hamil pindah domisili, mengalami persalinan premature dan keguguran
j. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Adanya kematian bayi
k. Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	Adanya kematian balita dan balita yang pindah domisili luar Kota Pekalongan
l. Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	Masih kurangnya kesadaran penduduk untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN KIS Mandiri
m. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	Jumlah pengadaan beberapa item tidak sesuai dengan rekap kebutuhan seluruh puskesmas

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
n. Cakupan Posyandu strata mandiri	Adanya Posyandu yang belum tertib administrasi, partisipasi masyarakat yang membawa balita ke Posyandu masih kurang
o. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	Saat pemeriksaaan kesehatan pada usia pendidikan dasar ada siswa yang tidak masuk sekolah
p. Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	BBLR yang meninggal dunia disebabkan oleh usia gestasi terlalu muda (27-30 minggu), bayi rujukan saat masuk kondisi terlalu buruk, diagnosa dengan asfiksia berat, kelainan kongenital, dan adanya diagnosa tambahan yang memperburuk kondisi
q. Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	Adanya kematian ibu bersalin karena gangguan pembekuan darah, plasenta previa, dan pendarahan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel 2.185 berikut.

Tabel 2.185 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
01. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	%	100,00	90,00	91,42	Tercapai	91,42	91,42	Akan tercapai	DPU-PR
02. Program Pengendalian Banjir	Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik	%	94,74	88,24	90,00	Tercapai	90,00	95,00	Akan tercapai	DPU-PR
03. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED	%	40,00	33,00	33,23	Tercapai	33,23	83,08	Belum tercapai	DPU-PR
	Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	%	100,00	71,40	71,43	Tercapai	71,43	71,43	Belum tercapai	DPU-PR
	Peningkatan sarpas lokasi makam	%	100,00	33,00	33,33	Tercapai	33,33	33,33	Belum tercapai	DPU-PR
04. Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	%	16.286 unit	4,50	4,14	Tidak Tercapai	90,89	90,89	Akan tercapai	DPU-PR
05. Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	92,21	92,21	89,31	Tidak tercapai	89,31	96,86	Akan tercapai	DPU-PR
	Persentase Trotoir dalam kondisi baik	%	12,18	11,86	12,02	Tidak tercapai	12,02	98,65	Akan tercapai	DPU-PR
	Persentase Saluran Pematus Jalan dalam kondisi baik	%	42,62	42,29	42,37	Tercapai	42,37	99,41	Akan tercapai	DPU-PR
06. Program Pembinaan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	%	100,00	100,00	60,00	Tidak tercapai	60,00	60,00	Belum tercapai	DPU-PR
	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	DPU-PR

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
07. Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase	Persentase jaringan irigasi yang dipelihara	%	78,26	76,73	NA	Tidak tercapai	NA	NA	Belum tersedia data	DPU-PR
	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	%	70,14	60,00	58,90	Tidak tercapai	58,90	83,97	Akan tercapai	DPU-PR

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat 5 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.186 berikut :

Tabel 2.186 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Persentase jembatan dalam kondisi baik	Pekerjaan Pembangunan jembatan pada jembatan yang belum masuk pada SK jembatan kota
b. Persentase trotoir dalam kondisi baik	Pembangunan trotoir kota lebih sedikit dibandingkan target
c. Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	Pembatalan pekerjaan 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan gedung
d. Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Jumlah pengajuan ijin IMB tidak tetap, tergantung kebutuhan masyarakat atau pengembang
e. Persentase jaringan irigasi yang dipelihara	Pemeliharaan jaringan irigasi terhambat kewenangan irigasi yang ada pada PUSDATARU
f. Persentase drainase primer dalam kondisi baik	Dikarenakan penentuan target drainase masih didasarkan pada data yang belum terverifikasi

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel 2.187 berikut.

Tabel 2.187 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
01. Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	%	1,26	4,05	3,07	Tercapai	3,07	243,65	Tercapai	Dinperkim
	Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	%	100,00	50,00	62,73	Tercapai	62,73	62,73	Belum tercapai	Dinperkim
02. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	%	87,75	78,85	72,04	Tidak tercapai	72,04	82,09	Belum tercapai	Dinperkim
	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	%	47,46	46,85	69,56	Tercapai	69,56	146,56	Tercapai	Dinperkim
	Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan	%	95,99	91,99	83,33	Tidak tercapai	83,33	86,81	Akan tercapai	Dinperkim
	Cakupan akses sanitasi	%	97,33	94,65	99,32	Tercapai	99,32	102,04	Tercapai	Dinperkim

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Perumahan dan kawasan permukiman, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan antara lain:

a. Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase, disebabkan kemampuan penambahan pelayanan drainase tidak sebanding dengan panjang jalan lingkungan;
b. Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan, dikarenakan masih banyak penduduk yang menggunakan sumur tradisional dan sumur bor.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas disajikan pada tabel 2.188 berikut.

Tabel 2.188 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS										
01. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	%	100,00	50,00	44,44	Tidak tercapai	44,44	44,44	Belum tercapai	Satpol PP
02. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemilih pemula yang terdidik politik	%	21,11	34,96	17,47	Tidak tercapai	17,47	82,76	Akan tercapai	Kesbangpol
03. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Satpol PP
04. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Satpol PP
05. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	%	100,00	100,00	99,35	Tidak tercapai	99,35	99,35	Akan tercapai	Satpol PP
06. Program Kemitraan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kesbangpol
	Persentase penurunan kasus narkoba	%	23,08	19,05	12,00	Tidak tercapai	12,00	51,99	Belum tercapai	Kesbangpol
07. Program Penanggulangan Bencana Alam	Persentase korban bencana alam yang ditangani	%	75,00	75,00	100,00	Tercapai	100,00	133,33	Tercapai	BPBD
	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	%	33,33	33,33	83,33	Tercapai	83,33	250,02	Tercapai	BPBD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas, terdapat 4 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.189 berikut :

Tabel 2.189 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Cakupan kelompok sasaran tibum yang dibina	Pengalihan pembinaan sasaran tibum karena urgensitas situasi (Jl. Pelita II)
b. Persentase pemilih pemula yang terdidik politik	Banyaknya pemilih pemula yang bersekolah diluar Kota Pekalongan
c. Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Pelanggar Perda tidak ada dilokasi/kabur (anak punk/ODGJ)
d. Persentase penurunan kasus narkoba	Semakin bertambahnya penanganan kasus narkoba dari kepolisian

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

6. Urusan Sosial

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Sosial disajikan pada tabel 2.190 berikut.

Tabel 2.190 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN SOSIAL										
01. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	%	1,66	1,33	1,30	Tidak tercapai	1,30	78,31	Belum tercapai	Dinsos P2KB
02. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	%	37,02	23,41	39,35	Tercapai	39,35	106,30	Tercapai	Dinsos P2KB
	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinsos P2KB
	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	%	75,00	58,33	75,00	Tercapai	75,00	100,00	Tercapai	Dinsos P2KB

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Sosial, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan, target dalam pembentukan KUBE baru dapat terealisasi, namun adanya peserta KUBE yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif, sehingga mengurangi jumlah KUBE aktif.

7. Urusan Tenaga Kerja

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Tenaga Kerja disajikan pada tabel 2.191 berikut.

Tabel 2.191 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN TENAGA KERJA										
03. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	orang	800,00	800,00	1200,00	Tercapai	1200,00	150,00	Tercapai	Dinperinaker
	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	%	50,00	40,00	82,93	Tercapai	82,93	165,86	Tercapai	Dinperinaker
04. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	%	70,00	65,00	66,25	Tercapai	66,25	94,64	Akan tercapai	Dinperinaker
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	75,00	65,00	65,00	Tercapai	65,00	86,67	Akan tercapai	Dinperinaker
05. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan penjanjian bersama	%	55,00	54,00	75,00	Tercapai	75,00	136,36	Tercapai	Dinperinaker
	Rasio kenaikan upah minimum	%	8,74	8,72	8,03	Tidak tercapai	8,03	91,88	Akan tercapai	Dinperinaker
	Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan	%	50,00	46,00	47,80	Tercapai	47,80	95,60	Akan tercapai	Dinperinaker
	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	%	47,00	45,00	46,00	Tidak tercapai	46,00	97,87	Akan tercapai	Dinperinaker

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Tenaga Kerja, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Rasio kenaikan upah minimum, disebabkan pengaruh indikator makro (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) yang mempengaruhi nilai UMK dan berada diluar kontrol Dinperinaker;
b. Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan, disebabkan kenaikan jumlah perusahaan yang tidak diikuti dengan kenaikan pembentukan LKS bipartite.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel 2.192 berikut.

Tabel 2.192 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
01. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	100,00	51,61	96,77	Tercapai	96,77	96,77	Akan tercapai	DPMPPA
	Persentase kampung layak anak	%	100,00	25,00	25,00	Tercapai	25,00	25,00	Belum tercapai	DPMPPA
02. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	DPMPPA

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

9. Urusan Pangan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pangan disajikan pada tabel 2.193 berikut.

Tabel 2.193 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pangan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PANGAN										
01. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	skor	90,20	90,05	91,31	Tercapai	91,31	101,23	Tercapai	Dinperpa

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

10. Urusan Pertanahan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pertanahan disajikan pada tabel 2.194 berikut.

Tabel 2.194 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pertanahan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERTANAHAN										
01. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota	%	75,00	75,00	79,60	Tercapai	79,60	106,13	Akan tercapai	DPU-PR

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

11. Urusan Lingkungan Hidup

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel 2.195 berikut.

Tabel 2.195 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
01. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	72,00	61,00	79,15	Tidak tercapai	79,15	109,93	Akan tercapai	DLH
	Persentase sampah terkelola di TPS3R	%	43,00	39,00	20,85	Tidak tercapai	20,85	48,49	Belum tercapai	DLH
02. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	%	100,00	75,00	75,00	Tercapai	75,00	75,00	Belum tercapai	DLH
	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100,00	80,00	80,00	Tercapai	80,00	80,00	Akan tercapai	DLH
	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	%	100,00	89,00	90,00	Tercapai	90,00	90,00	Akan tercapai	DLH
03. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	%	0,10	0,10	NA	Tidak tercapai	NA	NA	Belum tersedia data	DLH
	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	18,90	18,80	8,23	Tidak tercapai	8,23	43,54	Belum tercapai	DLH
04. Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	%	100,00	60,00	65,00	Tercapai	65,00	65,00	Belum tercapai	DLH
	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	%	90,00	80,00	80,00	Tercapai	80,00	88,89	Akan tercapai	DLH

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
05. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	%	100 % (70 titik ABT)	71,43	72,00	Tercapai	72,00	72,00	Belum tercapai	DLH
	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	%	100 % (4 kampung)	50,00	74,00	Tercapai	74,00	74,00	Belum tercapai	DLH
	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	%	100 % (24 titik)	66,60	66,67	Tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai	DLH

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Lingkungan Hidup, terdapat 4 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.196 berikut :

Tabel 2.196 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Persentase sampah terangkut ke TPA	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, belum mandirinya pengelolaan sampah di TPS3R serta rusaknya beberapa sarana dan prasarana di TPS3R
b. Persentase sampah terkelola di TPS3R	
c. Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	Adanya koreksi identifikasi RTH Perkotaan berupa: koreksi identifikasi batasan perkotaan luas perkotaan dan koreksi identifikasi RTH karena beberapa RTH privat dimasukkan dalam RTH Publik
d. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	

12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 2.197 berikut.

Tabel 2.197 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
01. Program Penataan Administrasi Kependudukan	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	perangkat daerah	26,00	9,00	1,00	Tidak tercapai	1,00	3,85	Belum tercapai	Dindukcapil
	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	pemangku kepentingan	78,00	26,00	26,00	Tercapai	26,00	33,33	Belum tercapai	Dindukcapil
02. Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	%	95,00	93,00	97,76	Tercapai	97,76	102,91	Tercapai	Dindukcapil
	Cakupan penerbitan KK	%	98,00	97,00	91,27	Tidak tercapai	91,27	93,13	Akan tercapai	Dindukcapil
03. Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%	75,00	73,00	52,14	Tidak tercapai	52,14	69,52	Belum tercapai	Dindukcapil
	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	80,00	70,00	75,94	Tercapai	75,94	94,93	Akan tercapai	Dindukcapil

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdapat 3 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. OPD yang memanfaatkan data kependudukan, yang disebabkan standar sumber data dari OPD merujuk pada sumber data yang ditetapkan oleh kementerian terkait;
b. Cakupan penerbitan KK dan Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran yang disebabkan belum sepenuhnya masyarakat menyadari pentingnya dokumen kependudukan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa disajikan pada tabel 2.198 berikut.

Tabel 2.198 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
01. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	DPMPPA
02. Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	%	100,00	33,33	33,33	Tercapai	33,33	33,33	Belum tercapai	DPMPPA
03. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	DPMPPA

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel 2.199 berikut.

Tabel 2.199 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
01. Program Keluarga Berencana	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	%	66,00	62,00	20,51	Tidak tercapai	20,51	31,08	Belum tercapai	Dinsos P2KB
	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	%	100,00	77,78	69,33	Tidak tercapai	69,33	69,33	Belum tercapai	Dinsos P2KB

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia, masih adanya peserta KB MKJP dengan sistem ganti cara sehingga tidak mempengaruhi penambahan peserta KB MKJP dan peserta MKJP aktif yang sudah memasuki masa *menopause* mengurangi peserta MKJP Aktif.
b. Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus, dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya yaitu pemberian dispensasi surat nikah yang masih longgar, masih kurangnya pengetahuan orang tua, perangkat kelurahan perihal dampak negatif nikah dini serta masih kurangnya sosialisasi PIK-R pada kelompok remaja baik PIK Sekolah maupun PIK Masyarakat.

15. Urusan Perhubungan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perhubungan disajikan pada tabel 2.200 berikut.

Tabel 2.200 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perhubungan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERHUBUNGAN										
01. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	%	100,00	79,43	95,41	Tercapai	95,41	95,41	Akan tercapai	Dinhub
02. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Ketersediaan angkutan umum	%	20,95	19,90	17,97	Tidak tercapai	17,97	85,76	Akan tercapai	Dinhub
	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	%	92,40	92,22	84,52	Tidak Tercapai	84,52	91,47	Akan tercapai	Dinhub
03. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	%	100,00	77,78	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinhub

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Perhubungan, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Ketersediaan angkutan umum, peralihan tren penggunaan angkutan umum konvensional beralih menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan berbasis *online*.
b. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala, disebabkan pemberlakuan *system smart card* kendaraan yang numpang uji menjadi berkurang, banyaknya mobil Kota Pekalongan yang berdomisili di luar kota dan banyaknya mobil tua yang sudah berhenti beroperasi tetapi masih terdata sebagai potensi.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel 2.201 berikut.

Tabel 2.201 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
01. Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)	%	100,00	93,33	93,27	Tidak tercapai	93,27	93,27	Akan tercapai	Dinkominfo
	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustudll)	%	37,78	33,33	65,91	Tercapai	65,91	174,46	Tercapai	Dinkominfo
	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	%	27,84	21,65	20,00	Tidak tercapai	20,00	71,84	Belum tercapai	Dinkominfo
02. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	%	100,00	87,10	87,10	Tercapai	87,10	87,10	Akan tercapai	Dinkominfo
	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	%	100,00	67,00	41,84	Tidak tercapai	41,84	41,84	Belum tercapai	Dinkominfo
03. Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	%	100,00	79,07	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkominfo

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	%	66,67	59,26	71,43	Tercapai	71,43	107,14	Tercapai	Dinkominfo
04. Program Pengelolaan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Dan Penguatan KIP	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik"	%	38,10	21,43	67,74	Tercapai	67,74	177,80	Tercapai	Dinkominfo
	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkominfo

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Komunikasi Dan Informatika, terdapat 3 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.202 berikut :

Tabel 2.202 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)	Prioritas pembangunan jaringan FO yang semula antar OPD, kelurahan dan klaster pendidikan dialihkan pada pembangunan jaringan FO bagi OPD dan kelurahan yang pindah lokasi kantor
b. Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	
c. Persentase kelompok masyarakat mendapatkan *capacity building* TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	Kekurangan target kelompok masyarakat yang akan mengikuti *capacity building* TIK

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

17. Urusan Koperasi dan UKM

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Koperasi dan UKM disajikan pada tabel 2.203 berikut.

Tabel 2.203 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KOPERASI DAN UKM										
01. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	15000,00	13000,00	22653,00	Tercapai	22653,00	151,02	Tercapai	Dindagkop UKM
	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	895,00	130,00	150,00	Tercapai	150,00	16,76	Belum tercapai	Dindagkop UKM
02. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	24888,00	24398,00	22983,00	Tidak tercapai	22983,00	92,35	Akan tercapai	Dindagkop UKM
03. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan Umkm	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	%	100,00	93,33	79,29	Tidak tercapai	79,29	79,29	Belum tercapai	Dindagkop UKM
	Persentase koperasi aktif	%	99,18	98,34	84,38	Tidak tercapai	84,38	85,08	Akan tercapai	Dindagkop UKM

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Koperasi Dan UKM, terdapat 3 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Kenaikan jumlah UMKM, disebabkan ketidakmampuan UMKM dalam memaksimalkan peluang dan potensi sebagai salah satu alasan UMKM tumbuh stagnan. Kendala yang menyebabkan UMKM sulit maju adalah permasalahan permodalan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, teknologi dan pemasaran;
b. Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat, disebabkan penurunan performa laporan keuangan koperasi yang tidak menunjang hasil penilaian kesehatan koperasi;
c. Persentase koperasi aktif, dikarenakan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT sehingga digolongkan koperasi tidak aktif.

18. Urusan Penanaman Modal

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel 2.204 berikut.

Tabel 2.204 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PENANAMAN MODAL										
01. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB	buah	85,00	75,00	68,00	Tidak tercapai	68,00	80,00	Akan tercapai	DPMPTSP
02. Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal	Nilai investasi per tahun (milyar)	milyar rupiah	223,70	232,80	3294,76	Tercapai	3294,76	1472,85	Tercapai	DPMPTSP
03. Program Pelayanan Perizinan	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	95,00	93,00	83,45	Tidak tercapai	83,45	87,84	Akan tercapai	DPMPTSP

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Penanaman Modal, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB, dikarenakan minat pengusaha yang menghadiri bisnis forum kurang dari target;
b. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan, disebabkan kendala teknis penerbitan rekomendasi perizinan dan masalah teknis penerapan aplikasi *One Stop Service* dari pusat.

19. Urusan Kebudayaan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Kebudayaan disajikan pada tabel 2.205 berikut.

Tabel 2.205 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kebudayaan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KEBUDAYAAN										
01. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	event	12,00	2,00	2,00	Tercapai	4,00	33,33	Belum tercapai	Dinparbudpora
	Event kesenian yang difasilitasi	event	42,00	7,00	21,00	Tercapai	34,00	80,95	Akan tercapai	Dinparbudpora
	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	komunitas	30,00	5,00	100,00	Tercapai	106,00	353,33	Tercapai	Dinparbudpora
	Persentase pengunjung Museum Batik	%	4,86	4,81	3,96	Tidak tercapai	3,96	81,48	Akan tercapai	Dinparbudpora

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Kebudayaan, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase pengunjung museum batik, hal ini disebabkan kurangnya penambahan koleksi, perubahan desain interior, dan kurangnya promosi tentang kunjungan ke museum.

20. Urusan Perpustakaan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel 2.206 berikut.

Tabel 2.206 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERPUSTAKAAN										
02. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	Indeks	27,00	26,00	36,21	Tercapai	36,21	134,11	Tercapai	Dinarpus
	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	%	25,93	11,11	11,11	Tercapai	11,11	42,85	Belum tercapai	Dinarpus

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

21. Urusan Kearsipan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Kearsipan disajikan pada tabel 2.207 berikut.

Tabel 2.207 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kearsipan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KEARSIPAN										
01. Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	%	69,70	33,30	33,30	Tercapai	33,30	47,78	Belum tercapai	Dinarpus
	Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	%	63,16	100,00	53,33	Tidak tercapai	53,33	84,44	Akan tercapai	Dinarpus
02. Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Arsip yang dilestarikan (statis)	arsip	11000,00	9000,00	9296,00	Tercapai	9296,00	103,29	Tercapai	Dinarpus

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Kearsipan, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit. Hal ini disebabkan oleh jumlah OPD yang siap diaudit kurang dari target estimasi awal dari Dinarpus.

22. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel 2.208 berikut.

Tabel 2.208 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
01. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	%	85,71	26,67	26,67	Tercapai	26,67	31,11	Belum tercapai	Dinparbudpora
02. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	orang	113,00	21,00	22,00	Tercapai	51,00	45,13	Belum tercapai	Dinparbudpora
	Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	orang	14,00	3,00	1,00	Tidak tercapai	3,00	21,43	Belum tercapai	Dinparbudpora
	Peningkatan event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	event	14,00	3,00	1,00	Tidak tercapai	1,00	7,14	Belum tercapai	Dinparbudpora
03. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	%	45,00	35,00	42,86	Tercapai	42,86	95,24	Akan tercapai	Dinparbudpora

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu : Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali) dan Peningkatan event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

23. Urusan Statistik

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Statistik disajikan pada tabel 2.209 berikut.

Tabel 2.209 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Statistik Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN STATISTIK										
01. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkominfo

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

24. Urusan Persandian

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Persandian disajikan pada tabel 2.210 berikut.

Tabel 2.210 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Persandian Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERSANDIAN										
01. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinkominfo

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

25. Urusan Perikanan dan Kelautan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perikanan dan Kelautan disajikan pada tabel 2.211 berikut.

Tabel 2.211 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN										
01. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	209 M	2,00	13,23	Tercapai	177,51	84,93	Akan tercapai	DKP
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Milyar	5.5 M	2,00	13,23	Tercapai	5,33	96,91	Akan tercapai	DKP
	Nelayan yang dibina	%	888 orang	8,00	11,83	Tercapai	792,00	89,19	Akan tercapai	DKP
02. Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	1870,00	5,00	0,70	Tidak tercapai	1757,00	93,96	Akan tercapai	DKP
	Peningkatan konsumsi makan ikan	%	28 kg/kpt/tahun	6,00	12,73	Tidak tercapai	31,70	113,21	Tercapai	DKP
	Persentase pembudidaya yang dibina	%	644 orang	30,00	30,00	Tercapai	837,00	129,97	Tercapai	DKP
03. Program Pengembangan *Technopark* Perikanan	Peningkatan tenant dan non tenant	persen	24 tenant	50,00	57,00	Tercapai	21 tenant	87,50	Akan tercapai	DKP

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Perikanan dan Kelautan, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Peningkatan produksi perikanan budidaya, disebabkan oleh faktor cuaca dan berkurangnya lahan karena intrusi air laut;
b. peningkatan konsumsi makan ikan, dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk konsumsi makan ikan.

26. Urusan Pariwisata

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pariwisata disajikan pada tabel 2.212 berikut.

Tabel 2.212 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pariwisata Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PARIWISATA										
01. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang berkembang	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dinparbudpora
	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	%	1,85	1,55	1,55	Tercapai	1,55	83,69	Akan tercapai	Dinparbudpora
02. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	%	100,00	25,00	25,00	Tercapai	25,00	25,00	Belum tercapai	Dinparbudpora

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

27. Urusan Pertanian

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Pertanian disajikan pada tabel 2.213 berikut.

Tabel 2.213 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pertanian Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERTANIAN										
01. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	%	4,00	4,00	6,96	Tercapai	6,96	174,00	Tercapai	Dinperpa
02. Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	%	5,00	2,00	-34,00	Tidak tercapai	-34,00	-680,00	Belum tercapai	Dinperpa
	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	kasus	2400,00	2400,00	0,00	Tercapai	0,00	0,00	Tercapai	Dinperpa
03. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	25,00	25,00	21,00	Tercapai	21,00	84,00	Akan tercapai	Dinperpa
04. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi	%	10,00	3,00	-8,00	Tidak tercapai	-8,00	-80,00	Belum tercapai	Dinperpa

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Pertanian, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH, disebabkan peraturan tentang larangan pemotongan hewan betina produktif. Selain itu juga karena adanya tren di kalangan masyarakat Kota Pekalongan bahwa konsumsi daging/pemotongan hewan khususnya sapi hanya meningkat pada saat hari besar nasional;
b. Persentase peningkatan produksi padi, diakibatkan cuaca/musim. Pada saat musim penghujan terdapat lahan yang terdampak banjir sehingga puso dan musim kemarau yang cukup panjang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan juga mundurnya masa tanam berikutnya.

28. Urusan Perindustrian

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perindustrian disajikan pada tabel 2.214 berikut.

Tabel 2.214 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perindustrian Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERINDUSTRIAN										
01. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelaku IKM Batik Baru	IKM	10,00	10,00	10,00	Tercapai	10,00	100,00	Tercapai	Dinperinaker
	Persentase IKM dalam LIK	%	100,00	100,00	0,00	Tidak tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai	Dinperinaker
02. Program Penataan Struktur Industri	Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	perda	1,00	1,00	1,00	Tercapai	1,00	100,00	Tercapai	Dinperinaker
03. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	IKM	255,00	45,00	75,00	Tercapai	175,00	68,63	Belum tercapai	Dinperinaker

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Perindustrian, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase IKM dalam LIK, dikarenakan IKM-IKM yang direncanakan akan direlokasi belum bisa dilaksanakan/dipindahkan karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa terpenuhi, tahapan yang baru dilaksanakan adalah baru sosialisasi dan negosiasi tahap awal.

29. Urusan Perdagangan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Perdagangan disajikan pada tabel 2.215 berikut.

Tabel 2.215 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perdagangan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
URUSAN PERDAGANGAN										
01. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	%	100,00	94,00	58,19	Tidak tercapai	58,19	58,19	Belum tercapai	Dindagkop UKM
	Persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	%	100,00	90,43	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Dindagkop UKM
02. Program Pengembangan Ekspor	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	18,00	16,00	21,00	Tercapai	21,00	116,67	Tercapai	Dindagkop UKM
03. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	UMKM	72,00	12,00	16,00	Tercapai	16,00	22,22	Belum tercapai	Dindagkop UKM
	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	300,00	60,00	60,00	Tercapai	60,00	20,00	Belum tercapai	Dindagkop UKM
	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui *E-Marketplace*	UMKM	70,00	70,00	70,00	Tercapai	70,00	100,00	Tercapai	Dindagkop UKM
04. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Kawasan tertib PK5	kawasan	7,00	7,00	7,00	Tercapai	7,00	100,00	Tercapai	Dindagkop UKM
05. Program Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	%	30,77	26,57	26,57	Tercapai	26,57	86,35	Akan tercapai	Dindagkop UKM

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Urusan Perdagangan, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang, Target indikator Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang tidak tercapai, disebabkan karena :

a. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dimana terdapat beberapa alat wajib tera dimasukkan ke dalam kategori kalibrasi dan itu bukan termasuk salah satu tupoksi dari UPTD Metrologi Legal;
b. Animo dan partisipasi wajib tera/pedagang di pasar-pasar rakyat untuk melakukan tera/tera ulang mengalami penurunan dan tingkat kesadaran wajib tera ulang mengalami penurunan.

30. Urusan Fungsi Perencanaan

Hasil capaian kinerja indikator Program Fungsi Perencanaan disajikan pada tabel 2.216 berikut.

Tabel 2.216 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Perencanaan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
FUNGSI PERENCANAAN										
01. Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	%	100,00	100,00	112,72	Tercapai	112,72	112,72	Tercapai	Bappeda
02. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Bappeda
	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Bappeda
03. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Bappeda
04. Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	89,00	Tidak tercapai	89,00	89,00	Akan tercapai	Bappeda
05. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Bappeda

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Fungsi Perencanaan, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, dikarenakan salah satu dokumen perencanaan, yaitu dokumen masterplan drainase mengalami gagal lelang.

31. Urusan Fungsi Keuangan Daerah

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah disajikan pada tabel 2.217 berikut.

Tabel 2.217 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
FUNGSI KEUANGAN DAERAH										
01. Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	%	4,50	4,00	4,90	Tercapai	4,90	108,89	Tercapai	BKD
02. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	%	64,50	61,50	62,07	Tercapai	62,07	96,23	Akan tercapai	BKD
	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
	Persentase OPD yang menyesaikan laporan Persediaan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
03. Program Penyusunan Apbd Dan Pengelolaan Hibah Bansos	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
04. Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
05. Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	%	100,00	100,00	108,92	Tercapai	108,92	108,92	Tercapai	BKD
	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	%	100,00	100,00	27,71	Tidak tercapai	27,71	27,71	Belum tercapai	BKD
06. Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD
	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Fungsi Keuangan Daerah, terdapat 1 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi yang disebabkan pungutan retribusi yang belum sepenuhnya non tunai menjadikan sulitnya kontrol realisasi pendapatan retribusi secara tepat waktu.

32. Urusan Fungsi Kepegawaian dan Diklat

Hasil capaian kinerja indikator Urusan Program Fungsi Kepegawaian dan Diklat disajikan pada tabel 2.218 berikut.

Tabel 2.218 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Kepegawaian dan Diklat Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
FUNGSI KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT										
01. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	%	28,00	26,00	27,95	Tercapai	27,95	99,82	Akan tercapai	BKPPD
	Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	%	32,53	28,83	0,62	Tidak tercapai	0,62	1,91	Belum tercapai	BKPPD
02. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	%	25,00	23,00	23,00	Tercapai	23,00	92,00	Akan tercapai	BKPPD
03. Program Pelayanan Informasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan data PNS	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	BKPPD
04. Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	%	78,00	72,00	81,05	Tercapai	81,05	103,91	Tercapai	BKPPD
	Persentase PNS berkembang karier	%	40,00	42,00	36,96	Tidak tercapai	36,96	92,40	Akan tercapai	BKPPD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Fungsi Kepegawaian dan Diklat, terdapat 2 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan, yaitu :

a. Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar, disebabkan kuota dari Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas belajar bagi PNS sangat terbatas yang linier sesuai dengan pendidikan dan terdapat perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat untuk PNS yang mengikuti ijin belajar karena termasuk dalam pendidikan kelas jauh;
b. Persentase PNS berkembang karier, disebabkan adanya perubahan SOTK tentang Setda, kecamatan dan kelurahan.

33. Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel 2.219 berikut.

Tabel 2.219 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
01. Program Pengkajian Dan Penelitian	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	%	60,00	50,00	82,00	Tercapai	82,00	136,67	Tercapai	Bappeda
02. Program Pengembangan Iptek Dan Inovasi Daerah	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	%	95,00	95,00	100,00	Tercapai	100,00	105,26	Tercapai	Bappeda

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

34. Urusan Fungsi Lainnya

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Fungsi Lainnya disajikan pada tabel 2.220 berikut.

Tabel 2.220 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Lainnya Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
FUNGSI LAINNYA										
01. Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil I	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Inspektorat
	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil II	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Inspektorat
	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Inspektorat
	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Inspektorat
02. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase perda inisiatif yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Set DPRD
03. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	%	100,00	100,00	155,56	Tercapai	155,56	155,56	Tercapai	Setda
04. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)	Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
05. Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur	Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan	Indeks	88,00	80,00	82,21	Tercapai	82,21	93,42	Akan tercapai	Setda
	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	%	25,80	6,50	87,50	Tercapai	87,50	339,15	Tercapai	Setda

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
06. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	NA	15,00	12,00	11,09	Tidak tercapai	11,09	73,93	Belum tercapai	Setda
07. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Barat
	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Barat
	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Barat
08. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Timur
	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Timur
	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Timur
09. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Selatan	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Selatan
	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Selatan
	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Selatan
10. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Utara
	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Utara
	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Kec Pekl Utara

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
11. Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	%	100,00	61,29	61,29	Tercapai	61,29	61,29	Belum tercapai	Inspektorat
12. Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawalan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	%	80,65	48,39	54,84	Tercapai	54,84	68,00	Belum tercapai	Inspektorat
13. Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum	Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani	%	80,00	72,00	100,00	Tercapai	100,00	125,00	Tercapai	Setda
14. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	(blank)	7,00	1,00	2,00	Tercapai	5,00	71,43	Belum tercapai	Setda
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
15. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan	Persentase *medical general check up*	0	100,00	75,00	0,00	Tidak tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai	Setda
17. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan	Nilai LPPD	Indeks	3,06	3,04	3,23	Tercapai	3,23	106	Tercapai	Setda
	Persentase efektivitas kerjasama daerah	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
	Persentase realisasi patok batas wilayah	%	100,00	33,00	51,40	Tercapai	51,40	51,40	Tercapai	Setda

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
18. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	99,57	Tidak tercapai	99,57	99,57	Akan tercapai	Setda
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	100,00	100,00	95,29	Tidak tercapai	95,29	95,29	Akan tercapai	Setda
	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
19. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yang mendapatkan sertifikat/ syahadah	%	100,00	90,00	99,07	Tercapai	99,07	99,07	Akan tercapai	Setda
	Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan	%	100,00	90,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Setda
	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	95,00	85,00	100,00	Tercapai	100,00	105,26	Tercapai	Setda
20. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran	Persentase kerjasama informasi dengan mass media yang efektif	%	100,00	100,00	94,84	Tidak tercapai	94,84	94,84	Akan tercapai	Setda
	Persentase pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	%	100,00	100,00	50,00	Tidak tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai	Setda
21. Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP	Persentase capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilatas APIP	%	80,00	60,00	64,24	Tercapai	64,24	80,30	Akan tercapai	Inspektorat
22. Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Persentase penyelesaian TLHP APF	%	85,00	85,00	89,61	Tercapai	89,61	105,42	Tercapai	Inspektorat
23. Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang ditetapkan	%	100,00	100,00	27,00	Tidak tercapai	27,00	27,00	Belum tercapai	Set DPRD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Pada Fungsi Lainnya, terdapat 6 capaian indikator program yang tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana tercantum dalam tabel 2.221 berikut :

Tabel 2.221 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Indikator Program Fungsi Lainnya Tahun 2019

Indikator tidak tercapai target	Faktor Penyebab
a. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	Nilai pelaporan belum mencapai target, namun sudah naik dari capaian Tahun 2018
b. Persentase *medical general check up*	Belum adanya jadwal rencana pemeriksaan medical general check up serta tingginya mobilitas Kepala Daerah dan Wakil Daerah
c. Persentase kegiatan yang dilaksanakan	Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena perencanaan penyusunan anggaran yang kurang matang, Sumber Daya Manusia yang kurang dalam melaksanakan kegiatan, dan ada sisa dari anggaran pemeliharaan pekerjaan fisik konstruksi yang tidak dilakukan pencairan karena masih dalam masa pemeliharaan
d. Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Adanya 4 (empat) paket terkait, Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu (Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah), Biaya Konsultansi AMDAL Pasar Banjarsari (Pengembangan data dan informasi lingkungan), Pembangunan Menara Pandang *Viewing Deck* Obyek Wisata Pusat Informasi Mangrove (PIM), Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Drainase Kota Pekalongan (Kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase) tidak dapat dilaksanakan (gagal lelang) disebabkan oleh jumlah penawaran yang masuk tidak memenuhi kriteria dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
e. Persentase Perda yang ditetapkan	Dari 11 raperda yang ditetapkan dalam prolegda, hanya terealisasi 3 perda

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

35. Urusan Penunjang Pemerintahan

Hasil capaian kinerja indikator Program Urusan Penunjang Pemerintahan disajikan pada tabel 2.222 berikut.

Tabel 2.222 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun 2019

Urusan/Program	Indikator	Satuan	RPJMD	RKPD 2019			RPJMD			Kewenangan
			Target Akhir	Target Kinerja	Capaian Realisasi	Status Ketercapaian	Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Tingkat Capaian RPJMD sd Tahun 2019	Status Ketercapaian terhadap Target RPJMD	
PENUNJANG PEMERINTAHAN										
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Semua OPD
02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Semua OPD
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur	%	100,00	90,00	90,00	Tercapai	90,00	100,00	Tercapai	Semua OPD
04. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Semua OPD
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian aparatur berkompeten	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai	Semua OPD
06. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Pengaduan yang diterima	kasus	0,00	0,00	0,00	Tercapai	0,00	100,00	Tercapai	Semua OPD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

RKPD Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019. Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2019 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian program berdasarkan Urusan dan Bidang Urusan.

Selain permasalahan-permasalahan yang sudah terstruktur dalam rangkaian perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun 2020 ini, Kota Pekalongan mengalami permasalahan yang sangat serius. Permasalahan tersebut tidak hanya di Kota Pekalongan, namun juga terjadi secara nasional dan global, yaitu pandemi COVID-19.

Permasalahan yang timbul sebagai dampak dari COVID-19 ini setidaknya berimbas pada beberapa bidang pembangungan, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan sistem penganggaran.

Di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 yang mendadak dan tanpa diduga sebelumnya memberikan beberapa catatan penting, antara lain :

1. Tidak mencukupinya ruang perawatan pada layanan yang bersifat khusus pada rumah sakit. Disamping itu, keterbatasan ruang dan bangunan gedung yang dimiliki, membuat Pemerintah Kota Pekalongan cukup kesulitan untuk menyedikan ruangan tambahan.
2. Tidak tersedianya alat kesehatan yang memadai bahkan untuk peralatan yang sederhana seperti sarung tangan dan masker. Tidak adanya regulasi yang memungkinkan pengambil-alihan sumber-sumber daya strategis oleh Negara menjadi salah satu kendala, sehingga Pemerintah tidak dapat bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan.
3. Tidak tersedianya sistem cadangan dalam penyediaan tenaga kesehatan seperti halnya Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA) yang pernah ada di sistem pemerintahan kita. Sistem semacam itu secara rutin memberikan pelatihan sumber daya manusia yang selanjutnya difungsikan sebagai tenaga cadangan. Sehingga, sewaktu-waktu dapat dikerahkan apabila Negara membutuhkan.

Di bidang Pendidikan, pembelajaran menggunakan metode daring mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Tidak atau belum adanya materi pembelajaran / materi evaluasi yang secara khusus dipersiapkan untuk digunakan dengan metode daring dalam jangka waktu yang relative lama.
2. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya bertujuan pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku peserta didik, tidak atau belum dapat difasilitasi dengan metode daring.
3. Tidak atau belum adanya persiapan bagi pendidik untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan menggunakan daring.
4. Kuat lemahnya jaringan telekomunikasi yang tidak merata antar area menjadi kendala tersendiri untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran metode daring secara merata kepada semua peserta didik.
5. Ketidaksiapan orang tua untuk memberikan pendampingan selama proses belajar mengajar juga menambah ketidakberhasilan KBM dengan metode daring.

Bidang lain yang tidak kalah berat dampaknya dari wabah COVID-19 adalah sosial ekonomi. Lesunya perekonomian telah mendorong sektor-sektor usaha yang selama ini

padat tenaga banyak yang harus merumahkan atau bahkan melakukan putus hubungan kerja. Akibatnya, terjadi kenaikan angka pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat, serta menambah kemiskinan baru dalam jumlah banyak.

Di sisi lain, melambatnya perputaran ekonomi telah berpengaruh secara negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ditambah lagi, bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi ini berakibat pada tidak berjalannya program dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun indikator-indikator yang selama ini belum dirilis, tetapi banyak ahli yang sudah memprediksikan berbagai kondisi buruk yang harus dilakukan recovery pada tahun-tahun yang akan datang.

2.2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019

2.2.3.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2019, ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan tidak tercapai. Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.223 berikut.

Tabel 2.223 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/ MTs)	100%	98,48%	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2,39 %	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	99,16 %	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

2.2.3.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiancy Virus).

Adapun hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.224 berikut.

Tabel 2.224 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	97.73%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	100%	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100%	99.88%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	94.81%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	99.29%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	16.69%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	29.91%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96.34%	Tidak Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Ganguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	69.68%	Tidak Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tubercolusis (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinveksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

Secara umum dari 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan, yang sudah mencapai target 100% sebanyak 3 indikator (25%) sedangkan 9 indikator lainnya belum dapat tercapai. Indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum dapat dicapai dikarenakan sasaran yang dilayani pada 9 jenis pelayanan tersebut adalah warga yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. sedangkan warga yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan yang belum pernah mendapatkan pelayanan belum dilakukan pendataan.

2.2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.225 berikut.

Tabel 2.225 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	83,83 %	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99,32 %	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari tidak tercapai karena tidak semua masyarakat menggunakan air bersih/air minum yang mengakses jaringan air bersih/air minum perpipaan yang terlindungi. Sedangkan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic tidak tercapai karena tidak semua warga masyarakat menggunakan IPAL Komunal, akses masyarakat dalam fasilitasi sanitasi masih ada yang di sungai/lahan kosong.

2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.226 berikut.

Tabel 2.226 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	N/A	N/A

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota pada tahun 2019 tercapai. Dari 59 permohonan bantuan, seluruhnya disetujui sehingga capainnya 100%. Sementara itu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak tersedia data karena tidak ada relokasi akibat adanya Program Pemerintah Daerah.

2.2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.227 berikut.

Tabel 2.227 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	0,30%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	8,26%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	8,26%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

Dari kelima indikator tersebut, 2 indikator mencapai target dan 3 indikator tidak mencapai target.

2.2.3.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.228 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019, 2020

Dari kelima indikator tersebut, semua dapat tercapai sesuai target 100%.

2.2.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan *(the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs)* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDG's ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDG's Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.2.4.1 Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 47 target dan 77 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 65 indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.229 berikut.

Tabel 2.229 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	BPS	persen	6,28	6,60	Tidak Tercapai
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	DINKES	persen	90%	80,05	Tidak Tercapai
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER	persen			Data tidak tersedia karena bukan kewenangan Dinperinaker
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/ Program Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	-	4.368	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100%	93,89	Tidak Tercapai
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen		65,06	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	persen	91,07	97,09	Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memilki	Cakupan Pelayanan Sanitasi	Cakupan Pelayanan	DINPERKIM	persen	94,65	99,32	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		Sanitasi					
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani	Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani	DINPERKIM	persen	-	80,02	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	94,5	79,03	Tidak Tercapai
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	76,5	61,14	Tidak Tercapai
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran	DINDUKCAPIL	persen	73	52	Tidak tercapai
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	DINSOSP2KB	%	-	9	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	BPBD	Dokumen	-	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen)*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	91,30	91,31	Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DINPERPA	persen	91,30	91,31	Tercapai
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/ hari	DINKES	persen	2,2	13,22	Tercapai
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	DINKES	persen	6,9	6,87	Tercapai
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	DINKES	persen	<0,5	0,001	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	tahun, berdasarkan tipe)							
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah kasus anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	9,04	10,28	Tidak tercapai
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	persen	45,00%	57,20	Tercapai
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	91,30	91,31	Tercapai
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINKES	Per 100.000 KH	105	101,30	Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	12,35	16,04	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	6,80	7,77	Tidak Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	9,65	11,99	Tidak Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Cakupan UCI desa	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.3.1 (a)	-	Prevalensi HIV-AIDS	Jumlah kasus HIV/AIDS	DINKES	orang	100	100	Tercapai
3.3.2 (a)	-	Jumlah Insiden TB	Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	DINKES	kasus	100	100	Tercapai
3.3.4. (a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah kasus hepatitis B	DINKES	kasus		64	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	26,81	Tidak Tercapai
3.3.5 (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	155,73	Tidak Tercapai
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	29,91	Tidak Tercapai
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Deteksi dini obesitas pada penduduk usia 15+ tahun di fasyankes	DINKES	persen	16	48,75	Tercapai
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna an narkoba	KESBANGPOL	orang	-	29	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahguna an NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	KESBANGPOL	orang	-	38	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/diban tu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna an NAPZA yang telah dikembangkan /dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	-	2	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen		65,06	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,27	2,112	Tercapai
3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	DINSOS P2KB	persen	24	20,51	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
			(MKJP) cara modern					
3.8.1 (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need KB	DINSOS P2KB	persen	10	22,29	Tidak tercapai
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES	persen		23,1	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi A	DINDIK	persen	-	97,32	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi A	DINDIK	persen	-	97,37	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	100	98,32	Tidak tercapai
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	100	106,27	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat	Kemendiknas	persen	-	96,29	Bukan kewenangan Kota
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	DINDIK	persen	61	69,64	Tercapai
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA /sederajat	BPS	persen	-	-	Bukan kewenangan Kota
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	-	-	Bukan kewenangan Kota
4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	1) APM SD/MI/ sederajat 2) APM SMP/MTs/Sederajat (2018)	DINDIK	persen	1) 94,5 2) 76,5	1) 79,03 2) 61,14	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Angka melek huruf	Dindik	persen	98,5	99,98	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar	% Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs	-	persen	-	-	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	nasional pendidikan	sesuai standar nasional pendidikan					
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	59	52,71	Tidak tercapai
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	BAPPEDA		-	5	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	-	-	Data tidak tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	-	-	Data tidak tersedia
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	100	Tercapai
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOSP2KB	Kasus	321	401	Tidak Tercapai
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Kemendiknas	persen	-	96,29	Bukan kewenangan Kota

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	-	11,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	-	38,97	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.6.1 (a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	*Unmet need* KB	*Unmet need* KB	DINSOS P2KB	persen	10	22,29	Tidak Tercapai
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepi modern	DINSOS P2KB	Persen	-	65,06	Tidak ada target tetapi data tersedia

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

2.2.4.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.230 berikut.

Tabel 2.230 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN-ESDM-BPS	persen	-	-	Data tidak tersedia
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita	-	-	Data tidak tersedia
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS / Bappeda	persen	5,75	5,5	Tidak tercapai
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	-	35,42	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen	-	-	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah Minimum Kota	Dinperinaker	Rupiah	-	1.906.922,47	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS / Bappeda	persen	3,7	5,77	Tidak Tercapai
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Jumlah pelatihan untuk pemuda	DINPERINAKER	orang	-	144	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	815	Tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	524.500	720.001	Tercapai
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	%	76,64	79,78	Tercapai
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	-	-	Data tidak tersedia
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	-	-	Data tidak tersedia
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINFO	Persen	-	-	Data tidak tersedia
10.1.1*	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS / Bappeda	-	-	-	Data tidak tersedia
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS / Bappeda	persen	6,28	6,6	Tidak tercapai
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik	Persentase konsumen Badan Pusat	BPS	persen	-	80	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	(BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	(BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik					
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs Kota	Bappeda	indikator	222	129	Tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

2.2.4.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 6 *goals* 56 target dan 69 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 19 indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.231 berikut.

Tabel 2.231 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	91,99	97,09	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	-	12.196.014	Tidak ada target tetapi data tersedia
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	94,65	99,32	Tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	-	-	Data tidak tersedia
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	14	21	Tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat	DLH	Persen	-	1	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	skala kota, kawasan, dan komunal					
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH	-	-	-	Data tidak tersedia
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	95,95	96,93	Tercapai
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	-	947,14	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	-	86,30	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH	-	-	-	Data tidak tersedia
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	18,80	8,23	Tidak tercapai
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	-	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	-	-	Data tidak tersedia
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	DLH	Ton/ tahun	-	-	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
	(sektor industri).	(sektor industri).	(sektor industri)					
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	-	-	Data tidak tersedia
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	-	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	-	947,14	Tidak ada target tetapi data tersedia
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP	orang	-	193	Tidak ada target tetapi data tersedia

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

2.2.4.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 1 *goals* 12 target dan 23 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 13 indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.232 berikut.

Tabel 2.232 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	DPMPPA	-	-	-	Data tidak tersedia
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS	-	-	-	Data tidak tersedia
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Realisasi APBD Pemerintah Kota	BKD	Rupiah	1.067.620.411.000	954.397.012.827	Tidak tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BAGIAN ORGANISASI		BB	-	Data tidak tersedia
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	%	100	80	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Sat	Target dan Capaian Tahun 2019		Ket
						Target	Capaian	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	IKM	BAGIAN ORGANISASI		80	82,21	Tercapai
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	-	11,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	-	38,97	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	-	99,38	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	-	91,92	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		-	35	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	66,67	70,00	Tercapai
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	31,58	87,10	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini akan membahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada periodesasi RPJMD mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Pekalongan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Pekalongan tahun 2016-2019. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut.

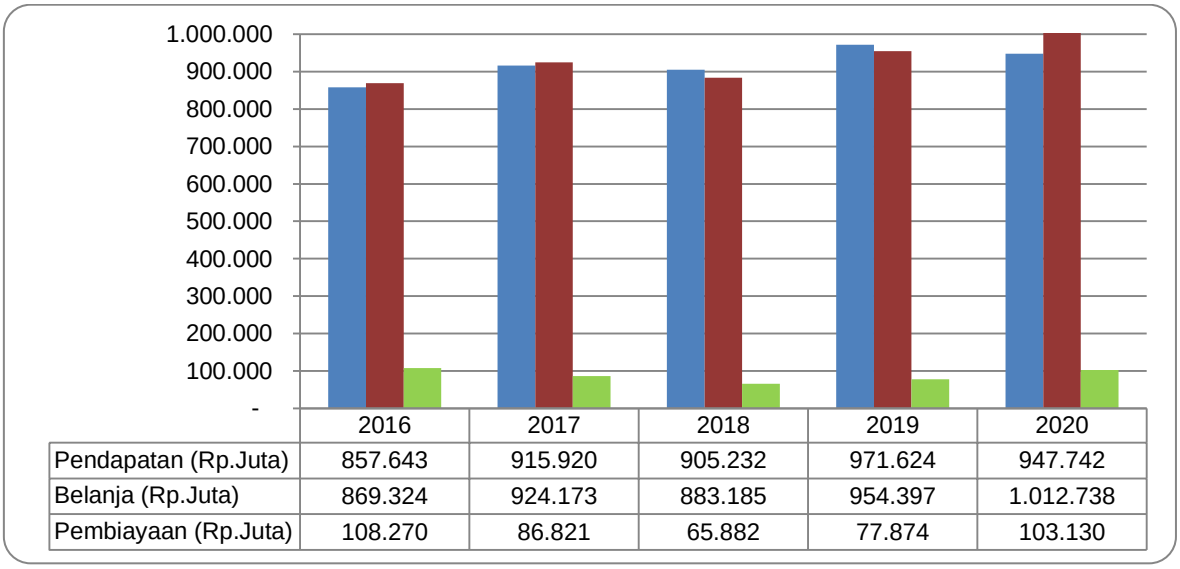

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan (Rp.Juta)	857.643	915.920	905.232	971.624	947.742
Belanja (Rp.Juta)	869.324	924.173	883.185	954.397	1.012.738
Pembiayaan (Rp.Juta)	108.270	86.821	65.882	77.874	103.130

Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,63 persen, dimana pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 857.642.985.779,- menjadi Rp. 947.741.700.921,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar 4,70 persen dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 1,44 persen. Walaupun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, pendapatan daerah untuk tahun 2018 mengalami penurunan. Yang berkontribusi terhadap penurunan pendapatan daerah ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 disusun pada tahun 2020 sehingga untuk angka 2020 masih menggunakan angka estimasi. Jika dibandingkan dengan 2019, tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan. Hal ini karena adanya pandemi COVID-19.

Berikut penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018:

1) Retribusi Terminal yang kewenangannya ditarik oleh pemerintah pusat.
2) Dengan berlakunya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 bahwa sewa nilai titik strategis pada tanah negara, jalan nasional dan provinsi dipungut oleh Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemerintah Kota Pekalongan tidak berhak memungut retribusi sewa nilai titik strategis pada jalan nasional maupun jalan provinsi
3) Beberapa retribusi yang kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinisi dan retribusi.
4) Pada awal tahun 2018 Kota Pekalongan mengalami musibah terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Musibah ini yang menjadi salah satu faktor penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar.
5) Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan TPI karena :
   - Adanya perubahan *fishing ground* untuk kapal diatas 100GT beralih ke perairan Papua dan Natuna.
   - Pendangkalan alur muara sungai sehingga kapal ikan ukuran besar tidak dapat masuk pelabuhan Pekalongan
   - Tidak adanya pembeli ikan dengan kapasitas besar.
6) Banjir rob di Pantai Slamaran maupun Pantai Sari sehingga jumlah pengunjung rekreasi menjadi turun, yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
7) Terjadinya penurunan suku bunga deposito, dan Pemerintah Kota Pekalongan melakukan kebijakan menarik beberapa deposito di Bank-Bank swasta, sehingga menurunkan realisasi pada Penerimaan Bunga Deposito.
8) Turunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambahkan Penyertaan Modalnya pada BUMD-BUMD milik Pemerintah Kota Pekalongan sehingga berkurangnya persentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD-BUMD milik Pemerintah Kota Pekalongan yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali.
9) Realisasi Pendapatan BLUD dibawah 75% karena terbitnya beberapa Peraturan Direktur BPJS dan kebijakan BPJS yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
   - Adanya sistem vedika yang menyebabkan segela penyelesaian klaim tidak berakhir di bulan pengklaiman (pending klaim)
   - Pembatasan pelayanan di Rumah Sakit untuk jenis pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, rehabilitasi medik sehingga mengurangi potensi pendapatan.
   - Adanya perlakuan rujukan berjenjang pada fasilitas kesehatan.
   - Adanya aturan jam waktu layanan dokter (pembatasan kuota pasien rajal perhari).
   - Pemberlakuan laporan polisi untuk kasus kecelakaan kerja yang memberlakukan manfaat dari pinjaman lain seperti Jasa Raharja, Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan.

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tercantum pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI				Estimasi Realisasi 2020	Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019		
PENDAPATAN	**857.642,99**	**915.920,38**	**905.231,57**	**971.624,46**	**947.741,70**	**2,63%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**178.604,46**	**192.002,87**	**179.224,41**	**212.777,44**	**211.127,38**	**4,70%**
Pendapatan Pajak Daerah	52.837,47	61.252,65	70.561,33	87.578,47	73.164,27	9,70%
Hasil Retribusi Daerah	16.799,18	15.108,81	15.985,71	16.667,66	13.777,94	-4,33%
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.977,59	4.966,68	5.920,24	6.101,17	5.818,48	-8,15%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98.990,22	110.674,73	86.757,13	102.430,13	118.366,69	5,95%
PENDAPATAN TRANSFER	**677.038,52**	**723.917,51**	**702.228,40**	**734.897,35**	**714.117,92**	**1,44%**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**598.621,16**	**636.772,09**	**619.629,79**	**643.593,76**	**630.203,92**	**1,37%**
Bagi Hasil Pajak	30.837,69	26.992,33	25.352,86	17.751,48	29.147,37	3,92%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.285,55	1.116,74	1.340,17	1.275,75	2.701,61	28,46%
Dana Alokasi Umum	457.085,26	449.055,74	449.055,74	475.842,09	436.146,58	-1,03%
Dana Alokasi Khusus	109.412,67	108.994,06	110.631,03	115.463,50	103.852,45	-1,14%
Dana Insentif Daerah	-	50.613,22	33.250,00	33.260,94	58.355,91	10,29%
Transfer Pemerintah Provinsi	**78.417,36**	**87.145,42**	**82.598,61**	**91.303,59**	**83.914,00**	**2,09%**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	54.871,18	59.928,56	75.273,77	72.167,44	72.000,00	7,62%
Bantuan Keuangan Provinsi	23.546,18	27.216,85	7.324,84	19.136,15	11.914,00	16,50%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.000,00**	**-**	**23.778,76**	**23.949,68**	**22.496,40**	**0,00%**
Pendapatan Hibah	2.000,00	-	23.778,76	23.949,68	22.496,40	#DIV/0!
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

3.1.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI				Estimasi Realisasi 2020	Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019		
BELANJA	**869.324,08**	**924.172,72**	**883.184,89**	**954.397,01**	**1.012.737,89**	**4,01%**
BELANJA OPERASI	**665.776,83**	**701.915,67**	**734.880,49**	**771.512,59**	**809.711,07**	**5,02%**
Belanja Pegawai	356.664,32	319.969,89	352.531,37	390.898,34	424.636,37	4,85%
Belanja Barang dan Jasa	264.202,28	327.506,73	317.053,71	336.953,79	338.163,16	6,85%
Belanja Bunga	-	-	-	6,80	-	
Belanja Subsidi	-	548,40	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah	40.945,75	45.614,52	53.429,60	30.031,91	40.956,06	5,28%
Belanja Bantuan Sosial	3.964,48	8.276,14	11.865,82	13.621,74	5.955,49	27,66%
BELANJA MODAL	**201.951,33**	**220.686,79**	**146.382,59**	**182.153,98**	**139.410,65**	**-5,86%**
Belanja Modal Tanah	5.030,86	44.431,56	19.140,41	3.912,17	14.074,22	226,61%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.255,00	45.394,39	30.284,35	34.699,45	32.035,20	-11,06%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.211,21	61.475,61	53.081,58	71.367,20	35.721,20	-6,33%

URAIAN	REALISASI				Estimasi Realisasi 2020	Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019		
Belanja Modal Jalan	80.674,56	66.851,89	38.704,73	68.876,03	56.887,97	0,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.576,19	2.011,73	5.171,52	3.299,13	692,07	17,37%
Belanja Aset Lainnya	203,51	521,62	-	-	-	0,00%
BELANJA TAK TERDUGA	**1.595,93**	**1.570,26**	**1.921,82**	**730,44**	**63.616,17**	**2142,02%**
Belanja Tak Terduga	1.595,93	1.570,26	1.921,82	730,44	63.616,17	2142,02%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan terlihat pada tabel 3.3. Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa SiLPA 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin baik.

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI				Estimasi Realisasi 2020	Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019		
PEMBIAYAAN	**108.270,00**	**86.820,71**	**65.881,53**	**77.874,26**	**103.130,18**	**1,68%**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**118.529,00**	**96.715,28**	**78.606,61**	**92.028,39**	**107.651,71**	**-0,77%**
Penggunaan SiLPA	118.485,82	96.588,64	78.568,37	87.928,21	95.101,71	-4,27%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	300,00	12.550,00	
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	1.800,00	-	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	43,18	126,64	38,24	2.000,18	-	1751,34%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.259,00**	**9.894,58**	**12.725,08**	**14.154,13**	**4.521,53**	**-7,94%**
Pembentukan Dana Cadangan	-	4.094,58	4.302,39	4.607,39	-	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.259,00	5.800,00	8.400,00	7.742,00	4.518,00	-12,03%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	22,69	1.804,74	3,53	0,00%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kota Pekalongan pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. Rincian Neraca Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan
Aset Lancar					
Kas	98,07	78,72	87,93	95,10	0,04
Piutang	18,32	31,22	29,52	43,38	37,30
Piutang lainnya	8,94			-	-100,00
Persediaan	9,06	11,16	12,21	15,59	20,10
Biaya dibayar dimuka	0,03	0,06	0,13	0,14	73,25

Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan
Jumlah aset lancer	**134,42**	**121,16**	**129,79**	**154,21**	**5,36**
Investasi jangka Panjang				-	
Investasi non permanen	3,19	3,19	3,20	1,20	-20,75
Iinvestasi permanen	71,30	76,36	84,51	90,95	8,46
Jumlah investasi jangka Panjang	**74,49**	**79,55**	**87,71**	**92,15**	**7,37**
Aset tetap				-	
Tanah	1.036,97	1.014,73	1.048,42	1.311,20	8,75
Peralatan dan mesin	319,03	354,48	383,32	455,16	12,66
Gedung dan bangunan	633,77	706,51	697,20	763,79	6,57
Jalan, jaringan dan instalansi	534,75	625,26	723,05	829,61	15,77
Aset tetap lainnya	25,51	31,56	35,76	35,87	12,44
Konstruksi dalam pengerjaan	43,82	27,97	2,38	16,58	156,21
Akumulasi penyusutan	-660,63	-754,52	-825,68	-959,64	13,29
Jumlah aset tetap	**1.933,22**	**2.005,98**	**2.064,45**	**2.452,57**	**8,49**
Dana cadangan				-	
Dana cadangan	-	4,09	8,40	12,70	-
Jumlah dana cadangan	**-**	**4,09**	**8,40**	**12,70**	**-**
Aset lainnya	-			-	-
Tagihan piutang penjualan angsuran	-	-	-	-	-
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	12,33	16,81	16,81	12,58	3,73
Aset tidak berwujud	13,70	0,95	1,25	1,28	-19,55
Aset lain-lain	8,74	82,46	154,43	130,96	305,20
Aset rusak berat/proses penghapusan				-	
Uang Jaminan	0,15	0,17	0,22	0,22	13,70
Jumlah aset lainnya	**34,92**	**100,39**	**172,71**	**145,04**	**81,17**
JUMLAH ASET	**2.177,05**	**2.311,17**	**2.463,05**	**2.856,67**	**9,57**
KEWAJIBAN				-	
Kewajiban jangka pendek				-	
Utang perhitungan pihak ketiga	0,03	0,15	0,00	-	71,26
Utang bunga	-	-	-	-	-
Utang pajak	-	-	-	-	-
Bagian lancar utang jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1,29	1,24	1,29	1,37	2,19
Utang Belanja	4,39	5,47	14,00	24,21	84,49
Utang jangka pendek lainnya	3,99	6,18	0,04	0,04	-14,51
Utang Jangka Pendek pada Kemitraan Pihak ketiga				-	
Utang uang jaminan	0,15	0,17	0,22	0,22	13,70
Jumlah kewajiban jangka pendek	**9,85**	**13,22**	**15,54**	**25,84**	**39,35**
Kewajiban jangka Panjang	-	-	-	-	-
Utang dalam negeri	-	-	-	-	-
Utang luar negeri	-	-	-	-	-
Jumlah kewajiban jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah kewajiban	**9,85**	**13,22**	**15,54**	**25,84**	**39,35**
EKUITAS DANA				-	-
Ekuitas Dana	**2.167,20**	**2.297,95**	**2.447,51**	**2.830,83**	**9,40**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.177,05**	**2.311,17**	**2.463,05**	**2.856,67**	**9,57**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis Pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji pegawai dan tenaga kontrak Walikota. Khusus Tahun 2016, belanja pegawai termasuk di dalamnya adalah gaji guru SMA dan SMK, sehingga dalam analisis ini dikeluarkan dari perhitungan.

Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2016-2019

URAIAN	Realisasi (Rp. Juta)			
	2016	2017	2018	2019
Total Belanja Pegawai	316.657	319.970	352.531	390.898
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	879.583	934.067	895.910	968.551
Proporsi Belanja Aparatur	36,00%	34,26%	39,35%	40,36%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

Secara rupiah untuk belanja pegawai lima tahun terakhir mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 316.657.370.739,- dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 390.898.339.975,-. Secara proporsi juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 proporsi belanja pegawai sebesar 36,00%, dan tahun 2019 menjadi 40,36%. Kenaikan tersebut disebabkan kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2018 dengan TMT CPNS 01-03-2019 sebanyak 271 orang, adapun jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) selama tahun 2019 berjumlah 145 orang disamping kenaikan komponen lainnya termasuk kenaikan belanja insentif pajak dan retribusi yang mengikuti kenaikan capaian realisasi target pendapatan.

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari : Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, sisa belanja DAK, sisa belanja dana bagi hasil, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan

penerimaan pembiayaan daerah, sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah), penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari : Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah. Defisit riil anggaran tahun 2016-2019 terlihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2016-2019

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Juta)			
		2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	857.642,99	915.920,38	905.231,57	971.624,46
	Dikurangi Realisasi :				
2	Belanja Daerah	869.324,08	924.172,72	883.184,89	954.397,01
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.259,00	9.894,58	12.725,08	14.154,13
	Defisit riil	-21.940,10	-18.146,92	9.321,60	3.073,32

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2016, 2017 dan estimasi 2020 terdapat defisit, namun pada tahun 2018 dan 2019 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Komposisi Penutup Riil Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2016-2019

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Penggunaan SiLPA	540,04	440,24	surplus	surplus
2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,20	0,58	surplus	surplus
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	surplus	surplus
4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	surplus	surplus

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi.

Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas Covid-19.

Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2025 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,65 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 937.933.186.000,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2025 menjadi Rp. 1.041.476.410.000,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan tetap. Dana perimbangan yang setiap tahunnya diproyeksikan naik adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata sebesar 2,50 persen. DAU diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN melalui pengadaan CPNS dan asumsi kenaikan gaji ASN.

Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025

URAIAN	Pertumb 2016-2020	Estimasi Realisasi 2020	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2021	2022	2023	2024	2025	
PENDAPATAN	**2,63%**	**947,74**	**937,93**	**964,76**	**987,04**	**1.014,36**	**1.041,48**	**2,65%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**4,70%**	**211,13**	**203,81**	**211,15**	**222,15**	**237,90**	**253,15**	**5,58%**
Pendapatan Pajak Daerah	9,70%	73,16	82,60	86,70	91,70	97,35	103,11	5,70%
Hasil Retribusi Daerah	-4,33%	13,78	15,81	16,05	16,76	17,55	18,31	3,75%
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-8,15%	5,82	5,63	5,95	6,47	6,86	7,18	6,27%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,95%	118,37	99,77	102,45	107,22	116,14	124,55	5,73%
PENDAPATAN TRANSFER	**1,44%**	**714,12**	**711,74**	**731,23**	**742,51**	**754,08**	**765,94**	**1,85%**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**1,37%**	**630,20**	**621,78**	**641,27**	**652,55**	**664,12**	**675,98**	**2,11%**
Bagi Hasil Pajak	3,92%	29,15	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28,46%	2,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00%
Dana Alokasi Umum	-1,03%	436,15	440,51	451,52	462,81	474,38	486,24	2,50%
Dana Alokasi Khusus	-1,14%	103,85	134,66	134,66	134,66	134,66	134,66	0,00%
Dana Insentif Daerah	10,29%	58,36	21,53	30,00	30,00	30,00	30,00	9,84%
Transfer Pemerintah Provinsi	**2,09%**	**83,91**	**89,96**	**89,96**	**89,96**	**89,96**	**89,96**	**0,00%**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	7,62%	72,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	0,00%
Bantuan Keuangan Provinsi	16,50%	11,91	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**22,50**	**22,38**	**22,38**	**22,38**	**22,38**	**22,38**	**0,00%**
Pendapatan Hibah		22,50	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	0,00%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016 – 2019 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak pendemi Covid-19 sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2025 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 5,58 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp. 203.812.400.000,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp. 253.154.735.000,-. Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 6,27 persen dimana pada tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp. 5.632.000.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2025 sebesar Rp 7.179.472.000,-. Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang sah mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari target yang ditetapkan karena untuk pendapatan BLUD RSUD terdapat pembayaran piutang atas klaim BPJS yang nilainya sampai Rp. 36 Milyar. Oleh karena itu untuk proyeksi Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 akan mengalami penurunan jika dibanding realisasi 2020.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selain Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah tahun 2021-2025 asumsikan tetap walaupun perkembangan tahun 2016-2020 sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Untuk Dana Insentif Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 9,84 persen, dimana di tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp 21.529.525.000,- dan meningkat di tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000.000,-. Akan tetapi proyeksi Dana Insentif Daerah tahun 2022 – tahun 2025 diasumsikan tetap. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi tahun 2021-2025 diasumsikan tetap walaupun perkembangan tahun 2016-2020 sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Sementara untuk pos Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2021-2025 diproyeksikan tetap.

Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan untuk tahun 2021-2025 diproyeksikan diasumsikan tetap.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Dana Perimbangan. Seperti yang terlihat pada tabel 3.8, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan, antara lain sebagai berikut:

1. E-monitoring pajak daerah merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : tapping box dan sejenisnya.Tujuan e-Monitoring Pajak Daerah :
   a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak

b) Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
d) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
e) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

2. Pemberian *Reward dan Punishment*
   a) Pemberian *Reward*, seperti :
      - Penganugerahan Walikota Pekalongan Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
      - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
   b) Pemberian *Punishment*, berupa :
      - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
      - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
4. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
5. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
6. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
7. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya
8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
10. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB,

BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.

15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
18. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk tahun 2021-2025 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,41 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.019.176.759.000,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2025 menjadi Rp. 1.120.522.387.000,-. Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen dengan perincian:
   a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 5,00 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kenaikan ini juga sudah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD.
   b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp. 4 Miliar yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage*. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
   c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan turun rata-rata sebesar 2,50 persen pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.
   d. Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2022 disumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 2021, yaitu sebesar Rp 6.617.400.000.
2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 persen.
3) Belanja Tak Terduga sejak tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-/tahun

Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025

URAIAN	Pertumb 2016-2020	Estimasi Realisasi 2020	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumb uhan
			2021	2022	2023	2024	2025	
BELANJA	**4,01%**	**1.012,74**	**1.019,18**	**1.040,38**	**1.061,79**	**1.108,26**	**1.120,52**	**2,41%**
BELANJA OPERASI	**5,02%**	**809,71**	**843,95**	**863,62**	**883,32**	**928,05**	**938,56**	**2,70%**
Belanja Pegawai	4,85%	424,64	435,19	456,95	479,79	503,78	528,97	5,00%
Belanja Barang dan Jasa	6,85%	338,16	364,21	370,78	368,36	375,82	375,14	0,75%
Belanja Hibah	5,28%	40,96	37,93	29,28	28,55	41,84	27,84	-3,06%
Belanja Bantuan Sosial	27,66%	5,96	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	0,00%
BELANJA MODAL	**-5,86%**	**139,41**	**170,05**	**171,75**	**173,47**	**175,21**	**176,96**	**1,00%**
BELANJA TAK TERDUGA	**2142,02%**	**63,62**	**5,18**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**-0,86%**

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020, Bappeda, 2020, diolah

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiyaan Daerah untuk tahun 2021-2025 diproyeksikan naik dengan rata-rata penurunan sebesar 0,43 persen pertahun. Khusus tahun 2024 ada peningkatan penerimaan pembiayaan karena ada pencairan dana cadangan Pilkada sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2021 sampai 2025 ditargetkan turun sebesar 1,00 persen pertahun. Selain itu, mulai Tahun 2021 sampai 2023 pada pos pengeluaran pembiayaan direncanakan pembentukan dana cadangan Pilkada Tahun 2024. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ditunjukkan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2025

URAIAN	Pertumb 2016-2020	Estimasi Realisasi 2020	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumb uhan
			2021	2022	2023	2024	2025	
PEMBIAYAAN	**1,68%**	**103,13**	**81,24**	**75,62**	**74,75**	**93,89**	**79,05**	**0,43%**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-0,77%**	**107,65**	**87,49**	**86,62**	**85,75**	**98,89**	**84,05**	**-0,42%**
Penggunaan SiLPA	-4,27%	95,10	87,49	86,62	85,75	84,89	84,05	-1,00%
Pencairan Dana Cadangan		12,55	-	-	-	14,00	-	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1751,34%	-	-	-	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-7,94%**	**4,52**	**6,25**	**11,00**	**11,00**	**5,00**	**5,00**	**5,36%**
Pembentukan Dana Cadangan		-	2,00	6,00	6,00	-	-	0,00%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-12,03%	4,52	4,25	5,00	5,00	5,00	5,00	4,41%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	-	-	-	-	-	

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020, Bappeda, 2020, diolah

3.3.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

   Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

   a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Walikota.
   b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Walikota.
   c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.

2) Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3) Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ditunjukkan Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	**Belanja Operasi**	**345.916,37**	**351.548,23**	**387.624,54**	**433.265,82**	**474.182,68**	**8,28%**
1	Belanja Pegawai	316.657,37	319.969,89	352.531,37	390.898,34	424.636,37	7,68%
2	Belanja Barang dan Jasa	29.259,00	31.578,35	35.093,17	42.367,48	49.546,32	14,18%
B	**Belanja Tidak Terduga**	**1.595,93**	**1.570,26**	**1.921,82**	**730,44**	**63.616,17**	
4	Belanja Tidak Terduga	1.595,93	1.570,26	1.921,82	730,44	63.616,17	2142,02%
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.259,00**	**9.894,58**	**12.702,39**	**12.349,39**	**4.518,00**	**-10,34%**
5	Penyertaan Modal Daerah	10.259,00	5.800,00	8.400,00	7.742,00	4.518,00	-12,03%
6	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	4.094,58	4.302,39	4.607,39	0,00	-29,28%
Jumlah		**357.771,30**	**363.013,07**	**402.248,74**	**446.345,65**	**542.316,85**	**11,18%**

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020, Bappeda, 2020, diolah

Dari data diatas, berdasarkan estimasi realisasi Tahun 2020, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2021-2025 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2021-2025

No.	Uraian	Rata-rata pertumb 2016-2020	Estimasi Realisasi 2020	PROYEKSI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumbuhan
				2021	2022	2023	2024	2025	
A	**Belanja Operasi**	**8,28%**	**474.182,68**	**493.580,69**	**523.516,92**	**555.694,27**	**604.343,98**	**627.703,18**	**6,21%**
1	Belanja Pegawai	7,68%	424.636,37	435.187,54	456.946,92	479.794,27	503.783,98	528.973,18	5,00%
2	Belanja Barang dan Jasa	14,18%	49.546,32	57.633,14	65.810,00	75.140,00	85.800,00	97.970,00	14,18%
3	Hibah		760,00	760,00	760,00	760,00	14.760,00	760,00	
B	**Belanja Tidak Terduga**		**63.616,17**	**5.177,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-0,86%**
4	Belanja Tidak Terduga	21,42	63.616,17	5.177,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-0,86%
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-10,34%**	**4.518**	**6.250**	**11.000**	**11.000**	**5.000**	**5.000**	**5,36%**
5	Penyertaan Modal Daerah	-12,03%	4.518,00	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	4,41%
6	Pembentukan Dana Cadangan	-29,28%	-	2.000	6.000	6.000	-	-	
Jumlah			**542.316,85**	**505.007,91**	**539.516,92**	**571.694,27**	**614.343,98**	**637.703,18**	**6,01%**

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari uraian-ruaian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2025) dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025

URAIAN	Estimasi Realisasi 2020	PROYEKSI (Rp. Milyar)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Pendapatan	947,74	937,93	964,76	987,04	1.014,36	1.041,48
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	14,00	-
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	95,10	87,49	86,62	85,75	84,89	84,05
4. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	**1.042,84**	**1.025,43**	**1.051,38**	**1.072,79**	**1.113,26**	**1.125,52**
DIKURANGI						
5. Belanja Wajib Mengikat	542,32	505,01	539,52	571,69	614,34	637,70
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**500,53**	**520,42**	**511,86**	**501,10**	**498,92**	**487,82**

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2020

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.

Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Pekalongan, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2019 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan gambar 4.1.

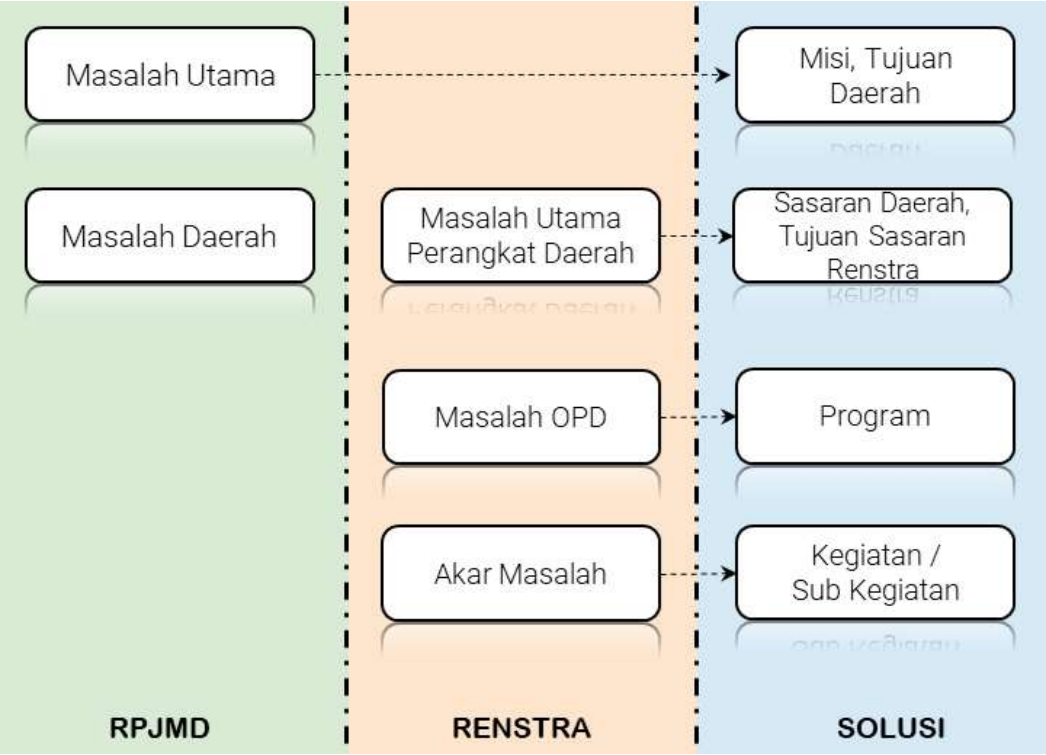

Gambar 4.1 Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, ditemukan 9 (sembilan) masalah utama di Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dengan Masalahan Utama

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalahan utama dan masalah daerah tersebut akan menjadi dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah. Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah dan Perangkat Daerah yang dijelaskan dalam Gambar 4.2, maka masalah daerah akan dijabarkan dalam permasalahan renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang akan diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Secara sistematis uraian masalah utama, masalah daerah dan permasalahan renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 tahap IV dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, terdapat 1 (satu) masalah utama yaitu kondusivitas wilayah.

4.1.1.1. Kondusivitas Wilayah

Hasil pemetaan masalah utama kondusivitas wilayah dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Pemetaan Masalah Utama Kondusivitas Wilayah dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Masalah utama kondusivitas wilayah akan diukur dengan indikator ada atau tidaknya kasus konflik sosial. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kota Pekalongan. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, diantaranya berkaitan dengan adanya kasus kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian Pemerintah Kota Pekalongan.

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Kondusivitas Wilayah, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Masih tingginya angka Kriminalitas	Masih terdapatnya kasus intoleransi dalam masyarakat.	Unsur Pemerintahan Umum, Trantibum
	Masih rendahnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan pada masyarakat.	Unsur Pemerintahan Umum
	Masih rendahnya pemahaman mengenai ideologi pancasila.	Unsur Pemerintahan Umum
Tingginya Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika	Masih adanya peredaran narkoba dikalangan pelajar	Unsur Pemerintahan Umum
	Masih adanya peredaran narkoba di masyarakat	Unsur Pemerintahan Umum

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi, terdapat 1 (satu) masalah utama yaitu Tata Kelola Pemerintahan.

4.1.2.1. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil pemetaan masalah utama tata kelola pemerintahan dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.4. Masalah utama tata kelola pemerintahan dengan indeks reformasi birokrasi. Data Tahun 2019 menunjukkan bahwa Indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2019 adalah 68,97. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi, diantaranya dengan menaikkan beberapa indikator yang menjadi permasalahan daerah, yaitu:

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart Governance)*
b. Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (Smart Governance)
c. Keterbatasan jumlah ASN serta belum optimalnya penataan dan peningkatan kompetensi ASN
d. Akuntabilitas Kinerja Masih perlu ditingkatkan
e. Akuntabilitas Keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan
f. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
g. Belum Optimalnya Tingkat Kapabilitas APIP

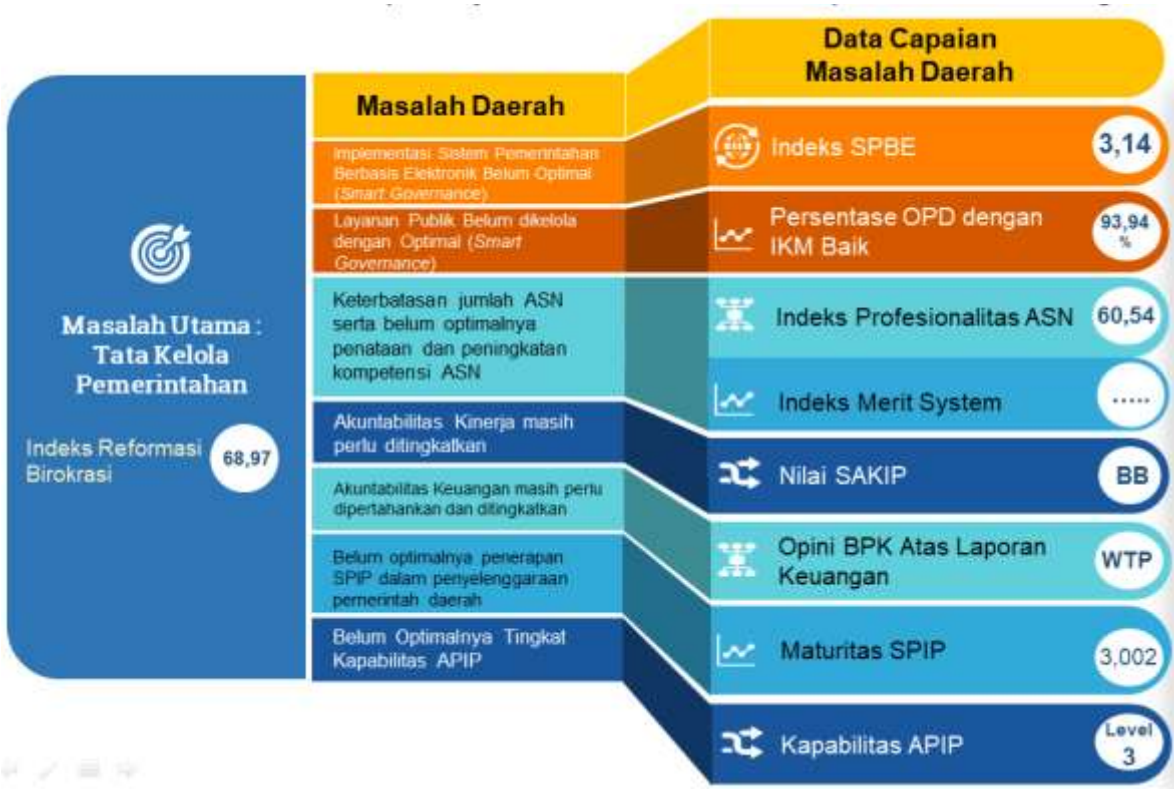

Gambar 4.4 Pemetaan Masalah Utama Tata Kelola Pemerintahan dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart Governance*)	Implementasi Satu Data belum optimal (*Smart Governance*)	Kominfo
	Belum ada arsitektur SPBE (Infrastruktur)	Kominfo
	Belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi SPBE dalam peningkatan keterpaduan pelaksanaan SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan layanan SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya penguatan kebijakan SPBE	Kominfo
	Terbatasnya kerangka kerja penerapan SPBE secara Terpadu	Kominfo
	Silo dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE	Kominfo
	Terbatasnya pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau	Kominfo

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
	Banyaknya penyelenggara SPBE yang belum mendaftarkan layanan publik dan non pelayanan publik berbasis elektronik yang dikelolanya	Kominfo
	Belum terpadu dan berkesinambungannya arah kebijakan strategi, dan pelaksanaan SPBE	Kominfo
	Belum terpadunya perencanaan dan penganggaran SPBE	Kominfo
	Belum disusunnya Proses Bisnis SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya penggunaan data dan informasi yang mengutamakan bagi pakai data dan informasi	Kominfo
	Belum optimalnya pengelolaan dokumen SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya pengelolaan Situs (Website) Resmi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Kominfo
	Belum optimalnya pengelolaan surat elektronik (e-Mail) resmi kedinasan	Kominfo
	Belum optimalnya pengelolaan media sosial (social media) dan pesan singkat (instant messaging) resmi kedinasan	Kominfo
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan SPBE	Kominfo
	Belum dilaksanakan Audit SPBE	Kominfo
	Belum Optimalnya Percepatan Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah	Kominfo
	Minimnya proses penerapan SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas	Kominfo
	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan	Kominfo
	Belum optimalnya pengembangan kepemimpinan SPBE (e-Leadership)	Kominfo
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya kinerja tim sesuai dengan pembagian tugasnya	Kominfo
	Belum optimalnya koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE sebagaimana diamanatkan Pasal 61 Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Kominfo
	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen SDM sebagaimana diamanatkan Pasal 51 Perpres 95 Tahun 2018 Tentang SPBE	Kominfo
Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (*Smart Governance*)	Pelayanan Publik belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat	Kominfo, Seluruh Urusan
	Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik	Kominfo, Seluruh Urusan
	Belum optimalnya kinerja organisasi	Semua Urusan
	Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan	Adminduk dan Capil

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
	Terbatasnya kapasitas SDM Layanan Publik	Semua Urusan
	Kurang optimalnya pelayanan kearsiapan dan perpustakaan	Perpustakaan
	Produk peraturan daerah belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	Perpustakaan
	Penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat	Unsur Penunjang
Keterbatasan jumlah ASN serta belum optimalnya penataan dan peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN pensiun tidak sebanding dengan penerimaan CPNS	Kepegawaian, Diklat
	Implementasi aplikasi administrasi kepegawaian belum optimal	Kepegawaian
	Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan	Kepegawaian, Diklat
Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Konsistensi Perencanaan, Penganggaran Masih Perlu ditingkatkan	Perencanaan
	Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan	Unsur Penunjang
Akuntabilitas keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan	Beratnya mempertahankan opini WTP dari BPK	Keuangan
	PAD yang belum optimal	Keuangan
Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Penyelenggaraan SPIP belum dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi Pemda	Unsur Pengawasan
Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP	Kapasitas, kewenangan, dan profesionalisme sumberdaya manusia APIP perlu ditingkatkan	Unsur Pengawasan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, terdapat 3 (tiga) masalah utama yaitu ; Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Banjir dan Rob, serta Kualitas Lingkungan Hidup.

4.1.3.1. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Hasil pemetaan masalah utama ketersediaan infrastruktur dasar dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.5. Masalah utama ketersediaan infrastruktur dasar diukur dengan rata-rata ketercapaian layanan air bersih perpipaan dan layanan persampahan. Data capaian tahun 2019 menunjukkan bahwa cakupan layanan air bersih perpipaan adalah 88,60%, sementara layanan persampahan tahun 2019 adalah 86,30%.

Gambar 4.5 Pemetaan Masalah Utama Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Belum optimalnya cakupan layanan air bersih (perpipaan)	Belum optimalnya penyediaan sarpras air bersih	PU-PR
	Keterbatasan sumber air baku	PU-PR
	Eksploitasi sumber air dalam masih berlebih	PU-PR
Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Kurangnya kesadaran masyarakat	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya penaatan regulasi lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya sarpras penanganan sampah	Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.3.2. Banjir dan Rob

Hasil pemetaan masalah utama banjir dan rob dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.6. Masalah utama banjir dan rob akan diukur dengan indikator persentase luas genangan terhadap luas Kota Pekalongan. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa luas genangan di Kota Pekalongan adalah 23,35%. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Penataan sistem drainase yang belum optimal, dimana data capaian tahun 2019 drainase dalam kondisi baik sebesar 58,9%.
b. Tingginya penurunan muka tanah (*land subsidence*) dengan kisaran 3-4 cm/tahun.
c. Masih adanya kawasan permukiman kumuh.

Gambar 4.6 Pemetaan Masalah Utama Banjir dan Rob dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4 Keterkaitan Banjir dan Rob, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Penataan sistem drainase yang belum optimal	Belum optimalnya kapasitas saluran dan masih diperlukan normalisasi, peningkatan / penambahan ruas saluran drainase	PU-PR
	Belum optimalnya pintu / pompa, kolam retensi.	PU-PR
Tingginya *land subsidence*	Tingginya penggunaan air bawah tanah untuk kebutuhan air bersih rumah tangga	PU-PR
Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik	PU-PR
	Belum optimalnya kondisi jalan lingkungan	
	Belum tingginya jumlah rumah tidak layak huni	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.3.3. Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pemetaan masalah utama kualitas lingkungan hidup dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.7. Masalah utama kualitas lingkungan hidup akan diukur dengan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Data tahun 2019 menunjukkan bahwa IKLH Kota Pekalongan adalah 52,92. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Tingginya tingkat pencemaran air, dengan indeks kualitas sebesar 46,00.
b. Belum optimalnya tutupan lahan, dengan indeks tutupan lahan sebesar 23,50

Gambar 4.7 Pemetaan Masalah Utama Kualitas Lingkungan Hidup dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Keterkaitan Sarana Prasaran Perkotaan, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Tingginya tingkat pencemaran air	Belum Optimalnya Sarpras Pengolah Limbah	Lingkungan Hidup
	Kiriman limbah dari wilayah sekitarnya	Lingkungan Hidup
Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdapat 3 (tiga) masalah utama yaitu ; Kualitas Sumber Daya manusia, derajat kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat.

4.1.4.1. Kualitas Sumer Daya Manusia

Hasil pemetaan masalah utama kualitas SDM dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.8. Masalah utama kualitas SDM akan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data tahun 2019 menunjukkan bahwa IPM Kota Pekalongan adalah 74,77. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 12,83 tahun
b. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah, sebesar 8,71 tahun
c. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender, dengan indeks pemberdayaan gender sebesar 60,95.

Gambar 4.8 Pemetaan Masalah Utama Kualitas SDM dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Keterkaitan Kualitas SDM, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah	Masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Pendidikan
Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah	Persentase penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi masih rendah	Pendidikan
Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Masih rendahnya jejaring PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.4.2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pemetaan masalah utama derajat kesehatan masyarakat dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.9. Masalah utama derajat kesehatan masyarakat akan diukur dengan Angka Usia Harapan Hidup. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup Kota Pekalongan adalah 74,28 tahun. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Masih tingginya angka kematian ibu, sebesar 101,30 per 100.000 kelahiran hidup
b. Masih tingginya angka kematian bayi, dengan angka 11,99 per 1.000 kelahiran hidup.
c. Masih tingginya angka kematian balita, dengan angka 9,63 per 1.000 kelahiran hidup.
d. Masih tingginya angka kesakitan, sebesar 12,89%.
e. Rawan pangan, dengan skor pola pangan harapan sebesar 91,31%.
f. Masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need KB*), sebesar 22,29%.

Gambar 4.9 Pemetaan Masalah Utama Derajat Kesehatan Masyarakat dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Keterkaitan Derajat Kesehatan Masyarakat, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Masih tingginya angka kematian ibu	Masih rendahnya perilaku hidup sehat pada ibu hamil selama menjalani masa kehamilan	Kesehatan
	Kurangnya dukungan keluarga/suami pada saat pemeriksaan kehamilan dan proses pengambilan keputusan	Kesehatan
Masih tingginya angka kematian bayi	Adanya penyakit penyerta pada bayi	Kesehatan
	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular pada bayi	Kesehatan
	Masih rendahnya manajemen terpadu balita sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan
Masih tingginya angka kematian balita	Adanya penyakit penyerta pada balita	Kesehatan
	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular pada balita	Kesehatan
	Masih rendahnya manajemen terpadu balita sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Masih tingginya angka kesakitan	Pandemi Covid-19	Kesehatan
	Masih tingginya kasus DBD, TB dan HIV/AIDS	Kesehatan
	Masih tingginya kasus penyakit tidak menular	Kesehatan
Rawan pangan	Rendahnya kualitas SDM/pendidikan	Pangan
	Stok Bahan Pangan Rendah	Pangan
	Bencana Alam	Pangan
	Bencana Teknologi	Pangan
	Faktor Ekonomi	Pangan
Masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need* KB)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB	Pengendalian penduduk dan KB
	Adanya keyakinan di masyarakat yang mengharamkan KB	Pengendalian penduduk dan KB
	Adanya ketakutan akan efek samping KB	Pengendalian penduduk dan KB

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.4.3. Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pemetaan masalah utama kesejahteraan masyarakat dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.10 berikut.

Gambar 4.10 Pemetaan Masalah Utama Kesejahteraan Masyarakat dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Masalah utama kesejahteraan masyarakat akan diukur dengan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2019 angka kemiskinan Kota Pekalongan adalah 6,60%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,77%. Angka ini diperkirakan akan naik di tahun 2020 sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Penanganan kemiskinan belum optimal, dimana jumlah waga miskin desil 1 berdasarkan DTKS adalah 20.775 jiwa.
b. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja, dengan tingkat partisipasi sebesar 72,32%.

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Keterkaitan Kesejahteraan Masyarakat, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Penanganan kemiskinan belum optimal	Belum Optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatnya jumlah PPKS akibat dampak pandemi covid 19	Sosial
	Data Kemiskinan tidak Akurat	Sosial
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan	Sosial
Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja	Dampak pandemi COVID-19	Ketenagakerjaan
	Calon tenaga kerja kurang terampil	Ketenagakerjaan
	Persepsi negatif masyarakat tentang transmigrasi	Ketenagakerjaan
	Pengembangan wirausaha belum optimal	Ketenagakerjaan
	Penerapan UMK belum optimal	Ketenagakerjaan
	Masih rendahnya kualitas lulusan lembaga pelatihan.	Ketenagakerjaan
	Belum optimalnya kepesertaan jaminan sosial (khususnya BPJS Kesehatan)	Ketenagakerjaan
	Belum optimalnya LKS Bipartit	Ketenagakerjaan
	Belum optimalnya *link and match* antara dunia pelatihan dengan dunia industri	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, terdapat 2 (dua) masalah utama yaitu ; daya saing ekonomi dan pelestarian seni budaya.

4.1.5.1. Daya Saing Ekonomi

Hasil pemetaan masalah utama daya saing ekonomi dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.11. Masalah utama daya saing ekonomi akan diukur dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan Gini Ratio. Pada tahun 2019 ekonomi Kota Pekalongan tumbuh sebesar 5,50%, sementara PDRB Per kapita sebesar Rp. 33,27 Juta/tahun. Angka ini diperkirakan akan turun di tahun 2020 sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah, yaitu:

a. Tingkat kunjungan pariwisata masih rendah, dengan angka kunjungan tahun 2019 sebesar 720 ribu kunjungan pertahun

b. Pertumbuhan investasi belum optimal, dengan nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp. 3,29 Triliun
c. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
d. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, dengan pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 4,84%.
e. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal dengan pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 5,72%.

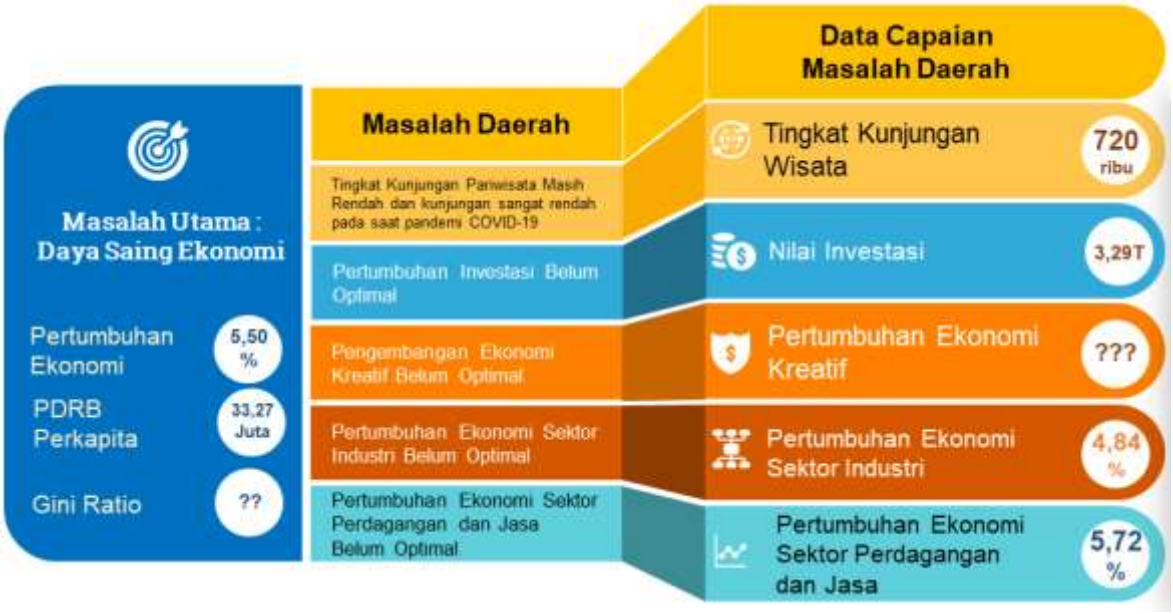

Gambar 4.11 Pemetaan Masalah Utama Daya Saing Ekonomi dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Keterkaitan Daya Saing Ekonomi, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Tingkat Kunjungan Pariwisata Masih Rendah dan kunjungan sangat rendah pada saat pandemi COVID-19	Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal	Pariwisata
	Infrastruktur pariwisata belum memadai	Pariwisata
	Keterbatasan media promosi	Kominfo
Pertumbuhan Investasi Belum Optimal	Keterbatasan lahan untuk investasi belum optimalnya promosi investasi	Penanaman Modal
Pengembangan ekonomi Kreatif Belum Optimal	Lemahnya penggalian potensi ekonomi kreatif	Unsur Pendukung, Pariwisata, Perindustrian, Kominfo
	Belum seriusnya komitmen memajukan ekonomi kreatif	Unsur Pendukung, Pariwisata, Perindustrian, Kominfo
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Belum Optimal	Pertumbuhan industri batik melambat dan jumlah permintaan sangat menurun akibat pandemi COVID-19	Perindustrian

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
	Peran koperasi dalam pengembangan UMKM belum optimal	Koperasi dan UKM
	Kecenderungan produksi ikan menurun	Kelautan dan Perikanan
	Konsumsi makan ikan dibawah standarisasi nasional	Kelautan dan Perikanan
	Produktivitas perikanan budidaya yang rendah	Kelautan dan Perikanan
	Produksi pertanian tidak optimal	Pertanian
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa Belum Optimal	Rendahnya nilai ekspor	Perdagangan
	Pengawasan barang beredar kurang optimal	Perdagangan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.1.5.2. Pelestarian Seni Budaya

Hasil pemetaan masalah utama pelestarian seni budaya dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.12 berikut.

Gambar 4.12 Pemetaan Masalah Utama Pelestarian Seni Budaya dan Masalah Daerah Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Masalah utama pelestarian seni budaya akan diukur dengan seberapa besar seni budaya dilestarikan. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah daerah, yaitu terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan sebagai salah satu pelestarian budaya.

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang ditunjukkan dalam tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Keterkaitan Pelestarian Budaya, Masalah Daerah dan Permasalahan Renstra

Masalah Daerah	Permasalahan Renstra	Urusan
Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal	Kebudayaan
	Infrastruktur kebudayaan masih terbatas	Kebudayaan
	Keterbatasan media promosi	Kominfo
	Pengelolaan komunitas budaya belum optimal	Kebudayaan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Internasional

a. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group* (OWG) *on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan,

Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pekalongan, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

c. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

d. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik *(physical distancing)* maupun sosial *(social distancing)* bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagaian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

4.2.1. Isu atau Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
b. Tenaga Kerja
c. Investasi
d. Perdagangan
e. Institusi
f. Pendidikan
g. Kesehatan
h. Karakter bangsa
i. Infrastruktur
j. Kewilayahan
k. Lingkungan Hidup dan Bencana
l. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan lokus di Kota Pekalongan, antara lain:

a. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan 20 persen GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, pengamanan pesisir di 5 (lima) perkotaan pantura Jawa masuk dalam daftar proyek prioritas strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024, dengan benefit mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon.
b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung,

Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang disebutkan bahwa Program dan Kegiatan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah :

1) Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN).
2) Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN).
3) Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
4) Penyempurnaan Sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
5) Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development)* Stasiun Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN).
6) Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak Kota Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU).

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh sendi kehidupan terdampak oleh pandemi ini. Perekonomian Indonesia berkontraksi hebat dan diperkirakan pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021. Pendidikan pun juga sangat terdampak dengan dilakukannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sistem daring. Proses produksi, dalam industri dan bisnis, dan tatanan kehidupan sosial-budaya di masyarakat terdampak hebat dengan pandemi COVID-19.

Sebagai implikasi dari dampak pandemi ini maka Pemerintah telah menyiapkan reformasi sistem penganggaran dalam penyusunan APBN tahun 2021. Redesain penganggaran dilakukan guna merealisasikan belanja yang lebih optimal dan efektif dengan menerapkan konsep *money for value*. Dengan konsep ini maka programnya jelas sehingga uangnya jelas kenapa dianggarakan sekian. Redesain sistem penganggaran ditargetkan juga akan mampu lebih memperjelas hubungan antara program, kegiatan, *output* dan *outcome*. Dengan reformasi ini pun diharapkan sistem teknologi informasi akan lebih terintegrasi dan organisasi menjadi lebih efisien.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1) Penanggulangan kemiskinan
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
5) Kedaulatan pangan dan energi
6) Kesenjangan wilayah
7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Beberapa kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah dengan lokus di Kota Pekalongan, antara lain:

a. Arah pengembangan wilayah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 salah satunya darahkan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, yaitu dengan

pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan).

b. Pengembangan wilayah Petanglong dengan Konsep Mina Batik, yaitu mengembangkan potensi utama perikanan dan industri batik, namun juga tetap meningkankan potensi pertanian dan wisata di wilayah selatan.
c. Fasilitasi pengembangan potensi pendukung destinasi pariwisata melalui pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan.
d. Obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu proyek-proyek potensial yang akan dibiayai diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan).

4.2.3. Hasil Telaahan RPJP Kota Pekalongan

Rancangan Teknokratik RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah **"Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera".** Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :

a. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih,aman,tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada, profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi dan Teknologi Informasi.
c. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
e. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan keempat, diarahkan pada:

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, melalui:
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, dan Partisipatif, melalui:
3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, melalui:
4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, melalui:

4.2.4. Hasil Telaahan KLHS Kota Pekalongan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2024, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.
b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau *Bussiness As Usual* (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2024.
c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) dengan *Bussiness As Usual* (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.
d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Pekalongan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan dating.
e. Rekomendasi program. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2024 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan **telah terlampaui**, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus "secara bijaksana" menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Terhadap kelima aspek penting yang telah disebutkan di atas maka akan diuraikan dua hal aspek yang terpenting yaitu status lingkungan hidup serta penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah, karena kedua aspek harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi RPJMD Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

4.2.4.1. Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Berdasarkan kondisi lingkungan Kota Pekalongan, yaitu enam muatan KLHS dalam Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka kondisi lingkungan dan keterkaitannya dengan target dalam TPB dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 4.11 Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Keterkaitan dengan Target TPB

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
A	**Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**			
A1	Daya dukung air permukaan	- Kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) mencapai 55,17 juta m^3/tahun - Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 44,73 juta m^3/tahun - Daya dukung air permukaan sebesar 0,81 dengan status terlampaui	- Terlampauinya daya dukung air permukaan mendorong penggunaan air bawah tanah berlebihan yang mengakibatkan turunnya muka tanah - Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan air baku dari wilayah sekitar - Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat	1.2; 1.4; 1.a; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
A2	Daya dukung pangan pokok	- Produksi beras 2.705 ton/tahun - Kebutuhan mencapai 33 ribu ton beras - Daya dukung pangan pokok 0,08 dengan status terlampaui	Terlampauinya daya dukung pangan menyebabkan ketergantungan terhadap daerah sekitar untuk pasokan makanan untuk memenuhi konsumsi dan asupan gizi masyarakat	2.1; 2.3;
A3	Daya dukung lahan terbangun	- Daya Dukung Lahan Terbangun 1,14 dengan status sedang atau bersyarat - Kecamatan Pekalongan Barat pada kondisi terlampaui (0,8), 3 kecamatan lain dalam kondisi sedang	- Ketersediaan lahan untuk kegiatan terbangun mengindikasikan tingkat kepadatan kota dan rendahnya ruang terbuka baik hijau maupun non hijau - Kepadatan kota pada kawasan masyarakat miskin memicu tumbuhnya ruang-ruang kumuh	1.4; 6.2; 6.5; 11.1; 11.7; 13.1;
A4	Daya dukung fungsi lindung	- Lahan terbangun memiliki fungsi lindung paling rendah sedangkan tutupan	- Kondisi daya dukung fungsi lindung mencerminkan kondisi tutupan vegetasi dan	1.5; 6.3; 6.5; 11.5; 11.7; 11.b; 13.1;

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
		lahan hutan memiliki fungsi lindung paling tinggi - Daya dukung fungsi lindung 0,36 (skala 0 – 1) dalam kondisi sedang	peruntukan lahan - Kondisi fungsi lindung mengindikasikan kualitas RTH yang memberikan fungsi purifikasi polutan secara alami	15.1; 15.3; 15.9;
B	**Kinerja Layanan atau Jasa Layanan**			
B1	JE Penyedia Pangan	- 50% dalam kondisi rendah (di kawasan pusat kota) - 42% dalam kondisi tinggi (di utara untuk perikanan dan selatan pertanian)	Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan yang rendah menyebabkan rendahnya pasokan pangan dari wilayah sendiri, sehingga memiliki ketergantungan pasokan dari wilayah sekitar	2.1; 2.3;
B2	JE Penyedia Air	- 57% dalam kondisi rendah sehingga sulit menampung dan menyimpan air - 35% dalam kondisi tinggi dapat menyimpan dan menyediakan air tanah dan permukaan	Ruang yang sesuai untuk menyimpan dan menyediakan air mengakibatkan meningkatnya penggunaan air bawah tanah dan juga ketergantungan terhadap daerah sekitar	1.2; 1.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
B3	JE Pengatur Iklim	- 64% dalam kondisi rendah pada kawasan padat pusat kota dan pesisir - 35% dalam kondisi tinggi pada kawasan pertanian dan kebun campur di wilayah tenggara dan barat daya	Rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim menunjukkan rendahnya tutupan vegetasi lahan dan berdampak iklim mikro yang panas	3.3; 13.1;
B4	JE Pengaturan Tata Air dan Banjir	- 65% dalam kondisi rendah pada kawasan padat pusat kota - 35% dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan badan air	Rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan)	1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.4; 6.5; 11.5;
B5	JE Perlindungan Pencegahan Bencana	- 64% dalam kondisi rendah terutama pada kawasan pesisir - 35% dalam kondisi tinggi pada lahan non terbangun di tenggara	Ruang perlindungan pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana *Hidro-meteorologi*	1.5; 1.a; 3.3; 6.5; 11.5; 11.b;
B6	JE Pemurnian Air	- 65% dalam kondisi rendah pada kawasan pusat kota dan pesisir - 35% dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan badan air	Ruang pemurnian air yang rendah menyebabkan kemampuan purifikasi air polutan secara alami menjadi rendah dan menurunkan kualitas air permukaan dan tanah	1.4; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3;

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
B7	JE Pengurai Limbah	- 64% dalam kondisi rendah pada kawasan padat perkotaan dan pesisir - 35% dalam kondisi tinggi di kawasan pertanian dan kebun campur	Rendahnya kawasan dengan fungsi pengurai limbah menyebabkan kemampuan alam untuk meremediasi berbagai polutan rendah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah	1.4; 1.a; 3.3; 6.2; 6.3; 11.6; 12.5;
B8	JE Kualitas Udara	- 65% dalam kondisi rendah terutama di kawasan pesisir - 30% dalam kondisi tinggi meskipun tidak ada yang masuk kategori sangat tinggi	Rendahnya kawasan yang dapat menyediakan kualitas udara yang baik mengindikasikan rendahnya tutupan vegetasi lahan yang mampu mempurifikasi polusi udara	11.6;
B9	JE Pendukung *Biodiversity*	- 64% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota - 34% dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung *biodiversity* yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami	2.1; 2.3; 11.7; 15.1; 15.3; 15.9;
C	**Sumber Daya Alam**			
C1	Pertanian	- Penyusutan lahan sawah irigasi teknis dari 1.162 ha pada 2015 menjadi 925 ha pada 2019 akibat pengembangan lahan terbangun - Kontribusi pertanian secara luas terhadap PDRB terus menurun dari 5,32% pada tahun 2015 menjadi 4,66% pada 2019	Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian	1.2; 1.4; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 11.1;
C2	Sumber daya air	- Tidak memiliki sumber mata air, sedangkan kualitas air permukaan kurang memadai sebagai sumber air baku - Sumber air baku berasal dari Kabupaten Batang (IPA Sungai Kupang Sambong dan Mata Air Kembangalit) dan Kabupaten Pekalongan (IPA dan Mata Air Kec. Doro) - Pemanfaatan langsung air baku dari air tanah di Kota Pekalongan yang merupakan bagian dari CAT Pekalongan – Pemalang	Tidak adanya sumber mata air dan kualitas air permukaan yang kurang layak untuk sumber air baku mengakibatkan ketergantungan yang tinggi akan pasokan air baku dari wilayah sekitar dan penggunaan air bawah tanah	1.2; 1.4; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 11.1;

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
D	**Risiko Lingkungan Hidup**			
D1	Kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air meningkat tetapi dalam kondisi sangat kurang baik yaitu 44,67 pada 2017 dan 46,0 pada 2019 - Indeks Kualitas Udara dalam kondisi sangat baik yaitu 99,29 pada 2017 dan menjadi 99,05 pada 2019 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam kategori waspada karena hanya 23,5 dan tetap dari 2017 – 2019 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kondisi kurang baik yaitu 52,59 pada tahun 2017 dan menjadi 52,92 pada tahun 2019	- Indeks kualitas air yang sangat kurang baik menunjukkan bahwa kualitas air permukaan dan tanah yang kurang layak sebagai sumber air baku. - Indeks kualitas tutupan lahan yang rendah menunjukkan rendahnya ruang terbuka hijau atau lahan hutan. - Indeks kualitas udara yang tinggi menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah -	1.2; 1.4; 1.a; 2.1; 2.3; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 11.1; 11.6; 13.1; 15.1; 15.3; 15.9;
D2	Persampahan	- Cakupan layanan terus meningkat dari 80,40 pada 2015 dan meningkat menjadi 86,30 pada tahun 2019 - TPA Degayu beroperasi sejak 1994 dengan usia teknis 15 tahun. Luas TPA 5,8 Ha dengan pengoperasian *control landfill.* Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km	- Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. - TPA telah melampaui usia teknis dan dekat dengan permukiman dan badan air berdampak pada kontaminasi sumber air - Terbatasnya lahan sesuai dengan kriteria layak untuk TPA menyebabkan ketergantungan lahan pada wilayah sekitar	1.4; 11.6; 12.5;
D3	Risiko bencana	- Rawan bencana rob, bencana banjir, dan bencana abrasi. - Kawasan rawan bencana rob dan banjir sekitar 60 hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. - Kawasan rawan bencana abrasi sekitar 12 hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan	- Jenis bencana rob dan banjir merusak infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung - Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove	1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.5; 11.1; 11.5; 11.b; 13.1;
D4	Penurunan muka tanah	- Penurunan permukaan air tanah rata-rata selama 30 tahun mencapai 0,4	- Penurunan muka tanah disebabkan oleh penggunaan air bawah tanah yang	1.2; 1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.4;

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
		meter/tahun - Rata-rata pada kawasan pusat kota laju penurunan muka tanah pada kisaran 11-23 cm/tahun - Laju penurunan muka tanah tertinggi ada di Kelurahan Tirto (mencapai 34,5 cm/tahun), Jenggot dan Buaran Kadranan - Terdapat titik-titik di wilayah pesisir yang ketinggiannya lebih rendah dari titik 0 (bahkan hingga -4 m) di bawah muka tanah dan mengalami genangan permanen.	berlebih karena keterbatasan sumber daya air - Penurunan muka tanah mengakibatkan lahan tergenang secara permanen terutama ketika air laut pasang (rob) - Genangan permanen akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengganggu kesehatan salah satunya penyakit filariasis -	11.1; 11.5; 11.b;
E	**Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim**			
E1	Kerentanan perubahan iklim	- Curah hujan di Atas Normal diprediksi pada 2021 akan cenderung lebih sering terjadi kecuali bulan Februari dan Desember, dengan dominasi kejadian terutama di wilayah hulu dan tengah - Pada wilayah hilir dan pesisir pada diperkirakan menunjukkan dominasi peluang sifat hujan yang Normal - Kenaikan muka air laut diproyeksikan pada 2040 akan mencapai kisaran 0,81 cm/tahun. Jika dibandingkan dengan 2017 maka diperkirakan kenaikannya mencapai 130 cm - Di periode 2021-2025 genangan dengan ketinggian >2m diprediksi akan meluas ke selatan dari daerah pesisir - Semakin meluas hingga daerah timur (Degayu, Gamer, Setono, Klego dan Kauman dengan tinggi genangan mencapai 1,2 m) di periode 2031-2035	- Curah hujan tinggi di Atas Normal pada bulan Januari pada wilayah hulu akan meningkatkan ancaman banjir kiriman atau banjir bandang - Kenaikan muka air laut akan meningkatkan intensitas dan jangkauan rob serta abrasi - Peningkatan intensitas dan jangkauan genangan rob dan banjir akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengganggu kesehatan salah satunya penyakit filariasis -	1.2; 1.4; 1.5; 1.a; 2.1; 2.3; 3.3; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 11.1; 11.5; 11.b; 13.1;
E2	Ruang terbuka hijau	- RTH publik seluas 907 Ha (sekitar 20% luas wilayah)	Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan	11.7; 13.1; 15.1; 15.3;

No	Sumber Daya Alam/ Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Status	Keterangan	Keterkaitan terhadap Target TPB
		dan RTH privat seluas 585 Ha (sekitar 12% dari luas wilayah) - Sebagian besar RTH publik berupa sempadan baik sungai, jalan, laut, SUTT dan sebagian kecil hutan dan taman kota	resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat	15.9;
F	**Ketahanan dan Potensi Sumber Daya Hayati**			
F1	Kondisi keanekaragaman hayati	- Ancaman penurunan *biodiversity* pesisir akibat berkurangnya lahan hutan mangrove seperti spesies ikan, hewan laut serta burung - Ancaman ekosistem kawasan pertanian seperti serangga, tikus serta tanaman pangan dan obat dapat mengganggu rantai ekosistem - Perlindungan keanekaragaman hayati pada taman kota dan hutan kota	- Kerusakan ekosistem pesisir dapat menurunkan produksi perikanan - Gangguan pada ekosistem kawasan pertanian menyebabkan ancaman serangga dan tikus pada permukiman penduduk yang dapat mengancam kesehatan masyarakat -	2.1; 2.3; 15.1; 15.3; 15.9;
F2	Sebaran jasa ekosistem penyedia *biodiversity*	- 64% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota - 34% dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung *biodiversity* yang rendahnya menunjukkan tingkat *biodiversity* yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami	2.1; 2.3; 15.1; 15.3; 15.9;

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekalongan, 2020

4.2.4.2. Penentuan Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis Daerah

Berikut adalah uraian permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS RPJMD di Kota Pekalongan:

Tabel 4.12 Permasalahan dan Isu Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS

Permasalahan TPB	Permasalahan Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Isu Strategis
- Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan - Belum semua kelurahan Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) - Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air	- Rendahnya jasa ekosistem untuk pemurnian air, jasa ekosistem pengurai limbah yang mempengaruhi kualitas sumber daya air - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan terbatasnya daya tampung TPA	Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi

Permasalahan TPB	Permasalahan Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Isu Strategis
minum layak dan berkelanjutan. - Masih rendahnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri - Belum tersedianya sistem insentif untuk tata kelola sumber daya air seperti insentif penghematan air pertanian dan industri; Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam RTRW; dan penataan kelembagaan sumber daya air - Penerapan *green waste* dan pengelolaan limbah B3 -	- Rendahnya kualitas air permukaan menyebabkan tidak layak untuk sumber air baku - Rendahnya jasa ekosistem penyedia air, dan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir yang mempengaruhi kapasitas penyerapan dan penampungan air - Terlampauinya daya dukung air permukaan (0,81) - Tidak adanya sumber daya air selain air bawah tanah yang tersedia di Kota Pekalongan, sehingga seluruh pemenuhan sumber daya air permukaan dari wilayah sekitar	
- Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. - Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. - Rehabilitasi lahan kritis - Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	- Daya dukung fungsi lindung kategori sedang - Rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kualitas tutupan lahan yang menyebabkan rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim - Rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem pendukung *biodiversity* yang mempengaruhi rendahnya kualitas keanekaragaman hayati	Peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan lahan untuk pengaturan iklim, kawasan resapan air dan perlindungan *biodiversity*
- Masih adanya korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang - Kerugian ekonomi langsung akibat bencana - Belum seluruh lokasi bencana mendapatkan kegiatan penguatan pengurangan risiko bencana daerah - Peningkatan energi terbarukan	- Rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana dan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir - Terjadinya penurunan muka tanah (amblesan) akibat penggunaan air bawah tanah yang berlebihan - Meningkatnya intensitas dan jangkauan kawasan rawan bencana rob, banjir dan abrasi pantai - Peningkatan ancaman dampak perubahan iklim dengan meningkatnya cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut - Daya dukung lahan terbangun	Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim

Permasalahan TPB	Permasalahan Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Isu Strategis
	yang hampir terlampaui berakibat pada berkurangnya kawasan resapan air	
- Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat - Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); SD/MI/ sederajat, dan SMP/MTs/sederajat - Belum tercapainya Rata-rata lama sekolah minimal penduduk umur ≥15 tahun. - Proporsi anak-anak dan remaja dalam mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika - Proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur untuk disabilitas, air minum layak, dan fasilitas sanitasi dasar untuk mendukung pengajaran - Peningkatan guru di semua tingkatan yang bersertifikat pendidik		Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
- Masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan dan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. - Perlunya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup - Perlunya melakukan deteksi dini untuk penyakit infeksi Hepatitis B dan tekanan darah tinggi - Perlunya intervensi untuk mengeliminasi penyakit filariasis - Perlunya menurunkan penduduk umur ≤18 tahun dan ≥15 tahun yang merokok	- Daya dukung pangan pokok yang terlampaui mengganggu pemenuhan asupan kalori minimum - Rendahnya kawasan sebagai jasa ekosistem penyedia pangan serta menurunnya lahan pertanian - Rendahnya kualitas keanekaragaman hayati kawasan pesisir dan pertanian mengganggu produksi pangan - Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air yang mempengaruhi Kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
- Perlunya meningkatkan PDRB per kapita - Persentase meningkatkan tenaga kerja informal di sektor pertanian - Perlunya menekan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran - Perlunya meningkatkan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	- Penurunan lahan pertanian yang mempengaruhi ekonomi dari sektor pertanian - Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang mempengaruhi tingkat ketertarikan sektor pariwisata -	Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata yang berkontribusi terhadap PDRB

Permasalahan TPB	Permasalahan Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Isu Strategis
- Akses UMKM ke layanan keuangan dan proporsi terhadap total kredit - Peningkatan akses kantor bank dan ATM - Peningkatan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB - Menurunnya jumlah wisatawan baik Mancanegara maupun Nusantara - Menurunnya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata		
- Belum seluruh penduduk memiliki akta kelahiran. - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistic Register*) - Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) - Perlunya mengembangkan penyiapan dan pengembangan proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Peningkatan indeks reformasi birokrasi - Perlunya meningkatkan konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan - Belum seluruh indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target		Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat
- Masih rendahnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) - Masih terbatasnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan - Masih adanya *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) - Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 dan 18 tahun - Kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun pada penduduk umur 18-24 tahun		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥15 tahun		Kondusivitas wilayah

Permasalahan TPB	Permasalahan Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Isu Strategis
- Kasus kejahatan serta konflik sosial - Tingkat keamanan penduduk yang berjalan sendirian pada area tempat tinggal		

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 8 isu strategis. Selain itu, dalam kegiatan uji publik pertama untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup. Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob. Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan berdasarkan kelompok pilar.

a. **Pilar Sosial** : (1) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
b. **Pilar Ekonomi** : (4) Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata dan berkontribusi terhadap PDRB;
c. **Pilar Lingkungan** : (5) Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi; (6) Peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan lahan untuk pengaturan iklim, kawasan resapan air dan perlindungan *biodiversity*; (7) Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;
d. **Pilar Hukum dan Tata Kelola** : (8) Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat; (9) Kondusivitas wilayah.

Sasaran strategis disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari perumusan capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Pekalongan. Isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis merupakan rekomendasi KLHS dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021 – 2024. Selain itu sasaran strategis juga menjadi dasar dalam penyusunan program.

Tabel 4.13 Sasaran Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS

No	Isu Strategis	Sasaran Strategis
Pilar Sosial		
1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	- Menjamin ketahanan pangan dan asupan gizi bagi seluruh penduduk - Meningkatkan deteksi dini dan eliminasi epidemi penyakit bersumber dari air dan penyakit menular lainnya - Mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan	- Meningkatkan akses pendidikan untuk semua penduduk pada semua jenjang pendidikan - Meningkatkan fasilitas pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar aman, anti kekerasan dan inklusif bagi semua

No	Isu Strategis	Sasaran Strategis
		- Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik
3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	- Mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui Lembaga Legislatif dan Eksekutif - Meningkatkan kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan - Menekan pernikahan usia dini dan kekerasan seksual pada perempuan - Meningkatkan kualitas kesehatan seksual dan reproduksi
Pilar Ekonomi		
4	Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata yang berkontribusi terhadap PDRB	- Meningkatkan akses keuangan bagi UMKM - Mengembangkan usada di luar sektor industri untuk meningkatkan PDRB dan membuka lapangan kerja - Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul - Meningkatkan anggaran riset pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi
Pilar Lingkungan		
5	Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi	- Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui penanganan sumber pencemaran air baik limbah padat dan cair dari sumbernya - Mengembangkan sumber air baku melalui sarana dan prasarana penampungan air hujan dan meningkatkan jaringan dan akses air bersih yang berkelanjutan - Meningkatkan kualitas dan akses sanitasi bagi seluruh penduduk - Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya air berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan lahan untuk pengaturan iklim, kawasan resapan air dan perlindungan *biodiversity*	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tutupan lahan melalui pengembangan RTH dan rehabilitasi lahan kritis - Menyusun dokumen rencana lingkungan sesuai amanat perundangan sebagai arahan kebijakan pengelolaan lingkungan - Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati
7	Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim	- Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui kelurahan tangguh bencana - Mengembangkan sistem pemantauan untuk pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dalam mencegah amblesan - Menata kembali kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi korban dan kerugian bencana - Mengembangkan sistem pengelolaan drainase yang dapat mengurangi rob dan banjir serta adaptif terhadap perubahan iklim pada masa yang akan datang
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
8	Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan	- Meningkatkan cakupan layanan registrasi penduduk serta

No	Isu Strategis	Sasaran Strategis
	masyarakat	kelahiran dan kematian - Mengembangkan alternatif pembiayaan infrastruktur di luar APBD Kota Pekalongan - Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dan perilaku anti korupsi - Mengembangkan sistem data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk mendukung kinerja pembangunan
9	Kondusivitas wilayah	- Menekan kasus kriminalitas dan konflik sosial - Memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekalongan, 2020

4.2.5. Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.5.1. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bahwa kewenangan pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat banyak konsep tentang tata kelola pemerintahan yang baik, namun terdapat empat prinsip utama untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2019 berjumlah satu kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pada tahun 2019 sebesar 4,59 (per 10.000 penduduk), namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2019 adalah sebesar 44 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Tata kelola pemerintahan pun harus dilakukan upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Hingga tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 68,97 dan harus terus ditingkatkan dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa

permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,14. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 93,94%; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 60,54; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3.022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal.

Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusivitas Wilayah juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

4.2.5.2. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perkotaan

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Dari data tahun 2019 dapat diketahui bahwa persentase capaian layanan sarana prasarana masih sebesar 87,45%, sehingga penyediaan infrastruktur dasar belum optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar 88,60%. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air

bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, persentase layanan persampahan tahun 2019 sebesar 86,30%. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

4.2.5.3. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob

harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Namun demikian, hingga saat ini, luas genangan masih sebesar 23,35% dari luas wilayah Kota Pekalongan atau 1.057 Ha. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 58,9%; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 3-4 cm per tahun; dan c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 0,69%;.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Hal ini ditambah dengan permasalahan yang sedang terjadi adalah terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh ekploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun secara yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya. Masih adanya kawasan kumuh di wilayah Kota Pekalongan, di samping faktor sosial ekonomi masyarakat, juga diakibatkan oleh banjir dan rob. Kawasan banjir dan rob rentan sekali terbentuk kawasan kumuh.

Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 52,92. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan. Belum optimalnya kualitas lingkungan, ditandai dengan a) Tingginya tingkat pencemaran air, indeks kualitas air hanya sebesar 46,00% pada tahun 2019; b) Belum optimalnya tutupan lahan, dimana indeks kualitas tutupan lahan tahun 2019 sebesar 23,5%.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kota Pekalongan karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan,

seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30% dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu; menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob (Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024).

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres 19 Tahun 2019, antara lain : Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN)

4.2.5.4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Namun demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, harus secara kontinyu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 74,77. Meskipun IPM Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut menunjukkan angka terendah dibandingkan lima kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan a) Belum optimalnya harapan lama sekolah, pada tahun 2019, angka harapan lama sekolah sebesar 12,83 tahun; b) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2019, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,71 tahun; dan c) Belum optimalnya pengarusutamaan gender, pada tahun 2019, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 60,95.

Harapan lama sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

Sejalan dengan kondisi harapan lama sekolah yang belum optimal maka rata-rata lama sekolah pun belum optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Pekalongan sampai di kelas 9 atau belum lulus SMP. Tentunya kondisi ini pun juga diakibatkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik pun harus terus ditingkatkan karena selama ini perannya belum optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya peran perempuan dalam ekonomi sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik ini harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga peran perempuan dalam ekonomi dan politik dapat lebih optimal.

Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

4.2.5.5. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi Covid-19)

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi covid sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, dan karena kekhawatiran masyarakat sehingga penderita penyakit kronis tidak mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kota Pekalongan pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 sebesar 74,28. Seharusnya UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Bila dicermati lebih detail, maka belum optimalnya derajat kesehatan di Kota Pekalongan, dikarenakan beberapa hal, yaitu: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2019 AKI masih bernilai 101,30 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2019 AKB masih bernilai 11,99 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya angka kematian balita (AKABA), tahun 2019 AKABA masih bernilai 9,63 per 1.000 KH; d). Masih tingginya angka kesakitan dengan nilai 12,89%; e) Kondisi rawan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,31; dan f) Masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, pada tahun 2019 mencapai sebesar 22,29%.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi COVID-19.

Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan, sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan terbangun, terutama untuk kegiatan perumahan, industri maupun perdagangan jasa. Kegiatan yang lebih produktif akan mendesak penggunaan lahan yang dianggap kurang produktif, misalnya semakin terdesaknya kawasan pertanian di perkotaan. Semakin berkurangnya lahan pertanian, berimplikasi semakin tergantungnya Kota Pekalongan kepada wilayah lain. Salah satu akibatnya adalah kondisi rawan pangan, yang ditunjukkan dengan skor PPH yang belum optimal. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, misalkan melalui intensifikasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk pengembangan KRPL. Upaya tersebut harus terus dilakukan agar tercapai skor PPH yang lebih optimal.

Unmet need KB yang masih tinggi, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perencanaan pengaturan jumlah anak agar terwujud keluarga yang sejahtera. Tantangannya, di masyarakat masih berkembang bahwa anak akan membawa rezeki masing-masing. Upaya penyadaran harus sejalan dengan kondisi riil masing-masing keluarga, dari sisi sosial, ekonomi maupun kesehatan, keluarga harus dapat merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya dan pemahaman bahwa anak merupakan titipan Yang Maha Kuasa sehingga harus mendapatkan perhatian dan pendidikan maksimal dari orang tua.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

4.2.5.6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecendertahun yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 6,60%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 sebesar 5,77%. Dengan kedua indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Bila dicermati lebih detail maka beberapa hal yang membuktikan tingkat kesejahteraan yang belum optimal tersebut, yaitu: a) Penanganan kemiskinan belum optimal, jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2019 sebesar 121.889 jiwa; dan b) Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja, yang ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 72,32%.

Angka kemiskinan Kota Pekalongan belum optimal menurun karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah, ketika angka kemiskinan semakin menurun maka diperlukan upaya yang harus semakin konsisten dan konvergen.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, pada awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi covid maka akan berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, karena terjadinya kontraksi ekonomi. Di lain pihak, masih belum optimalnya penurunan angka kemiskinan maupun jumlah warga miskin karena partisipasi angkatan kerja yang masih rendah. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja akan semakin tinggi, sehingga jumlah orang yang berkesempatan bekerja meningkatkan dan pada gilirannya akan berdampak bagi penurunan TPT maupun penurunan angka kemiskinan dan jumlah warga miskin. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Isu kemiskinan dan pengangguran juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata ; meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;.

4.2.5.7. Pengembangan Budaya, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT, khusunya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan

yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,50%; b) Pendapatan perkapita belum optimal, pendapatan perkapita tahun 2019 sebesar Rp 33,27 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi covid, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 720.000 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2019 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2019 sebesar 4,84,%; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2019 sebesar 5,72%; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2019 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi covid, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru dan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan. Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, padahal panjang jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman. Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development)* Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

4.2.6. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Pekalongan dengan isu Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS dapat dijelaskan dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
1	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	a. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal (*smart governance*) b. Layanan publik belum dikelola dengan optimal (*smart governance*) c. Keterbatasan jumlah asn serta belum optimalnya penataan dan peningkatan kompetensi asn d. Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan e. Akuntabilitas keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan f. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah g. Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	5. Institusi 10. Kewilayahan 12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah 6) Kesenjangan wilayah	8. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat 9. Kondusivitas wilayah
2	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perkotaan	a. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih b. Belum optimalnya cakupan layanan persampahan perkotaan	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; .9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;	9. Infrastruktur 11. Lingkungan Hidup dan Bencana	4) Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam Selain itu salah satu program kewilayahan	5. Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
					Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan adalah pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan)	
3	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	a. Penataan sistem drainase yang belum optimal b. Tingginya penurunan muka tanah (*land subsidence*) c. Masih adanya kawasan permukiman kumuh. d. Tingginya tingkat pencemaran air e. Belum optimalnya tutupan lahan	12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	11. Lingkungan Hidup dan Bencana Selain itu salah satu program penanganan rob dan banjir dengan lokus di Kota Pekalongan adalah: - Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang - Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang. - Pengendalian Banjir dan Rob. - Penyempurnaan Sistem banjir dan rob	4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan lahan untuk pengaturan iklim, kawasan resapan air dan perlindungan *biodiversity* 7. Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim
4	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	a. Belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah b. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah c. Belum optimalnya pengarusutamaangGender	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum	6. Pendidikan 8. Karakter bangsa	2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 3. Kesetaraan gender dan

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
			perempuan;			pemberdayaan perempuan
5	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi Covid-19)	a. Masih tingginya angka kematian ibu b. Masih tingginya angka kematian bayi c. Masih tingginya angka kematian balita d. Masih tingginya angka kesakitan. c. Rawan pangan d. Masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(Unmet need KB*)	3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	7. Kesehatan Selain itu salah satu program percepatan pembangunan ekonomi kawasan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak (Perpres 79 Tahun 2019)	2). Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 5) Kedaulatan pangan dan energi Selain itu salah satu program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan adalah diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan)	1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
6	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	a. Penanganan kemiskinan belum optimal b. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja	1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk	2. Tenaga Kerja 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Karakter bangsa	1) Penanggulangan kemiskinan	4. Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata yang berkontribusi terhadap PDRB

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
			semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;			
7	Pengembangan Budaya, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	a. Tingkat kunjungan pariwisata masih rendah, dengan angka kunjungan tahun 2019 sebesar 720 ribu kunjungan pertahun; b. Pertumbuhan investasi belum optimal, dengan nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp. 3,29 Triliun c. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal d. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, dengan pertumbuhan di tahun s2019 sebesar 4,84%. e. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa belum optimal. f. Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 3. Investasi 4. Perdagangan Selain itu salah satu program percepatan pembangunan ekonomi kawasan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan	3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha Selain itu salah satu program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan adalah pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan	4. Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata yang berkontribusi terhadap PDRB

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan teknokratik. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 ini disusun dalam kerangka teknokratik, yaitu dengan menggunakan data-data empiris serta analisis berbasis kerangka pikir ilmiah. Harapannya, dokumen ini akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD yang akan mengkolaborasikan berbagai pendekatan, baik politis, partisipatif, atas bawah ataupun bawah atas. Sehingga akan dapat diperoleh perencanaan yang lebih menyeluruh, sistematis, terstruktur, memiliki kejelasan dalam pentahapan tahunan maupun kejelasan atas tujuan pada akhir periode perencanaan jangka menengah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2020). Kota Pekalongan Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Jawa Tengah Dalam Angka.